

EDISI 2010



SEJARAH PUSAT KURIKULUM

Oleh

Prof. Dr. H. Soedijarto

Drs. Thamrin, MA

Brs. Benny Karyadi, M.Sc

Dr. Siskandar, MA

Dr. Sumiyati, M.Pd

PUSAT KURIKULUM

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN LATARBELAKANG

BAB I.

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 1974-19815

A. Kurikulum 1975, Perencanaan dan Pengembangan.....	5
B. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan	20
C. Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Bantuan Profesional Bagi Guru guru dan Profesional	22

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 1981-1988

A. Latar belakang Kurikulum 1981 – 1984	36
B. Model perencanaan dan pengembangan kurikulum 1981-1988	37
C. Kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum 1981 – 1988.....	38
D. Kurikulum 1984, proses perencanaan dan pengembangannya	41
E. Pendekatan pembelajaran CBSA dan Keterampilan Proses	54

BAB III

LATARBELAKANG DAN LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 1994

A. Latarbelakang Kurikulum 1994	63
B. Pengembangan Kurikulum 1994	70
C. Struktur Kurikulum 1994	74

BAB IV

LATARBELAKANG DAN LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 2004

A. Latarbelakang	90
B. Kerangka Dasar Kurikulum.....	93
C. Struktur Kurikulum	107
D. Pengelolaan Kurikulum.....	124
E. Evaluasi Kurikulum	133

BAB V

PENUTUP.....	138
DAFTAR PUSTAKA	142

PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

KURIKULUM adalah program pendidikan yang meliputi berbagai mata pelajaran atau mata kuliah yang harus dipelajari peserta didik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT) yang sudah ada sejak ada sistem persekolahan. Di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan terutama dalam periode penjajahan sejak permulaan abad ke 20 sudah dikenal adanya penjenjangan persekolahan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Sampai tahun 1942 pada tingkat Sekolah Dasar, pendidikan sudah dibedakan mulai dari kurikulum, fasilitas belajar dan gurunya, yaitu antara sekolah untuk rakyat jelata pribuni, pribumi priayi, dan untuk anak-anak orang keturunan China dan Eropa.

Untuk SD bagi rakyat jelata pribumi dikenal Sekolah Kelas Dua dari kelas IV sampai kelas V sebagai kelanjutan Sekolah Desa (*Volkschool*) dengan bahasa pengantar bahasa Melayu dan tulisan Latin. Untuk sekolah bagi anak pribumi dari keluarga priayi disediakan Sekolah Dasar HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) yang lama belajarnya tujuh tahun dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sedangkan sekolah untuk kaum penjajah dan anak-anak keturunan Eropa lainnya disediakan ELS (*Europesche Lagere School*). Hanya sebagai segelintir kecil anak-anak pribumi dari kelompok keluarga priayi yang boleh masuk ELS.

Untuk pendidikan tingkat SMP dan SMA dibedakan pula berdasarkan strata sosial. Sekolah untuk anak-anak priayi pribumi disediakan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Sekolah setingkat SMA disediakan AMS (*Algemeine Midle School*).

Sedangkan untuk sekolah menengah bagi anak-anak Belanda dan Eropa disediakan sekolah HBS (*Hogere Burger School*) sebagai kelanjutan dari ELS.

Sejak zaman pendudukan Jepang diversifikasi persekolahan menurut strata sosial dihapus dan sejak proklamasi kemerdekaan, Pemerintah menetapkan satu sistem pendidikan nasional yaitu SR (Sekolah Rakyat atau Sekolah Rendah) SMP/SGB/ST,

SMA/SMK/Sekolah Guru. Sampai tahun 1975 kurikulum sistem persekolahan ditentukan oleh instansi yang mengelola sekolah Sejak proklamasi sampai tahun 1968 kita mengenal kurikulum sebagai berikut :

Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968/69. Struktur dan materi kurikulum pada periode tersebut di SD dan SMP tidak banyak mengalami perubahan kecuali pada kurikulum mata pelajaran Kewarganegaraan dan Sejarah yang diperbaharui karena perubahan politik, seperti masuknya Manipol Usdek dalam kurikulum 1964. Sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan dan diubahnya materi Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Baru (Kurikulum 1968) menjadi Pendidikan Moral Pancasila. Pada kurikulum 1968/1969 di tingkat SMA terjadi perubahan penjurusan dan struktur kurikulum antara tahun 1950, 1964 dan 1968/1968. Apakah latarbelakang perubahan tersebut?.

Jawabnya sukar ditemukan karena sampai dekade ke-7 abad ke-20 hampir tidak ada analisis dan studi yang menyoroti masalah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Sampai akhir dekade ke 6 abad ke 20 walaupun kurikulum berubah tetapi mata pelajaran terutama pada tingkat SMA hampir tidak ada perubahan tentang buku pelajaran baik Botani, Aljabar dan Sejarah Dunia. Sehingga buku-buku tersebut dapat diwariskan kepada adik-adik dan generasi berikutnya. Perlu dicatat bahwa sampai dengan tahun 1960-an tujuan pendidikan nasional seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 1954, dan pada era Demokrasi Terpimpin dalam penetapan Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tujuan pendidikan nasional adalah “membentuk manusia Indonesia yang susila dan cakap serta bertanggung jawab”. Adapun dalam era Demokrasi Terpimpin tekanannya pada pembentukan manusia Pancasila dan manusia sosialis Indonesia. Seberapa jauh tujuan tersebut secara terencana diupayakan tercapainya melalui kurikulum? Tidak ada studi yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri,SH adalah Menteri Pendidikan dalam sejarah pendidikan Indonesia yang banyak melakukan perubahan (inovasi) . Berbagai perubahan yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Diubahnya ujian Negara menjadi ujian sekolah;
2. Pembaruan materi pelajaran seperti diperkenalkannya Matematika Modern dan Modern Science yang berdampak pada penulisan buku pelajaran baru; dan
3. Dilaksanakannya evaluasi nasional pendidikan secara komprehensif (*Education National Assessment*).

Mulai periode Menteri Mashuri pembaruan pendidikan ditempuh melalui pendekatan penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan program tersebut di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dibentuklah Badan Pengembangan Pendidikan (BPP) yang terdiri dari :

1. Sekretariat Badan
2. Lembaga Pengembangan Kurikulum
3. Lembaga Pengembangan Guru dan tenaga Teknis
4. Lembaga Pengembangan Alat-alat Pendidikan
5. Lembaga Pengembangan Fasilitas Pendidikan
6. Lembaga Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
7. Lembaga Pengembangan Perpustakaan Pendidikan.

(lihat Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 1969 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Kemudian nama lembaga tersebut disederhanakan menjadi :

1. Sekraetariat Badan
2. Lembaga Pengembangan Media Pendidikan
- 3. Lembaga Pengembangan Kurikulum**
4. Lembaga Inovasi dan Evaluasi Pendidikan
5. Lembaga Pengembangan Informasi dan Statistik Pendidikan
6. Lembaga Penelitian Pendidikan.

Badan Pengembangan Pendidikan (BPP) dipimpin oleh Dr. Kartomo seorang ekonom (dosen Universitas Indonesia), Sedangkan Lembaga Pengembangan Kurikulum pertama kali dipimpin oleh Dr. Soepardjo Adikoesoemo (alm) seorang

geograf lulusan universitas di Jerman. Tugas utama sebagai fokus yang dilakukan oleh BPP dibawah pimpinan Dr. Kartomo adalah melakukan asesmen pendidikan (*education assessment*). Diantara berbagai tim yang dibentuk untuk melaksanakan asesmen pendidikan adalah Tim Sistem Analisis.

Tim analisis ini terdiri dari tiga Cluster diantaranya adalah Cluster II yang dipimpin oleh Drs.Soedijarto,M.A. (lulusan University of California) yang tugasnya adalah melakukan identifikasi tujuan-tujuan pendidikan. Sejak Orde Baru walaupun Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tidak pernah dicabut berlakunya, tetapi tujuan pendidikan nasional rumusannya sampai tahun 1989, tidak tercantum dalam Undang-Undang, melainkan dalam Ketetapan MPR RI.

Pada saat Cluster II melakukan identifikasi tujuan-tujuan pendidikan nasional, TAP MPR yang menggariskan tujuan pendidikan nasional adalah TAP MPRS No. XXVII/66 yang tertulis sebagai berikut :

“ Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945 (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966 “

Cluster II Sistem Analisis keanggotaannya meliputi unsur-unsur yang mewakili Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Soetjipto), Pendidikan Kejuruan (Suradjiman), Pendidikan Dasar (Anwar Jasin), Sekretariat Jenderal (Wardojo), BPKB Jayagiri (Maman Suherman), Badan Pengembangan Pendidikan (Thamrin Gunardi), Angkatan Udara (Mayor I.B. Arnawa), Angkatan Laut (Mayor Tonny Hartono), Kepolisian (Mayor Sukarno Shinduputro). Sebagai Ketua Tim adalah Soedijarto (BPP).

Dalam melaksanakan fungsinya Cluster II Sistem Analisis didukung oleh para ahli dari Amerika Serikat antara lain :

1. Dr. Vincent Campbell (Stanford University)
2. Dr. Frank Womer (University of Michigan)

3. Dr. Daryl D. Nichols (American Institute for Research)

4. Dr. Ralph Tyler (University of Chicago).

Berangkat dari latarbelakang ini selanjutnya secara berturut-turut akan diuraikan dan diulas kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dari periode :

1974 -1981 1981-1988 1988 - 1994 dan 1994 - 2004.

BAB I
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM 1974-1981

Pada bulan Maret 1973, dalam Kabinet Pembangunan II Menteri Mashuri, yang merintis berbagai pembaharuan seperti ditiadakannya ujian sekolah, diperkenalkannya Matematika Modern, diperkenalkannya ide Sekolah Pembangunan “Comprehensive High School”, dan ditetapkannya pendekatan penelitian dan pengembangan dalam pembaharuan pendidikan nasional, diganti oleh Prof. DR. IR. Soemantri Brodjonegoro.

Menteri Prof. DR. IR. Soemantri Brodjonegoro yang wafat bulan Desember 1973, dalam waktu yang singkat menegaskan pentingnya pendekatan penelitian dan pengembangan yang maknanya adalah inovasi baru dalam pendidikan, seperti ide sekolah pembangunan, sebelum diterapkan secara nasional perlu dilakukan uji coba melalui pilot projek yang secara cermat harus dinilai terus menerus. Karena itu ide Sekolah Pembangunan tidak jadi diterapkan secara nasional melainkan perlu diuji cobakan terlebih dahulu. Pada bulan Januari 1974 dengan wafatnya Prof. DR. IR. Soemantri Brodjonegoro, Presiden Soeharto mengangkat Letjen TNI DR. T. Syarif Thayeb menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bersamaan dengan itu BPP dirubah namanya menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (BP3K) dan Lembaga-Lembaga yang ada didalamnya dirubah namanya menjadi Pusat. Lembaga Pengembangan Kurikulum berubah menjadi Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan (Pusbangkuradik). Apa yang dilakukan Pusbangkuradik dari 1974-1981, bagian-bagian berikut akan menguraikannya.

A. KURIKULUM 1975, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGANNYA

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/10/1975 didirikan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan yang bertugas :

1. Merumuskan prinsip penyempurnaan dan pengembangan kurikulum, prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
2. Menetapkan program dan kegiatan pengembangan kurikulum, prasarana dan sarana serta menetapkan persyaratan yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan kurikulum, prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
3. Mengikuti dan mengamankan penyelenggaraan dan pengembangan semua
4. kegiatan serta unit-unit perencanaan dan penyusunan Kurikulum dan sarana
5. pendidikan dan kebudayaan dalam lingkungan Departemen;
6. Menilai semua kegiatan perencanaan, penyusunan dan pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan dan kebudayaan baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh unit-unit lainnya dalam lingkungan Departemen.

Unit kerja di dalam lingkungan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Bidang Tata Usaha;
2. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Sarana Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa ;
3. Bidang Pengembangan Kurikulum Sarana Sekolah Lanjutan ;
4. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Guru dan Perguruan Tinggi.

Kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum yang dilakukan Pusat Pengembangan Kurikulum sejak berdirinya pada tahun 1974, hakekatnya merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Cluster II yang dimulai tahun 1971, yang diteruskan oleh satuan Tugas Pengembangan Pendidikan. Ketua Cluster II, Sekretaris Satgas (Ketua Satgas adalah Yusuf Hadi Miarso, M.Si, Sekarang Prof.DR.) selanjutnya diangkat menjadi Kepala Pusbangkuradik

(selanjutnya dalam tulisan ini disingkat Puskur). Dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum Puskur, menggunakan pendekatan rasional atau selanjutnya di kenal Pendekatan Berorientasi Kepada Tujuan. Berangkat dari Tujuan-tujuan pendidikan yang diidentifikasi oleh Cluster II Puskur selanjutnya merencanakan Kurikulum 1975 untuk TK, SD, SMP dan SMA, yang meliputi Struktur Program dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran.

Dalam merencanakan struktur program kurikulum yang meliputi pengelompokan program kurikulum, perbandingan bobot antara bidang studi (nama pengganti mata pelajaran) untuk setiap jenjang, dan penataurutan penyajian program studi dari tahun pertama sampai tahun terakhir (untuk SD kelas I sampai Kelas VI, untuk SLTP dari kelas I sampai kelas III, dan untuk Sekolah Menengah dari Kelas I sampai kelas III), Puskur berangkat dari Prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Fleksibilitas Program

Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan, misalnya harus mengingat faktor-faktor ekosistem dan kemampuan untuk menyediakan fasilitas bagi berlangsungnya program tersebut.

2. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Waktu sekolah adalah sebagian kecil dari waktu kehidupan murid yang berlangsung selama 24 jam. Dari duapuluh empat jam tersebut hanya sekitar enam jam mereka ada di sekolah. Karena itu kalau waktu yang terbatas ini tidak kita manfaatkan bagi kegiatan-kegiatan yang seterusnya dilakukan para murid di luar lingkungan hubungan murid guru dan fasilitas pendidikan, berarti akan terjadi pemborosan yang merupakan gejala inefisiensi. Sering kita melihat bahwa waktu dua jam pelajaran digunakan mencatat pelajaran yang mungkin dapat dilakukan oleh murid di luar jam sekolah memperbanyak bahan tersebut, kalau di toko buku bahan yang tidak ada.

Cara memanfaatkan waktu seperti kami kemukakan di atas adalah bentukinefisiensi penggunaan waktu; Efisiensi tidak hanya menyangkut penggunaan waktu secara tepat, melainkan juga menyangkut masalah pendayagunaan tenaga secara optimal.

Kami beranggapan, bahwa tenaga manusia tidak dimanfaatkan secara optimal kalau dia harus belajar dan bekerja tanpa minat dan perhatian yang penuh. Murid-murid adalah manusia-manusia yang mengenal kelelahan dan batas perhatian. Kalau kita memaksakan murid untuk belajar di luar perhatian dan kemampuan tenaganya, akan berakibat penghamburan tenaga dan waktu. Karena itu di dalam menetapkan jumlah jam dan lamanya setiap pelajaran yang diberikan, harus diukur dari sudut tingkat kemampuan, tenaga, luas dan lama perhatian yang diharapkan dari seorang murid. Melupakan kedua prinsip efisiensi tersebut akan mengakibatkan hasil belajar anak kurang memuaskan. Dengan kata lain proses belajar yang dilakukan murid tidak berjalan secara efisien dan efektif.

Atas dasar prinsip efisiensi dan efektivitas inilah kurikulum 1975 memilih jumlah jam pelajaran selama seminggu 36 jam dan 42 jam, karena pertimbangan bahwa para murid dapat dituntut untuk bekerja lebih keras pada setiap jam yang tersedia, dengan tetap memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih santai pada saat-saat tertentu. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan belajar yang sifatnya wajib dan akademis ditekankan pada hari Senin sampai dengan Jumat sedangkan kegiatan-kegiatan pada hari Sabtu sifatnya pilihan wajib, ekspresif dan rekreatif.

Atas dasar prinsip ini juga disarankan agar setiap pelajaran hendaknya tidak diberikan dalam 1 jam pelajaran saja untuk satu minggu, melainkan antara 2 jam dan sebanyak-banyaknya 3 jam pada setiap pertemuan. Sistem catur wulan masih tetap digunakan tetapi dengan suatu pengertian yang akan menuntut guru secara sistematis dan berencana mengatur kegiatan-kegiatan mengajar dalam satuan-satuan catur wulan secara bulat. Bentuk usaha yang dilaksanakan adalah agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh murid dan guru bagi kegiatan belajar mengajar yang efisien dan efektif. Prinsip ini juga akan mempengaruhi penyusunan jadwal pelajaran setiap minggunya.

3. Prinsip Berorientasi dan Tujuan

Seperti telah kami singgung diatas waktu para murid berada dalam lingkungan sekolah hanyalah sekitar seperempat dari waktu yang dimiliki anak selama 24 jam. Ini berarti bahwa proses perkembangan murid ke arah kedewasaannya tidak dapat sepenuhnya digantungkan kepada sekolah semata-mata. Namun demikian kami menyadari bahwa sekolah adalah tempat yang paling strategis untuk pembinaan nilai dan sikap, keterampilan dan kecerdasan yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Atas dasar pertimbangan di atas waktu yang terbatas tersebut harus benar-benar dimanfaatkan bagi pembinaan murid untuk hal-hal tersebut di atas, terutama untuk kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang tidak mungkin dilakukan dan diperoleh di luar sekolah. Dalam konteks yang demikian kami melihat kenyataan bahwa bahan-bahan pelajaran tiap tahun makin bertambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan masyarakat. Karena itu memilih kegiatan-kegiatan dan pengalaman-pengalaman belajar yang fungsional dan efektif akan memerlukan kriteria yang jelas. Untuk itulah kami menggunakan suatu prinsip kerja atau pendekatan dengan berorientasi pada tujuan. Ini berarti bahwa sebelum menentukan jam dan bahan pelajaran terlebih dahulu akan ditetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh para murid dengan jalan mempelajari sesuatu bidang pelajaran (studi). Proses identifikasi dan perumusan tujuan ini berlangsung dari tingkatan yang paling umum, seperti tertulis dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam bentuk tujuan-tujuan institusional, sampai kepada tujuan-tujuan instruksional khusus yang akan memberi arah kepada pemilihan bahan dan kegiatan belajar untuk setiap satuan pelajaran yang terkecil. Dengan prinsip ini dimaksudkan agar setiap jam dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh murid dan guru benar-benar terarah kepada tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.

4. Prinsip Kontinuitas

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (Pertama dan Atas) adalah sekolah-sekolah umum, yang masing-masing fungsinya dinyatakan dalam tujuan-tujuan institusionil. Namun satu dengan yang lain berhubungan secara hirarkis. Karena itu dalam menyusun kurikulum, ketiga sekolah tersebut selalu diingatkan hubungan hirarkis yang fungsional Pendidikan Dasar disusun agar lulusannya, disamping siap untuk berkembang menjadi anggota masyarakat, juga siap untuk mengikuti Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, demikian juga dengan Sekolah Menengah Tingkat Pertama di samping memiliki bekal keterampilan untuk memasuki masyarakat kerja, juga harus siap memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Hubungan fungsional hirarkis ini, harus diingat dalam menyusun program-program pengajaran dari ketiga sekolah tersebut. Kalau tidak, dapat terjadi pengulangan yang membosankan atau pemberian pelajaran yang sukar ditangkap dan dikunyah oleh para murid karena mereka tidak memiliki dasar yang kokoh.

Bagi suatu bidang pelajaran yang menganut pendekatan spiral, seperti pelajaran sejarah atau kewarganegaraan, perluasan dan pendalaman sesuatu pokok bahasan dari tingkat pendidikan satu ke tingkat berikutnya harus disusun secara berencana dan sistematis. Garis-garis besar program pengajaran yang disusun untuk setiap bidang studi dikerjakan secara integral dengan maksud agar jelas perbedaan antara pokok bahasan, yang kelihatannya sama, yang diberikan di SD dengan di SMP. Para pelaksana (terutama guru) diharapkan untuk memahami hubungan yang fungsional hirarkis antara pelajaran yang diberikan di SD dengan SMP, antara caturwulan dengan caturwulan berikutnya, dan bahkan antara satuan pelajaran untuk satu bulan dengan bulan berikutnya. Pelaksanaan prinsip ini mengharuskan kita untuk memahami hubungan secara hirarkis antara satuan-satuan pelajaran.

4. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menganut pendidikan prinsip pendidikan seumur hidup. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Prinsip ini mengandung makna, bahwa masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan berlangsung sepanjang hidup. Namun demikian kita menyadari bahwa sekolah adalah tempat dan saat yang sangat strategis, bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina generasi muda dalam menghadapi masa depannya.

Adapun tujuan-tujuan Institusional yang akan dicapai adalah :

1. Tujuan –Tujuan SMP

a. Umum

Setelah menyelesaikan di SMP Sisea diharapkan:

- Menjadi warga Negara yang baik sebagai manusia yang utuh, sehat kuat lahir dan batin.
- menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari Pendidikan di Sekolah dasar.
- memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke Sekolah Lanjutan Atas dan untuk terjun ke masyarakat dengan menempuh:
 - program umum yang bagi semua siswa.
 - program-program akademis yang sama bagi semua siswa.
 - program-program keterampilan pra-vokasionil yang wajib di pilih oleh siswa sesuai dengan minat dan bakatnya serta kebutuhan masyarakat.

b. Khusus

Setelah menempuh pendidikan di SMP, para siswa diharapkan :

Di Bidang Pengetahuan :

- Memiliki pengetahuan tentang agama dan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Memiliki pengetahuan yang fungsional tentang fakta-fakta dan kejadian-kejadian penting yang aktual terutama yang bersifat lokal, regional, dan nasional.
- Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kenegaraan dan pemerintah sesuai dengan UUD 1945.
- Menguasai pengetahuan dasar di bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- Memiliki pengetahuan berbagai bidang pekerjaan tingkat menengah yang ada di masyarakat.
- Memiliki pengetahuan elementer tentang berbagai unsur kebudayaan dan tradisi nasional.
- Memiliki pengetahuan dasar tentang kependudukan, kesejahteraan keluarga, dan kesehatan.

Di Bidang Keterampilan :

- Menguasai cara-cara belajar dengan baik.
- Memiliki keterampilan memecahkan masalah sederhana dengan sistematis.
- Memiliki keterampilan membaca/memahami isi bacaan sederhana yang berguna baginya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- Memiliki keterampilan mengadakan komunikasi sosial secara lisan dan tulisan.
- Memiliki keterampilan dan kebiasaan berolahraga.
- Memiliki keterampilan dalam sekurang-kurangnya satu cabang kesenian.
- Memiliki keterampilan dalam segi kesejahteraan keluarga dan usaha kesehatan.
- Memiliki keterampilan sederhana dalam bidang kepemimpinan. Memiliki kemampuan sekurang-kurangnya satu jenis

keterampilan pra-vokasionil sesuai dengan minat dan bakatnya serta kebutuhan lingkungannya.

Bidang nilai dan Sikap:

- Menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya, serta menghormati ajaran-ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang lain.
- Memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan dan masyarakat.
- Percaya pada diri sendiri dan bersikap makarya.
- Mencintai sesama manusia, bangsa dan lingkungan sekitarnya.
- Memiliki minat dan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan
- Memiliki sikap demokratis dan tenggang rasa.
- Berdisiplin dan patuh pada peraturan yang berlaku secara
- Memiliki inisiatif, daya kreatif, sikap kritis, rasionil dan obyektif dalam memecahkan persoalan.
- Memiliki sikap hemat tetapi produktif.
- Memiliki minat dan sikap yang positif dan konstruktif terhadap olah raga dan hidup sehat.
- Dapat mengapresiasi kebudayaan dan tradisi nasional.
- Menghargai setiap jenis pekerjaan dan prestasi kerja masyarakat tanpa memandang tinggi dan rendahnya nilai sosial/ekonomis masing-masing jenis pekerjaan.

2. Adapun Tujuan-Tujuan Pendidikan SMA adalah:

Tujuan Umum Pendidikan SMA adalah agar lulusan :

- Menjadi warga negara yang baik sebagai manusia yang utuh, sehat, kuat lahir dan batin.
- Menguasai hasil-hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- Memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi dengan menempuh:

- Program umum yang sama bagi semua siswa program pilihan bagi mereka yang mempersiapkan dirinya untuk studi di lembaga pendidikan yang lebih tinggi.
- Memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan mengambil keterampilan untuk bekerja yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minatnya dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan Khusus Pendidikan SMA adalah agar lulusan :

- Di Bidang pengetahuan :
- Memiliki pengetahuan tentang agama dan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan undang –undang Dasar 1945.
- Memiliki pengetahuan yang fungsional tentang fakta dan kejadian penting aktual, baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
- Menguasai pengetahuan dasar dalam bidang matematika, Ilmu pengetahuan Alam, Ilmu pengetahuan sosial, dan Bahasa (Khusus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) serta menguasai pengetahuan yang cukup lanjut dalam satu atau beberapa dari bidang pengetahuan tersebut diatas.
- Memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis dan jenjang pekerjaan
- Memiliki pengetahuan tentang berbagai unsure kebudayaan dan tradisi nasional.
- Memiliki pengetahuan dasar tentang kependudukan, kesejahteraan keluarga dan kesehatan.

Di Bidang Keterampilan :

- Menguasai cara belajar yang baik.
- Memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan sistematis.
- Mampu membaca/memahami isi bacaan yang agak lanjut dalam bahasa
- Indonesia dan bacaan sederhana dalam bahasa Inggris yang berguna baginya.

- Memiliki keterampilan mengadakan komunikasi sosial dengan orang lain lisan maupun tulisan dan keterampilan mengekspresi diri sendiri.
- Memiliki keterampilan olah raga dan kebiasaan olah raga.
- Memiliki keterampilan sekurang-kurangnya dalam satu cabang kesenian.
- Memiliki keterampilan dalam segi kesejahteraan keluarga dan segi
- Memiliki keterampilan dalam bidang administrasi dan kepemimpinan. Menguasai sekurang-kurangnya satu jenis keterampilan untuk bekerja sesuai dengan minat dan kebutuhan lingkungan.

Di Bidang Nilai dan Sikap:

- Menerima dan melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- Menerima dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya, serta menghormati ajaran agama dan kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang lain.
- Mencintai sesama manusia, bangsa dan lingkungan sekitarnya.
- Memiliki sikap demokratis dan tenggang rasa.
- Memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan dan masyarakat.
- Dapat mengapresiasi kebudayaan dan tradisi nasional.
- Percaya pada diri sendiri dan bersikap makarya.
- Memiliki minat dan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan.
- Memiliki kesadaran akan disiplin dan patuh pada peraturan yang berlaku, Bebas dan jujur.
- Memiliki inisiatif, daya kreatif, sikap kritis, rasional dan obyektif dalam memecahkan persoalan.
- Memiliki sikap hemat dan produktif.
- Memiliki minat dan sikap yang positif dan konstruktif terhadap olahragadan hidup sehat
- Menghargai setiap jenis pekerjaan dan prestasi kerja di masyarakat tanpa memandang tinggi rendahnya nilai sosial-ekonomi masing-

masing jenis pekerjaan tersebut dan berjiwa pengabdian kepada masyarakat

- Memiliki kesadaran menghargai waktu.

Dalam merencanakan Struktur Program Kurikulum, khususnya menentukan perbandingan bobot antar Bidang Studi, Puskur menggunakan model “ Value Contribution Technique” yaitu memperbandingkan fungsi dan perbandingan sumbangan yang diberikan oleh mempelajari suatu bidang studi dalam mencapai tujuan pendidikan yang harus dicapai. Dalam pada itu bidang studi dikelompokkan sesuai dengan fungsinya yaitu Pendidikan Umum, Akademik, dan Keterampilan. Selanjutnya rentang penyajiannya diterapkan dari tahun pertama sampai tahun akhir suatu jenjang.

Hasilnya adalah Struktur program kurikulum SD, SMP, dan SMA 1975 seperti tertera berikut :

Struktur Program Kurikulum SMP.

Program Pendidikan	No.	Bidang Studi	Kelas					
			I		II		III	
			1	2	3	4	5	6
Pendidikan Umum	1.	Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2
	2.	Olah Raga Kesehatan	3	3	3	3	3	3
	3.	Pendidikan Kesenian	2	2	2	2	2	2
Pendidikan Akademis	4.	Bahasa Indonesia	5	5	5	5	5	5
	5.	Bahasa Daerah	(2)	(2)	(2)	(2)	-	-
	6.	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4
	7.	Ilmu Penget. Sosial	6	6	6	6	6	6
	8.	Matematika	5	5	5	5	5	5
Pendidikan Keterampilan	9.	Ilmu Penget. Alam	4	4	4	4	4	4
	10.	Pilihan terikat	6	-	6	-	6	-
	11.	Pilihan bebas	-	6	-	6	-	6
Jumlah jam pelajaran per-minggu			37	37	37	37	37	37
			(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)

Struktur Program Kurikulum SMA.

Program	Bidang Studi	Masa Orientasi	JURUSAN				IPA					IPS					BAHASA					
			KELAS				I	II		III		I	II		III		I	II		III		
			SEMESTER				2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
Pendidikan Umum	Pend. Agama	2					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Pend. Moral Pancasila	2					2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	
	Olahraga/ Kesehatan	2					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Pend. Kesenian	2					2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	
Pendidikan Akademis	Matematika	6	Wajib	Metematika			6	6	53	53	53	33	333	33	34	24	26	26	26	-	-	
	Bah. Indonesia	5		Bah. Indonesia			4	3	3	3	3	4		3	3	3	5	6	6	77	7	
	Bah. Inggris	4		Bah. Inggris			4	3													7	
	Ilmu Penget. Alam	7		IPA	IPS	BHS																
	Ilmu Penget. Sosial	7	Mayor	Fisika	TB/HD	Bah. Asing	2	3	3	4	4	4	4	4	6	6	2	2	2	4	4	
				Kimia	Ekonomi/Kop	Sejarah	2	3	3	4	4	2	4	4	4	4	-	-	-	5	5	
				Biologi	Sejarah.	Geografi/Antr	2	2	3	4	4	4	3	3	-	-	3	2	2	-	-	
				Geografi	Bah. Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	2	-	-	
	Minor		Mengg	Menggambar	Menggam																	

			(Pilih-an)	ambar Bumi antarik sa Bhs. Asing	IPA Bhs. Asing	bar IPS Ekon/ Kop	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pendidikan	-		Pilihan pra vokasionil				4	43	43	-7	-7	43	43	43	-7	-7	43	43	43	-7	-
Keterampilan	-		Pilihan Penunjang				3														7
	37		Jam/ Minggu				37	37	37	36	36	37	37	37	36	36	37	37	37	36	
	9		Jumlah Mata Pelajaran				36	13	13	10	10	13	13	13	10	10	13	13	13	10	
							10														

Kegiatan Perencanaan Struktur Kurikulum ini ditempuh melalui tiga tahap; (1) Tahap perancangan oleh suatu Tim yang terdiri dari Ahli Pendidikan suatu jenjang pendidikan, Ahli Ilmu Pengetahuan sumber bahan ajar suatu bidang studi, Ahli pendidikan suatu bidang studi, dan Ahli perencanaan kurikulum dan teori belajar, termasuk psikologi pendidikan; (2) Tahap “sanctioning” suatu tahap untuk mereview hasil kegiatan tahap pertama oleh para guru, dan pengelola sekolah setiap jenjang dan para ahli; (3) Tahap finalisasi yaitu mengolah masukan dari tahap “sanctioning” untuk menyempurnakan rancangan tahap I; (4) mengajukan hasil perencanaan untuk disahkan oleh pengambil keputusan; dan (5) Pengesahan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan ditetapkannya Struktur Program Kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan diketahuilah bobot (jumlah jam pelajaran) setiap bidang studi. Berangkat dari ketetapan tentang bobot setiap bidang studi kegiatan selanjutnya adalah penyusunan garis – garis program pembelajaran per bidang studi (GBPP) untuk setiap jenjang pendidikan.

Untuk merencanakan GBPP, Pusat Kurikulum membentuk Tim Pengembang Kurikulum Bidang Studi, setiap Tim untuk setiap bidang terdiri dari Ahli Ilmu Pengetahuan sumber bahan ajar, Ahli Pendidikan suatu bidang studi, dan Ahli pendidikan khususnya ahli pengembangan kurikulum dan psikologi pendidikan / teori belajar. Karena itu ada tim : (1) Pendidikan Agama; (2) Pendidikan Kewarganegaraan (semula Studi Sosial) kemudian menjadi Pendidikan Moral Pancasila; (3) Tim bidang studi Bahasa INDONESIA ; (4) Tim bidang studi Bahasa Inggris; (5) Tim bidang studi Matematika; (6) Tim bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial; (7) Tim bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam; (8) Tim bidang studi Kesenian (Musik, Tari, Senirupa); (9) Tim bidang studi Olahraga dan Kesehatan.

Masing – masing Tim tersebut merencanakan Garis Besar Program Pembelajaran untuk setiap bidang studi yang meliputi; (1) Identifikasi dan penetapan tujuan – tujuan pendidikan setiap bidang studi; (2) Memilih pokok – pokok bahan ajar dari disiplin ilmu terkait; (3) Menetapkan urutan penyajian

pokok bahasan dipandang dari “*Logical squence*” dan “*Psychological squence*” tingkat kesukaran dilihat dari kemampuan dasar kongitif peserta didik.

Hasil kerja dari delapan tim ini adalah GBPP bidang studi untuk ketiga jenjang sekolah (SD, SMP, SMA). Draf ini selanjutnya diajukan dalam Lokakarya “sanctioning” yang diikuti para ahli baik Ahli disiplin ilmu maupun Ahli pendidikan bidang studi dan para guru berpengalaman. Hasil dari kegiatan “Sanctioning” ini selanjutnya diusulkan kepada pimpinan Departemen untuk diberlakukan sebagai Kurikulum 1975 untuk SD, SMP, SMA, dan juga dengan mekanisme yang sama disusun kurikulum SMK (sekolah menengah kejuruan) 1976, dan kurikulum Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Gambaran proses perencanaan dan pengembangan kurikulum yang dituliskan di atas menunjukkan bahwa Puskur dalam melaksanakan tugasnya didukung para ahli dari berbagai perguruan tinggi, yaitu ITB (untuk Matematika dan IPA), dengan tokohnya seperti Prof. Dr. Mudomo, Prof. Dr. B. Soeprpto, Prof. Dr. Haryadi Supangkat, Universitas Indonesia (untuk Ilmu Pengetahuan Sosial dengan tokoh utamanya Prof. DR. H. W. Bachtiar) untuk psikologi pendidikan dan teori belajar DR. Saparina Sadli, DR. Utami Aris Munandar, DR. Yaumil Akhir, dan DR. Lola Aswin, IPB dengan tokoh utamanya Prof. DR. Andi hakim Nasution, Universitas Gajah Mada dengan tokohnya seperti Prof. Gembong dan Prof. Suhakso, IKIP Jakarta dengan tokohnya DR. Conny R. Semiawan, Prof. DR. Nababan dan Prof. Soedjiran, IKIP Bandung dengan tokohnya Prof. Nu'man Sumantri, DR. Achmad Hinduan, DR. Ratna Wilis, IKIP Malang dengan tokohnya DR. Zaini Mahmud, IKIP Surabaya dengan tokohnya Drs. Data Wardana, IKIP Semarang dengan tokohnya DR. Retmono, IKIP Yogyakarta dengan tokohnya Drs. Vembriarto, Prof. Imam Bernadib dan Prof. DR. Sukardjo, IKIP Ujung Pandang dengan tokohnya DR. Soli Abimanyu. Pada periode (1974 – 1981) Tim dari Puskur antara lain adalah; R. Ibrahim (Prof. DR.), Rochman Natawijaya (Prof. DR), Lexy C. Moleong (Prof. DR), A.F. Tangyong, Pangeman, Z. Kawareh, Waini Rasidin (Prof.

DR.), Benny Karyadi, Darlis Machmud, Sudjadi, Sigit Harjito dan Wahyudi dengan dibantu konsultan asing seperti Cecil Creelin (Inggris), Beverly

Young dari Brithis Council, Prof. Dr. R. Murray Thomas dari Universitas California Prof. Dr. H. Postelthwhite dari Universitas Hamburg, Dr. Wyn Harlen dan HughHawes, Roy Gardner, dan Sheldon Sheaffer dari The Ford Foundation.

Untuk menjamin agar kurikulum 1975 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan serangkaian pedoman penerapan kurikulum dikembangkan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memasyarakatkan Program Pengembang Sistem Instruksional (PPSI), suatu model pengembangan kurikulum yang harus dilakukan guru dalam menterjemahkan kurikulum menjadi program belajar mengajar untuk diikuti peserta didik. Dengan menerapkan PPSI, guru sebelum memilih proses pembelajaran suatu pokok bahasan harus merencanakan program pembelajaran dalam bentuk satuan pelajaran yang langkahnya meliputi :

- (1) Merumuskan tujuan instruksional yang harus dicapai.
- (2) Menguraikan materi pembelajaran yang harus dipelajari.
- (3) Memilih dan menetapkan sumber – sumber belajar.
- (4) Merancang media belajar yang harus disiapkan.
- (5) Menetapkan proses pembelajaran yang harus diikuti peserta didik.
- (6) Menyusun alat evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan.

Agar model ini dapat dilaksanakan, dengan dukungan Direktorat Pendidikan Dasar, Direktorat Pendidikan Menengah, serangkaian penataran guru dilaksanakan.

Demikianlah sekilas gambaran kegiatan Puskur dalam merancang dan melaksanakan kurikulum 1975. Berangkat dari pendekatan penelitian dan pengembangan Kurikulum 1975 yang tanpa uji coba langsung diterapkan, dipandang sebagai kurikulum transisional. Untuk menghasilkan kurikulum yang mantap yang telah diuji cobakan, Puskur mendapat tugas untuk menyelenggarakan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), bagaimana PPSP dirancang dan dilaksanakan? Bagian berikut akan membahasnya.

B. PROYEK PERINTIS SEKOLAH PEMBANGUNAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111/10/1974 tentang Landasan, Tujuan, Strategi Proses dan Pembaharuan Pendidikan, Puskur merencanakan dan mengelola PPSP.

Untuk melaksanakan program pengembangan sistem Sekolah Pembangunan, Puskur bekerjasama dengan delapan IKIP di Indonesia, yaitu IKIP Padang, yang terdiri dari Dr. Sutan Zanti Arbi, M.A (alm Prof), Drs. Prayitno (Dr. Prof), Dra. Fatimah Enar; IKIP Jakarta terdiri dari Drs. Bistok Siahaan (alm Dr. Prof), Drs. Santosa Murwani (Dr. Prof), Drs. Muchsin Lubis, M.Sc, Drs. Sulchan Hasyim; IKIP Bandung terdiri dari Dra. Ratna Wilis Dahar (alm Dr. Prof), M.Sc, Drs. Nu'man Sumantri M.Sc (prof), Drs. Abdul Khodir, M, Sc (alm Prof), Drs. Soendjojo, Drs. Ahmad Hinduan, M.Sc (Dr. Prof), Drs. Wahyudin (Dr. Prof); IKIP Semarang yang terdiri dari Drs. Retmono, M.A (Dr. Prof), Drs. Sarjono, Suyono, B.A., Drs. Suhartono (alm); IKIP Yogyakarta terdiri dari Drs. ST. Vembriarto (alm Dr. Prof), Drs. Hirdjan, Dra. Suharsimi Arikunto (Dr. Prof), Drs. Sukardjo (Dr. Prof); IKIP Surabaya terdiri dari Drs. Slamet Dayono, Drs. Datta Wardhana, Drs. Iskandar (Dr. Prof), Drs. Slamet; IKIP Malang terdiri dari Dr. Zaini Machmud (Prof), Drs. M. Ikhsan; dan IKIP Ujung Pandang terdiri dari Drs. Soli Abimanyu, Drs. Syamsu Mappa. Masing – masing IKIP mengelola perintisan Sekolah Pembangunan yang meliputi SD, SMP, dan SMA. Kegiatan yang dikordinasikan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum bekerjasama dengan delapan IKIP ini disebut Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP).

Tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional dan kurikulum yang dibebankan pencapaiannya oleh kurikulum sekolah dalam PPSP sama dengan yang dibebankan kepada kurikulum 1975. Demikian pula dengan pendekatannya tetapi berbeda dengan kurikulum 1975 pada PPSP juga dicobakan konsep “*Master Learning*” dan “*Continuous Progres*” yang dikenal dengan “Maju berkelanjutan”.

Berbeda dengan penerapan kurikulum 1975, PPSI yang diterapkan kelangsungannya sepenuhnya dibebankan kepada guru, dalam sistem PPSP, dengan tekanan pada belajar sendiri dan “Maju berkelanjutan”, bahan untuk memungkinkan peserta didik dapat belajar sendiri disiapkan dalam bentuk “Modul” yaitu bahan belajar yang disiapkan secara lengkap persatuan pelajaran. Untuk keperluan ini Puskur menugaskan Tim Bidang Studi untuk merancang dan menulis modul. Dengan bantuan UNESCO dan USAID Puskur mengirim para anggota Tim Bidang Studi untuk belajar menulis modul di University of California (UC), Santa Barbara, USA. Di UC, Santa Barbara dengan di pimpin Prof. DR. R. Murray Thomas dari Graduate School of Education. Tim penulis modul belajar selama satu “quarter”

Adapun model-model pengelolaan dalam penyelenggaraan PPSP sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Puskur sebagai Unit Pelaksana BP3K bertugas:

1. Melakukan koordinasi dalam menyusun rencana dan program pembaharuan pendidikan.
2. Melakukan koordinasi penyusunan program evaluasi dari pada percobaan – percobaan yang dilakukan oleh Proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan.
3. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap percobaan- percobaan penelitian serta penilaian yang dilakukan oleh Proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan.
4. Memproses dan menganalisa hasil-hasil percobaan yang telah dinilai kemantapannya serta meneruskannya menjadi usul kebijaksanaan.
5. Bersama-sama dengan kesatuan pelaksanaan menyusun dan mempersiapkan penyebaran hasil-hasil percobaan kedalam sistim pendidikan.
6. Memonitor proses penyebaran hasil-hasil percobaan.

Sedangkan peranan PPSP yang secara ex-officio dipimpin oleh rektor IKIP bertugas:

1. 1. Bersama-sama/di bawah koordinasi Badan Pengembangan Pendidikan menyusun rencana dan program percobaan-percobaan.
2. Melaksanakan percobaan-percobaan dan penelitian terhadap pola atau metode yang
3. Telah ditetapkan dalam master disain.
4. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil percobaan yang dilaksanakannya.
5. Menjadi tempat untuk melatih para guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam rangka
6. persiapan penyebaran hasil-hasil percobaan yang telah dinilai matap.
7. 4. Bersama-sama dibawah koordinasi Badan Pengembangan Pendidikan melakukan monitoring terhadap proses difusi dari pada hasil-hasil percobaannya ke dalam sistim
8. Pendidikan.

Dalam pelaksanaannya Puskur BP3K secara periodik, setiap tahun menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi masalah

Setelah berjalan empat tahun, pada tahun 1978 setelah para siswa SD, SMP, dan SMA dirancang Evaluasi secara komprehensif yang dilakukan oleh Tim Nasional dengan dukungan para ahli dari University of Chicago Dr. Don Holzinger dan dari Harvard University, dengan Drs. Nuhri Nasution, M.A sebagai koordinator.

Pada tahun 1981 hasil Evaluasi diolah dan dilaporkan Puskur, Sistem PPSP lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Tetapi pada era Menteri Prof. DR. Nugroho Notosusanto dengan pertimbangan mahalny biaya yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem itu, Sistem PPSP dengan prinsip maju berkelanjutan belajar tuntas dengan menggunakan modul: tidak dilanjutkan dan tidak diterapkan secara nasional

C. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI BANTUAN PROFESIONAL BAGI GURU-GURU SEKOLAH DASAR

Di samping merancang dan mengusulkan penetapan Kurikulum 1975 sebagai kurikulum transasional dan melaksanakan PPSP, Pusat Pengembangan Kurikulum melaksanakan proyek percontohan **Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Bantuan Profesional bagi Guru Guru Sekolah Dasar** yang dikenal sebagai **PROYEK CIANJUR (1980 -1986)**

Latar Belakang

Kemajuan pengembangan pendidikan di Indonesia selama PELITA I sangat mengesankan terutama dalam pemerataan pendidikan. Sejalan dengan peningkatan kuantitatif, peningkatan secara kualitatif dilakukan dengan Pengembangan Kurikulum 1975, pengembangan buku pelajaran, penyediaan alat pengajaran dan penataran ribuan guru sekolah dasar. Walaupun demikian pengalaman dan penelitian di lapangan (“indepth study”) **Aria Jalil dan Christin Mangindaan, 1979** menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Pada umumnya situasi belajar mengajar di kelas tetap sama seperti dulu dan para guru nampaknya tidak berusaha mengubah perannya seperti tuntutan kurikulum meskipun telah mengikuti berbagai penataran.

Sebagai tindak lanjut hasil penelitian tsb pada tanggal 3 - 4 April 1979 BP3K menyelenggarakan **Seminar mengenai Supervisi dan Mutu Pendidikan Dasar di Hotel USSU, Cisarua Bogor**. Seminar dipimpin oleh Kepala Pusat Kurikulum, Drs Soedijarto MA, dengan konsultan British Concil H.W.R Hawes, Education Officer British Council B.L. Young. Peserta seminar antara lain wakil wakil dari Direktorat Pendidikan Dasar, Direktorat Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Guru, Proyek P 3 D, beberapa wakil IKIP, dan BP3K

Hasil analisis para pakar pendidikan dalam seminar tsb adalah: Dua diantara factor- faktor yang menyebabkan tidak terjadinya perubahan yang nyata pada kegiatan belajar mengajar di kelas kemungkinan adalah: 1) Penataran yang di

maksudkan untuk menyiapkan para guru untuk melaksanakan kurikulum kurang efektif. 2) Sistem supervisi yang berlaku kurang mendukung usaha pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan

Seminar membuat rekomendasi agar dikembangkan suatu model sistem pembinaan profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemampuan guru dan pembina di lapangan.

PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL CIANJUR

Sesuai dengan rekomendasi seminar, Pusat Pembangan Kurikulum, BP3K dengan bantuan konsultan dari British Council menyelenggarakan kegiatan penelitian tindakan (“Action Project”) **Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar** melalui **Bantuan Profesional kepada Guru di Kabupaten Cianjur Jawa Barat**. Uji coba tsb dilandasi oleh Keputusan Bersama Kepala BP3K dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No 1897/G3/I/80 dan No 087/C Kep/80 tanggal 31 Mei tahun 1980.

Tujuan Umum

Pengembangan Proyek Cianjur secara umum bertujuan untuk menemukungkan berbagai cara untuk meningkatkan mutu pengajaran melalui peningkatan mutu pembinaan professional bagi guru serta pelaksana lainnya di lapangan

Pelaksanaan Kegiatan Cianjur

Pengembangan model/percontohan dilaksanakan di Kota Cianjur (daerah perkotaan)

Kecamatan Cugenang (daerah pedesaan) dan Kecamatan Pagelaran (daerah terpencil), dengan kegiatan awal mencakup 75 SD.

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan mencakup pengembangan: **model penataran, model supervisi/bantuan profesional, dan model belajar mengajar “Cara Belajar**

Siswa Aktif’ (CBSA) . Istilah CBSA pertama kali diperkenalkan sebagai wacana oleh proyek **P3G** (1979)

Model penataran

Untuk mengatasi kelangkaan “ekspertis” metodologi pendidikan dasar, Pusat Pengembangan Kurikulum dengan bantuan konsultan British Council dari London University, Institute of Education (ULIE) melaksanakan serangkaian penataran untuk para guru SD, Kepala Sekolah dan Penilik Sekolah.

Agar tidak mengulangi kelemahan hasil penataran ribuan guru seperti di masa lalu, penataran di Cianjur dilaksanakan dengan pendekatan dan cara yang berbeda sbb:

Penataran dilakukan berdasarkan kebutuhan setempat, tidak dirancang secara nasional dan sama untuk semua daerah. Menerapkan participatory secara optimal, dengan melibatkan wakil peserta sejak tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan penataran sampai evaluasi hasil penataran.

Sesuai dengan hasil berbagai penelitian mengenai daya retensi (Experince Cone, Sheal, Peter R, 1989) penataran menekankan pada pengalaman praktis (90%) dengan sedikit teori sebagai pengantar (10%) Ratio antara penatar dan peserta dalam penataran- penataran sebelumnya 1 : 100-120 dengan akibat kegiatan peserta lebih banyak mendengarkan ceramah, diubah menjadi 1 : 20-30 dan peserta bisa lebih banyak melakukan diskusi untuk membahas isu isu penting serta melaksanakan kegiatan yang lebih produktif.

Peserta penataran (.guru, Kepala Sekolah, Penilik Sekolah dan staf Dikdas Kecamatan)

mendapatkan materi pelatihan yang sama terutama mengenai CBSA. Setiap peserta memilih salah satu mata pelajaran untuk diikuti dari awal sampai akhir. Semua peserta penataran harus terlibat secara aktif dalam semua kegiatan, termasuk simulasi dan praktik mengajar. Peserta yang sama akan mendapat penataran yang lebih mendalam pada tahun-tahun berikutnya (3 tahun)

Salah satu ciri khas penataran Cianjur adalah menggunakan sistem “bedol desa” bukan azas pemerataan seperti banyak pelatihan sebelumnya. Dalam bedol desa

atau bedol sekolah, semua guru dari sekolah yang terpilih mengikuti penataran bersama Kepala Sekolah dan Penilik Sekolah wilayah tsb. Dengan bedol desa, “critical mass” yang diperlukan untuk melaksanakan pembaharuan mudah dilakukan. Ciri khas yang lain adalah pemilihan tutor dan kehadiran tutor. Para calon tutor yang terseleksi sudah mendapat bekal pelatihan di tingkat nasional atau bahkan mengikuti short course di Inggris. Dalam penataran semua tutor harus hadir mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi hasil penataran.

Model Pembinaan Profesional

Bantuan professional kepada guru untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan dalam keadaan “vacuum” tanpa isi. Oleh karena itu bantuan professional sangat terkait dengan “better practice” pembelajaran seperti dua sisi dari satu koin

Salah satu isu utama dalam pengembangan sistem bantuan profesional adalah perubahan sikap dan perilaku baik bagi pembina maupun guru dalam hubungan kerja professional. Hubungan antara Penilik ---Kepala Sekolah---guru tidak lagi seperti hubungan antara atasan dan bawahan, melainkan menjadi hubungan kolegial. Perubahan perilaku antara lain merupakan dampak dari sistem penataran “bedol desa”

Dalam pengembangan model bantuan professional guru tidak hanya menjadi objek dalam supervisi. Guru bisa berperan aktif dalam memberikan bantuan profesioanl kepada guru lain. Guru yang sudah mendapat penataran dapat menjadi nara sumber untuk guru guru dari sekolah lain. Guru senior dapat memberikan bimbingan kepada guru baru. Guru yang mempunyai keahlian dalam matematik dapat memberikan bantuan kepada guru yang memerlukan bantuan. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Motto “Silih Asih, Silih Asah dan Silih Asuh” benar benar dilaksanakan secara efektif di lingkungan sekolah mau pun antar sekolah (Gugus)

Pembinaan professional **dalam lingkungan sekolah** dilakukan melalui berbagai cara:

Observasi kelas. Kepala Sekolah/Penilik Sekolah/guru senior mengobservasi kegiatan belajar mengajar di kelas dan kemudian melakukan diskusi dengan guru mengenai kelebihan dan kekurangan kegiatan belajar mengajar tsb

Rapat Guru. Di masa lalu, rapat guru biasanya hanya membahas masalah administratif kelas/sekolah diubah menjadi rapat profesional unuk membahas permasalahan teknis belajar-mengajar. Rapat guru yang biasanya selalu dipimpin oleh Kepala Sekolah dapat dipimpin oleh salah seorang guru

Pembinaan professional **antar sekolah** dilakukan dengan melalui berbagai wadah kelompok kerja sbb: **KKG, KKS, KKPS.** dan **Pusat Kegiatan Guru** (Teacher Centre)

Kelompok Kerja Guru (KKG)

Kelompok Kerja Guru dikembangkan segera setelah penataran berakhir. Beberapa sekolah yang berdekatan membentuk Gugus Sekolah (terdiri dari 3 – 8 sekolah) Jumlah sekolah dalam gugus ditentukan sendiri oleh para guru berdasarkan letak geografis dan kemudahan transportasi. Di dalam gugus sekolah ada **1 SD Inti** (semua guru dan kepala sekolahnya sudah mengikuti penataaran) dan beberapa **SD Imbas.** Guru yang sudah terlatih dalam salah satu mata pelajaran (BI, IPA, IPS, Matematik dan guru kelas awal, menjadi **Pemandu** Mata Pelajaran dalam gugus sekolah. Ketua KKG (guru atau KS) dipilih oleh para anggota KKG. Program kerja dan jadwal pertemuan KKG ditentukan oleh para guru dan kepala sekolah.. Fungsi KKG antara lain adalah: tempat penularan hasil penataran, menemukan dan memecahkan masalah kegiatan belajar mengajar, menghasilkan produk tertentu (Rencana jangka menengah dan jangka panjang, Satpel, lembar kerja, alat peraga, penilaian dsb)

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)

Kelompok Kerja Kepala Sekolah biasanya sangat terkait dengan KKG. Pertemuan pertemuan KKG sering dihadiri oleh para kepala sekolah. Setelah itu

mereka mengadakan pertemuan sendiri untuk mendiskusikan bagaimana cara memberikan bantuan profesional pada waktu guru memerlukannya. Para kepala sekolah membantu menemukan dan menghubungi nara sumber (Kepala Desa, KUD, Dinas Pertanian dsb) bagi gugus sekolah, Program KKKS bervariasi dari satu gugus ke gugus lain.

Kelompok Kerja Penilik Sekolah (KKPS)

Kelompok Kerja Penilik Sekolah diadakan di tingkat kecamatan atau kabupaten. Program kerja KKPS menyangkut masalah administrative/Dinas maupun professional. Dalam pertemuan KKPS mereka antara lain saling bertukar informasi mengenai kegiatan KKG dalam wilayah binaan mereka. Para penilik terlibat aktif mengatur kunjungan ke sekolah, identifikasi guru yang baik, pertukaran pemandu /nara sumber, program magang Kadang kadang para Penilik juga melakukan pembinaan silang (antar wilayah binaan), 2 atau lebih Penilik bertukar wilayah binaan selama beberapa hari. Tujuan pembinaan silang adalah pemerataan mutu karena setiap penilik memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pusat Kegiatan Guru (PKG)

Pusat Kegiatan Guru diadakan di tingkat kabupaten, lokasinya biasanya di dekat SD terbaik/ Kantor Dinas Pendidikan. PKG antara lain berfungsi: meningkatkan kemampuan professional guru melalui penataran lokal, memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan di KKG, menyebarkan gagasan baru, sebagai pusat sumber belajar dan bengkel kerja.

Dampak positif Kelompok Kerja:

Pertemuan pertemuan Kelompok Kerja menimbulkan semangat kebersamaan , rasa ikut memiliki dan rasa aman. Guru merasa bangga, dipercaya unuk berperan dan memberikan kontribusi dalam proses perubahan/peningkatan mutu. Para guru menjadi lebih terbuka terhadap pembaharuan dan menerima saran/kritik dari guru lain atau pembina setempat

Beberapa Kelemahan Kelompok Kerja

Pertemuan-pertemuan antar sesama guru dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan kejenuhan (“in breeding”) karena gagasan baru dan permasalahan sudah “tergali habis”.

Untuk mengatasi kejenuhan tsb diperlukan “injeksi” dari luar. Permasalahannya adalah dari mana dan siapa yang bisa memberikan amunisi baru. Barangkali IKIP/Perguruan tinggi terdekat (yang mempunyai keahlian dalam metodologi pendidikan dasar) bisa mengembangkan program khusus dan berperan dalam memberikan bantuan yang diperlukan.

MODEL PEMBELAJARAN SISWA AKTIF

Mengapa Siswa Aktif?

Perkembangan IPTEK di dunia modern semakin lama semakin cepat. Dulu diperlukan beberapa abad sebelum ilmu pengetahuan berkembang menjadi 2 x lipat. Sekarang ini beberapa cabang ilmu seperti computer dan nano teknologi berkembang 2 x lipat dalam waktu kurang dari 5 tahun. Tentu saja guru tidak bisa lagi menjadi satu satunya sumber belajar bagi siswa. Kata Mendikbud siswa perlu diberi bekal kail, bukan ikan.

Pendekatan Belajar aktif bukan sesuatu yang baru. Dasar pikiran yang dianut adalah bahwa belajar akan bermanfaat bila diperoleh melalui pengalaman langsung oleh anak sendiri atau kegiatan belajar mengajar yang menuntut siswa harus aktif dalam proses pendidikan. Pandangan ini dianut oleh para ahli filsafat, ahli pendidikan, serta psikologi perkembangan antara lain Whiehead, 1932, Dewey, 1938, Piaget, 1968, Brunner 1968,

Pepatah Cina 2 ribu tahun y.l. juga mengatakan “Saya dengar ...saya lupa dst”

Peranan belajar mengajar bergeser dari “teacher centered” ke “student centered” (Brandest, Ginnis,1988). Pendekatan Sistem Pembinaan Profesional-CBSA (SPP-CBSA) sangat relevan dengan pendekatan”systemic” (Romizwski,1984) yang selama ini telah dianut dalam perkembangan kurikulum di Indonesia.

Prinsip Belajar aktif

Belajar aktif bukan semata mata aktif secara fisik, tetapi lebih menekankan kepada mental yang aktif, berpikir aktif, berfikir kritis dan mampu memecahkan masalah.

Prinsip dasar yang dianut dalam pendekatan belajar aktif:

1. Mengerti tujuan dan fungsi belajar. Para guru memahami konsep dasar belajar: Buku pelajaran baru merupakan salah satu sumber belajar. Pengalaman siswa, lingkungan merupakan bahan kajian dan sumber belajar yang berharga.
- 2 Melayani perbedaan individual, minat dan kemampuan khusus siswa seta membantu kesulitan dalam belajar
- 3 Memanfaatkan berbagai organisasi kelas sesuai dengan kegiatan belajar mengajar yang diinginkan (belajar mandiri/perorangan, berpasangan, kelompok kecil dan kelompok besar/klasikal)
- 4 Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis dan memecahkan masalah secara mandiri atau kelompok
- 5 Ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang baik (pajangan hasil karya anak, peta, diagram, model, perpustakaan kelas)
- 6 Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar (alam, sosial, budaya)
- 7 Umpan balik untuk meningkatkan kegiatan belajar

Hasil Belajar Siswa Aktif

Hasil belajar siswa aktif tidak dapat segera terlihat misalnya dengan meningkatnya nilai (NEM) hasil ujian pada akhir tahun. Menurut hasil “longitudinal study” di Inggris, dampak siswa aktif mulai terlihat 15 -20 tahun kemudian. Salah seorang konsultan Pusat Pengujian, pakar evaluasi dari Cambridge University mengatakan “Orang orang kadang terlalu terobsesi dengan skor hasil tes. Kalau Anda yakin bahwa proses pembelajarannya lebih baik, kalian harus percaya bahwa hasilnya juga akan lebih baik.”

Secara umum menurut pengamatan para guru, hasil belajar aktif terlihat dalam perubahan perilaku siswa antara lain : anak lebih berani dan terampil bertanya, lebih mandiri dalam belajar, bisa bekerja sama , mampu mencari dan

menggunakan informasi, menemukan dan memecahkan masalah, lebih produktif, kreatif dan mampu berpikir kritis, serta lebih siap menghadapi perubahan.

Evaluasi;

Pada tahun 1984 diadakan evaluasi eksternal dengan Kabupaten Purwakarta sebagai pembanding. Tim Evaluasi terdiri dari unsur-unsur: Kandep Dikbud Kabupaten Cianjur, Dikdasmen, IKIP, (Bandung, Yogya, Malang, Surabaya), Perguruan Tinggi (FISIP UI, Universitas Terbuka), PPSP, PUSLIT, PUSISJIAN, dan PUSBUK.

Kesimpulan Ealuasi:

- 1) Pelayanan professional yang telah diujicobakan di Cianjur dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari meningkatnya mekanisme supervisi yang terjadi, yakni penitiberatan aspek educatif dengan keserangan yang cukup tinggi
- 2) Sebagai akibat dari meningkatnya sistem pembinaan dalam aspek edukatif, meningkat pulalah kemampuan guru dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya PKG, KKG, KKKS, KKPS maka jalinan antar sekolah nampak kompak dan erat. Keseragaman umum yang sangat positif terlihat jelas dalam hal kesadaran untuk mencapai tujuan pelajaran, merumuskan tujuan, memilih bahan pelajaran dari hasil pemanfaatan lingkungan, mengelola kelas dalam kegiatan kelompok, serta menggunakan metode mengajar yang merangsang keaktifan siswa
- 3) Sikap para pelaksana di Cianjur dapat dikatakan cukup berubah. Sikap guru yang biasanya “takut” kepada Penilik dan Kepala Sekolah berubah seperti dalam lingkungan kekerabatan

Berlandaskan teuan dan kesimpulan Tim Evaluasi, Direktur Pendidikan Dasar pada tahun 1984 memutuskan Proyek Cianjur untuk disebarluaskan secara nasional, dimulai dengan melaksanakan penyebaran terbatas

Diseminasi/Replikasi:

- o Kabupaten Sidoardjo (JATIM)
- o NTB (Atas permintaan Gubernur)

- Kabupaten Maros, (SULSEL)
- Kabupaten Binjai (SUMUT)
- Lampung
- Tanah Laut (KALSEL)
- Banyak daerah lain/sekolah mengajukan permintaan tetapi belum bisa dipenuhi karena sangat terbatasnya anggaran & tenaga
- Banyak pula daerah/sekolah yang melaksanakan CBSA atas inisiatif sendiri setelah melakukan kunjungan singkat ke Cianjur atau daerah replikasi lain (Dampak negatif: terjadi “bush fire” dan “salah kaprah” seperti kurang memahami bermacam cara pengelolaan kelas dan perbedaan antara kerja kelompok dengan duduk berkelompok.)

Diseminasi yang lebih luas dilakukan melalui penyusunan proposal “Blue Book” ke Negara Negara donor. Proposal tsb di “approved “oleh Bank Dunia, menjadi **Proyek PEQIP** , dan dikelola oleh Direktorat Pendidikan Dasar

Penyebaran ke Negara lain:

Proyek Cianjur beberapa kali dilaporkan sebagai “Country Report” Indonesia dalam pertemuan Regional Unesco di Bangkok, Manila, Seoul , dan Penang Malaysia. Akibatnya banyak negara yang tertarik dan melakukan study visit ke Cianjur, antara lain

Tim dari Malaysia (Pejabat Senior), Nepal (9 orang Staff Ahli Kementerian Pendidikan)

dan Kongo (Menteri Pendidikan)

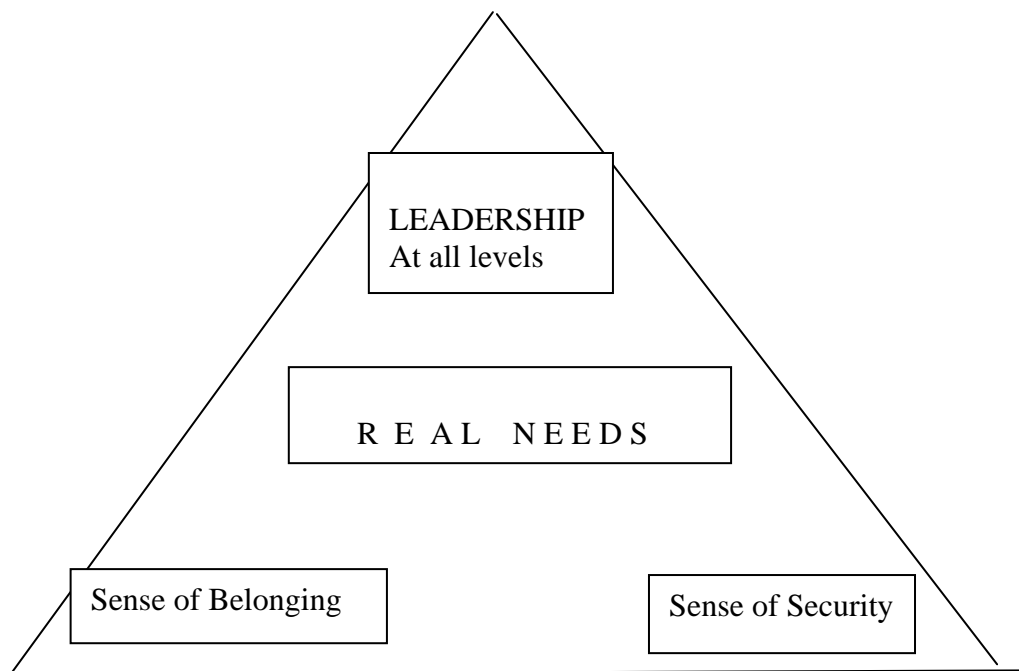
Adopsi oleh Negara lain:

Active Learning diadopsi oleh Negara Bagian Andrapradesh, India dengan menggunakan para konsultan British Council (sejak 1985) dengan melibatkan 60.000 orang guru.

Active Learning juga mempengaruhi program KBSR di Malaysia

SEMINAR INTERNASIONAL IMTECH, BALI 1986

- Dihadiri 80 orang pakar pendidikan dari 20 negara.
- Studi kasus: Proyek PKG dan CBSA
- Menurut **Fulan Report**, inovasi pendidikan di berbagai negara sebagian besar gagal.
- Sebagian kecil berhasil pada tahap perintisan,
- Yang berhasil pada tahap perintisan dan diseminasi sangat langka, antara lain Proyek CBSA Cianjur
- Menurut **Per Dalin** dan analisa para pakar dalam seminar: Proyek Cianjur berhasil karena memenuhi persyaratan “segi tiga pengaman” sbb:



Real Needs:

- Tidak mudah untuk mengetahui kebutuhan sesungguhnya para guru
- Kalau kita tanyakan kepada ybs pun sering tidak tahu (Perlu alat, biaya dst)
- Sering pendapat mengenai kebutuhan guru dari para administrator/pengambil keputusan (tingkat nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan), pembina lapangan(PS, KS), dan guru sangat berbeda beda satu dengan yang lain

- Demikian pula persepsi tentang “mutu”, “PBM yang baik” “Guru yang Baik” “Pembina yang baik”dst
- Dalam suatu pelatihan sekelompok guru diminta mendiskusikan kriteria guru yang baik. Hasilnya (7 item). Pertanyaan yang sama diajukan kepada anak Kelas 2 SD (23 item), dan anak Kelas 5 (17 item)

Sense of Belonging

- Sebagian besar proyek inovasi gagal karena tidak berhasil membangkitkan sense of belonging.
- Sense of belonging di Cianjur muncul antara lain karena participatory dilaksanakan sejak awal (perencanaan) sampai akhir
- Para guru merasa bukan sekedar obyek pelaku. Mereka merasa diberi peran aktif,
- diberi kepercayaan, dan ikut bertanggung jawab.
- Motto “Silih asih, silih asah dan silih asuh”, “ Tidak ada rasa sakit hati” “Menemukan masalah dan mencari alternative solusi” benar benar dihayati dan dilaksanakan oleh ratusan guru dan pembina

Sense of Security

- Rasa aman timbul antara lain karena “bedo desa / sekolah”
- Semua guru, kepala sekolah, pengawas, pembina mendapat pelatihan yang sama.
- Guru berani menerapkan gagasan baru, karena direstui atasan langsung, dan mendapat bantuan pada waktu menemui kesulitan.
- Peningkatan mutu dilakukan sedikit demi sedikit agar tidak menakutkan guru.
- Mereka merasa masih mampu menerapkan gagasan baru
- Ibarat menyeberang jalan, kalau sendirian orang daerah takut, berdua lebih berani, kalau rame rame hilang rasa takut.

Leadership

- Ada kepemimpinan (formal/tidak formal) di semua tingkat

- (tingkat sekolah, gugus, kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat)
- Masa kritis terjadi pada waktu ada pergantian pimpinan karena belum tentu alih tongkat berjalan lancar.
- Sekolah yang semula menerapkan active learning dengan baik akan menemui kesulitan kalau KS yang baru tidak mendukung (karena tidak tahu, tidak acuh, berbeda pendapat, memarahi guru yang melaksanakan inovasi dsb)
- Demikian pula kalau pengawas baru tidak mendukung, atau bahkan melarang
- Krisis yang terberat terjadi di Cianjur dan daerah replikasi lain pada waktu Direktur Dikdas yang baru mencoba membabat habis active learning dengan menyebutnya sebagai “ajaran sesat “ dan menegur para pelaksana CBSA di depan publik. Ironisnya Direktur Dikdas yang digantikannya sangat mendukung active learning dan memutuskan perlunya penyebaran secara nasional.
- Dampak hujatan di lapangan bermacam macam, guru yang yakin nilai positif siswa aktif tidak terpengaruh sama sekali dan tetap melaksanakannya; guru yang belum begitu yakin mempunyai alasan untuk kembali ke cara lama.

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 1981 – 1988

A. Latar belakang Kurikulum 1981 - 1984

Kurikulum 1984 dikembangkan sebagai penyempurnaan kurikulum 1975 berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama adalah adanya perubahan dalam kebijakan politik dengan ditetapkan TAP MPR nomor II/MPR/1983 dimana dinyatakan perlunya adanya Pendidikan Sejahtera Perjuangan Bangsa sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Secara operasional TAP MPR tersebut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 0461/U/1983 tertanggal 22 Oktober 1983. Yang menyatakan perlunya perbaikan kurikulum. Kedua adalah hasil penilaian kurikulum 1975 antara tahun 1979 sd 1981 yang juga mencakup perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan yang cepat dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ilmu dan teknologi menghendaki adanya penyempurnaan kurikulum. Ketiga adalah hasil-hasil yang dicapai oleh Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (1973 – 1984), hasil studi kognitif, keberhasilan perintisan Bantuan Profesional Kepada Guru yang menekankan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (1978 – 1990) dan hasil penelitian (1979 – 1986) dan pengembangan Ketrampilan Proses (1980 – 1984). Pengembangan kurikulum 1984 juga didasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam TAP MPR nomor IV/MPR/1978 dan dan nomor II/MPR/1983 yaitu “Pendidikan Nasional berdasarkan azas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Untuk mengetahui bagaimana pengembangan kurikulum 1984 dilaksanakan, maka berikut ini akan dijelaskan tentang model perencanaan dan pengembangan

kurikulum 1981 - 1988, kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum 1981 – 1988, dan proses perencanaan dan pengembangan kurikulum 1984.

B. Model perencanaan dan pengembangan kurikulum 1981 -1988

Sejak tahun 1980 masyarakat dan dunia pendidikan Indonesia telah menyadari perlunya ada perubahan-perubahan dalam kurikulum yang sedang berjalan.

Karena itu, Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan (Pusbangkurrandik), Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan beberapa inovasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mengarah pada pendekatan, metode dan strategi belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

a. Model pengembangan kesinambungan (Continuous Development Model)

Model perencanaan kurikulum yang dianut oleh kurikulum 1975 yaitu melalui (1) pemetaan atau pengkajian tujuan kurikuler dan tujuan instruksional umum serta lingkup materi kurikulum 1975/1976/1977 PAUD, SD/SLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB DAN SMK. (2) pengembangan kurikulum dengan pendekatan Program Pengembangan Sistem Instruksional.

Dengan model ini, Pusbangkurrandik berupaya untuk melakukan penjembitan apa yang ada pada masa lampau, apa yang ada pada masa kini dan apa yang seharusnya ada pada masa yang akan datang. Pemikiran ini sangat penting dalam menerapkan konsep *continuous quality improvement* yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat serta seni budaya.

b. Model kemasyarakatan (Societal Model)

Model perencanaan dan pengembangan kurikulum 1984 ini menganut faham kurikulum dinamis, artinya selalu dapat mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat di lingkungan tempat sekolah itu berada. Perencanaan kurikulum selalu harus memperhatikan tuntutan masyarakat dan bangsa Indonesia, karena sekolah adalah bagian dari

masyarakat. Misalnya tuntutan perlunya penyesuaian dengan atau pemasokan budaya daerah dan pembangunan daerah serta perlunya meningkatkan semangat kebangsaan.

Mengingat bahwa masyarakat Indonesia juga merupakan bagian dari masyarakat duna maka dalam merencanakan kurikulum kita selalu harus mengikuti kecenderungan pendidikan di dunia.

c. *Model Kemitraan (Partnership Model)*

Selain kedua model yang dipaparkan di atas, setiap perencanaan dan pengembangan kurikulum 1984 harus tetap didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang berlaku. Khususnya kurikulum 1984 perencanaan dan pengembangannya harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 461/U/1983 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1983. Mengingat jenis dan jenjang pendidikan dan perlunya pengembang mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan bidang studinya maka Pusbangkurrandik . Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyadari perlunya kerjasama yang saling menguntungkan (kemitraan) dengan instansi-instansi pendidikan dan instansi-instansi yang berkepentingan yang memiliki keahlian dan kepakaran dalam bidang tertentu. Selain itu dalam pengembangan kurikulum perlu dimintakan partisipasi dari para *stake holders*. Untuk maksud tersebut sebelum melangkah ke pelaksanaan pengembangan Kurikulum 1984, Pusbangkurrandik melaksanakan berbagai pertemuan dan seminar dengan instansi-instansi terkait untuk men-satu bahasakan model dan cara pengembangan kurikulum 1984 yang akan ditempuh.

C. Kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum 1981 - 1988

Kegiatan perencanaan dilakukan dengan mempelajari secara cermat Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN yang menyatakan bahwa sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang.

Salah satu unsur GBHN 1983 yang belum tercantum dalam kurikulum 1975/1976/1977, adalah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dalam rangka Pendidikan Pancasila yang terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran nasional sebagai satu bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merangsang kemampuan kreatif dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan serta membina kepribadian bangsa melalui proses integrasi dan internalisasi jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 461/U/1983 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan jawaban terhadap ketetapan MPR no. II/MPR/1983.

a. Paradigma Pengembangan Kurikulum

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada waktu itu sudah dirasakan berlangsung sangat cepat akibatnya masyarakat juga telah berubah dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada tahun 1975 dimana kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional dikembangkan dan diberlakukan. Karena itu paradigma baru dalam pengembangan kurikulum perlu diciptakan.

- (1) Pendidikan nilai dengan perilaku yang sesuai perlu diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran.
- (2) Kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
- (3) Tekanan pendidikan perlu diberikan kepada pengembangan kepribadian individu yang mampu berpikir dan beraktivitas secara independen dan juga yang dapat melayani masyarakat sebagai tujuan utama dari pengembangan dirinya.
- (4) Apa yang diperoleh di sekolah perlu dapat diaplikasikan bagi kepentingan dirinya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, tidak hanya untuk jangka waktu pendek tetapi juga untuk jangka waktu yang

panjang. Karena itu, perlu diseleksi tujuan yang ingin dicapai, materi yang relevan dengan kebutuhan dan masalah individu secara khusus dan lingkungan serta masyarakat secara umum, pendekatan serta metoda pembelajaran.

b. Penelaahan Hasil Penelitian

Atas dasar pemikiran tersebut maka dalam perencanaan pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dilakukan penelaahan terhadap proses dan hasil perintisan yang dilakukan telah dilakukan antara lain pengembangan Sekolah Pembangunan, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) yang dilakukan di 8 IKIP Negeri, peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar melalui proyek supervisi pendidikan (supervision support) yang lebih terkenal dengan nama Cara Belajar Siswa Aktif, Perintisan Pendekatan Keterampilan Poses, dan Belajar Tuntas (*Mastery Learning*).

Pada waktu itu juga Pusbangkurrandik telah menyadari bahwa sebagaimana baiknya suatu kurikulum, bila pelaksanaan pembelajaran masih berpusat pada guru dan peserta didik diperlukan sebagai objek atau pandangan bahwa tugas guru adalah mentransfer pengetahuan kepada peserta didiknya dan mengadakan evaluasi sesuai dengan apa yang telah diajarkan, maka peningkatan mutu pendidikan tidak akan terjadi. Pembinaan guru oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah perlu dilakukan sejalan dengan gagasan kurikulum 1984. Ini harus disadari oleh semua pembina pendidikan dan sumber daya manusia di sekolah. Maksud utama disusunnya suatu kurikulum pendidikan dasar dan menengah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Suatu hasil pendidikan dapat dianggap tinggi mutunya apabila kemampuan, pengetahuan dan, sikap yang dimiliki para lulusan berguna bagi perkembangan diri selanjutnyabagi lulusan yang melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, dan bagi lulusan yang terjun ke dunia masyarakatai kerja sedangkan mutu itu sendiri"baru mungkin

kita capai apabila proses belajar yang kita selenggarakan di kelas benar-benar efektif dan fungsional bagi pencapaian kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang dimaksud.

Di dalam kurikulum kemampuan (kecerdasan dan ketrampilan), pengetahuan, dan sikap serta keterampilan dan psikomotor dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum ini mengenal berbagai tingkatan tujuan pendidikan: tujuan institusional (tujuan yang secara umum harus dicapai oleh keseluruhan program sekolah tersebut), tujuan kurikuler (tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada program sesuatu bidang pelajaran), dan tujuan instruksional (tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada suatu program pengajaran sesuatu mata pelajaran).

D. Kurikulum 1984, proses perencanaan dan pengembangannya

a. Proses Perencanaan

1) Evaluasi Kurikulum.

Kurikulum merupakan salah satu wahana utama untuk digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sejalan dengan arah kebijakan dalam pendidikan yang tercantum dalam GBHN 1983 maka perlu dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang berlaku, yaitu kurikulum 1975/1976/1977.

Pada tahun 1981 Pusbangkurrantik mengadakan kegiatan evaluasi dilakukan untuk mendeteksi kelebihan dan kekurangan serta permasalahan sebenarnya di sekolah. Dari hasil deteksi tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum dari semua jenis dan jenjang pendidikan yang telah berjalan 9 tahun perlu mengalami penyesuaian dan penyempurnaan. Selain Ketetapan MPR no. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, hasil-hasil perintisan yang disebutkan dalam bagian 2 perlu dijadikan dasar pengembangan

kurikulum 1984. Atas dasar itu dikembangkan struktur program kurikulum 1984.

2) Evaluasi Hasil Penelitian

Evaluasi hasil perintisan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) menunjukkan bahwa hasil belajar siswa baik dipandang dari sudut perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor ternyata baik. Demikian pula pada penerapan sistem maju berkelanjutan dengan dasar perbedaan kemampuan peserta didik (*individual differences*), waktu belajar di Sekolah Dasar ternyata dapat dipersingkat dari 6 tahun menjadi 5 tahun, dan bagi peserta didik yang cerdas tingkat SMP dan SMA secara total dapat diselesaikan dalam 5 tahun. Dipandang dari kemampuan guru penggunaan modul (*self contained module*) dapat meniadakan atau banyak mengurangi kesalahan konsep dan memudahkan guru dalam melayani perbedaan individu belajar. Tetapi dipandang dari sudut administrasi pendidikan ternyata sulit dilakukan bila didesiminasikan ke sekolah-sekolah lain. Demikian pula dengan bahan pembelajaran menggunakan modul berdampak pada biaya pendidikan yang cukup mahal.

Evaluasi hasil perintisan CBSA di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sidoarjo (Jatim), Kabupaten Maros (Sulsel), Kabupaten Binjai (Sumut), Mataram (NTB) dan Keterampilan Proses IPA Sekolah Dasar di Kabupaten Cianjur dan Kota Madya Bandung menunjukkan perlunya materi kurikulum untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan diseleksi sehingga diperoleh konsep-konsep yang esensial guna mewujudkan kegiatan belajar-mengajar yang berpusat pada peserta didik..

b. Kurikulum 1984

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1983 tentang perbaikan kurikulum Pendidikan Dasar dan

Menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dibawah pimpinan Prof. DR. Conny Semiawan sesuai dengan tugasnya mengadakan perbaikan kurikulum yang hasilnya disebut dengan Kurikulum 1984 TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SPG/LB dan SMK baik yang setingkat dengan tingkat SMP maupun yang setingkat dengan tingkat SMA. Perbaikan terhadap kurikulum mencakup:

- 1) Peninjauan kembali secara menyeluruh kurikulum yang berlaku melalui pendekatan pengembangan dengan bertitik tolak pada:
 - a) Pilihan kemampuan dasar, baik pengetahuan maupun keterampilan yang perlu dikuasai dalam pembentukan kemampuan dan watak peserta didik.
 - b) Keterpaduan dan keserasian antara matra kognitif, afektif dan psikomotorik.
 - c) Penyesuaian tujuan dan struktur kurikulum dengan perkembangan masyarakat, pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai bidang/program yang berdiri sendiri, dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas, termasuk Pendidikan Luar Sekolah.
- 3) Pengadaan program studi baru yang merupakan usaha memenuhi kebutuhan perkembangan di lapangan kerja.

Salah satu prinsip pengembangan kurikulum 1984 adalah prinsip dekonsentrasi yang mempunyai arti adanya pembagian kewenangan dalam pengembangan kurikulum antara Pusat dan Daerah. Kewenangan daerah dalam hal ini terutama terletak pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat dan lapangan kerja di daerah. Untuk maksud ini maka Staf Bidang Dikdas dan Dikmenum, Kanwil Depdikbud memerlukan koordinasi/kerjasama dengan Kantor Depdikbud tingkat Kabupaten dan atau Tingkat Kecamatan, Instansi lain yang terkait, misalnya Kanwil Depnaker, KADIN, dan Perusahaan,

Pemerintah Daerah antara lain Gubernur, Walikota/Bupati, khususnya BAPPEDA.

Upaya perbaikan kurikulum melalui pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dalam arti hasil perbaikan kurikulum biarpun dilaksanakan pada tahun 1984/1985, tetapi upaya pemantapan tetap perlu diadakan secara terus menerus. Dengan perbaikan kurikulum yang berlaku dan dimantapkan secara terus menerus dapat diharapkan memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya serta dapat lebih mampu memenuhi keanekaragaman kebutuhan masyarakat, terutama lapangan kerja.

Selain itu, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1983 dan sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. DR. Nugroho Notosusanto, mengisyaratkan dimasukkannya satu mata pelajaran baru yaitu mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dalam rangka Pendidikan Pancasila yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran nasional sebagai satu bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air, merangsang kemampuan kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan serta membina kepribadian bangsa melalui proses integrasi dan internalisasi jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Mata pelajaran ini merupakan bagian terpadu pendidikan umum dan pendidikan humaniora. Dalam rangka mengembangkan materi mata pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa, Pusat Kurikulum telah bekerjasama dengan Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional dan para pakar Sejarah yang ada di beberapa IKIP dan Universitas serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

1) Tujuan Instruksional

Mengingat bahwa pengembangan kurikulum 1984 juga menggunakan sistem pengembangan Program Pengembang Sistem Instruksional, maka langkah pertama adalah menelaah tujuan pendidikan nasional

yang terdapat dalam GBHN 1983 dan menjabarkannya menjadi tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional umum. Untuk melakukan penelaahan dan penjabaran tujuan pendidikan nasional ini dibentuk tim khusus dibawah pimpinan Prof. Dr. Conny Semiawan yang terdiri dari para ahli dari berbagai perguruan tinggi, antara lain Prof. Dr. Mudomo (ITB), Prof. Dr. Andi Hakim Nasution (IPB), Prof. Dr. Yus Badudu (UNPAD), DR. Bagiono (Dikmenjur), Dr. R. Ibrahim dan Dr. Ratna Wilis Dahar, (IKIP Bandung), Dr. Zaini Machmud (IKIP Malang), Dr. Nababan (IKIP Jakarta), A.F. Tangyong MA, MA. (Puskur), Lexy C. Moleong (Puskur), Drs. Benny Karyadi, MA (Puskur).

2) Struktur Program

Setelah pengembangan tujuan-tujuan di atas dibentuklah struktur program untuk masing-masing tingkat pendidikan yang pada dasarnya memiliki **program inti** dan program pilihan. Kedua program ini batasnya tidak jelas misalnya pendidikan bahasa daerah, untuk daerah-daerah tertentu dimasukkan sebagai program inti yaitu program yang harus diikuti oleh semua peserta didik di daerah tersebut. Dalam struktur program kurikulum untuk Taman Kanak-Kanak hanya memiliki program inti. Selain itu bila di tingkat sekolah lain ada mata pelajaran, di Taman Kanak-Kanak ada bidang pengembangan. Bila di tingkat sekolah lain beban belajar dinyatakan dengan kredit per semester di Taman Kanak-Kanak dinyatakan dengan jam pelajaran per minggu.

a) Program Inti

Program inti adalah program yang berisikan mata pelajaran yang harus diikuti oleh semua peserta didik setiap jenjang pendidikan. Program inti diadakan dalam rangka (1) memenuhi tujuan satuan pendidikan yang bersangkutan, (2) mewujudkan upaya peletakan

dasar-dasar persatuan dan kesatuan antar satuan pendidikan, (3) mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, perubahan masyarakat, perkembangan pendidikan di negara-negara maju, serta (4) penguasaan pengetahuan minimal dan esensial bagi semua peserta didik.

b) Program Pilihan

Program pilihan adalah program yang dipilih berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat. Khusus untuk tingkat SMA selain program pilihan terdiri dari program A dan program B.

Program A disajikan dalam bentuk program-program yang disesuaikan dengan kepentingan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu program Ilmu-Ilmu Fisik, program Ilmu-Ilmu Biologi, program Ilmu-Ilmu Sosial, dan program Pengetahuan Budaya (termasuk Pengetahuan Agama). Peserta didik dapat memilih salah satu program tersebut sesuai dengan kemampuan dan minatnya mulai kelas II SMA.

Masing-masing program tersebut memiliki kegunaannya.

- (1) Program Ilmu-Ilmu Fisik (mata pelajaran Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Bahasa Inggris) disediakan bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji baik gejala-gejala alamiah yang menyangkut benda/bahan tak hidup, seperti Fisika, Kimia, Elektronika, Astronomi, Geologi dan sebagainya, maupun bidang Matematika
- (2) Program Ilmu-Ilmu Biologi (mata pelajaran Fisika, Kimia, Biologi, Matematika dan Bahasa Inggris) menyiapkan peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji gejala-gejala alamiah yang hidup, seperti Pertanian, Kedokteran, Biologi, dan

sebagainya. Mata pelajaran Fisika dan Biologi dalam program Ilmu-Ilmu Fisik mempunyai bobot kredit yang berlainan dengan program Ilmu-Ilmu Biologi

- (3) Program Ilmu-Ilmu Sosial (mata pelajaran Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi, Tatanegara, Matematika dan Bahasa Inggris) menyiapkan peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji kehidupan sosial manusia seperti Ilmu Administrasi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik, Sosiologi, Antropologi, Psikologi, dan sebagainya.
- (4) Program Pengetahuan Budaya (mata pelajaran Sosiologi dan Antropologi, Sejarah Budaya, Sastra, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Daerah/Bahasa Asing Lainnya) menyiapkan peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji aspek-aspek budaya, seperti Hukum, Pengetahuan Agama (Teologi), Filsafat, Bahasa, Sastra, Sejarah, dan sebagainya.

Peserta didik yang telah memilih suatu program tertentu dapat mengambil juga mata pelajaran yang lain, asal tidak mengganggu kelancaran penyelesaian program pokoknya.

Program B disediakan sebagai sarana untuk menampung minat dan bakat peserta didik untuk mendalami berbagai bidang kehidupan yang ada di masyarakat. Program ini lebih diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang akan langsung bekerja sesudah lulus SMA maupun yang akan memasuki akademi, politeknik, program diploma, dan sebagainya.

Program B disajikan dalam bentuk program-program yang disesuaikan dengan bidang-bidang kehidupan di masyarakat. Bidang-bidang itu terdiri atas antara lain Teknologi Industri, Komputer,

Pertanian, Kehutanan, Jasa, Kesejahteraan Keluarga, Maritim, Budaya, dan sebagainya.. Adapun kegunaan masing-masing program adalah sebagai berikut.

- (1) Program di bidang Teknologi Industri menyiapkan peserta didik yang memilih bidang teknologi industri sebagai lapangan kerjanya atau yang akan melanjutkan pendidikannya ke Akademi Komputer, ke Politeknik, Akademi Teknik, dan sebagainya.
- (2) Program di bidang Komputer menyiapkan peserta didik yang memilih bidang komputer sebagai lapangan kerjanya atau yang akan melanjutkan pendidikannya ke Akademi Komputer, Program Diploma bidang Komputer dan sebagainya.
- (3) Program di bidang Pertanian dan Kehutanan menyiapkan peserta didik yang memilih bidang pertanian dan kehutanan sebagai lapangan kerjanya atau yang akan melanjutkan pendidikannya ke Akademi Pertanian, Akademi Kehutanan, dan sebagainya.
- (4) Program di bidang Jasa menyiapkan peserta didik yang memilih bidang jasa sebagai lapangan kerjanya atau yang akan melanjutkan pendidikannya ke Akademi Perdagangan, Akademi Parawisata, Akademi Sekretaris, dan sebagainya.
- (5) Program di bidang Kesejahteraan Keluarga menyiapkan peserta didik yang memilih bidang kesejahteraan keluarga sebagai lapangan kerjanya atau yang akan melanjutkan pendidikannya ke Akademi Gizi, Akademi Kesejahteraan Keluarga, dan sebagainya.
- (6) Program di bidang Maritim menyiapkan peserta didik yang memilih bidang kelautan sebagai lapangan kerjanya atau yang akan melanjutkan pendidikannya ke Akademi Pelayaran, Akademi Perikanan Laut, dan sebagainya.
- (7) Program di bidang Budaya menyiapkan peserta didik yang memilih bidang budaya sebagai lapangan kerjanya atau yang akan

melanjutkan pendidikannya ke Akademi Bahasa, Akademi Teater, Akademi Seni Rupa, dan sebagainya.

- (8) Program di bidang pengetahuan Agama menyiapkan peserta didik yang memilih bidang Agama sebagai lapangan kerjanya atau yang akan melanjutkan pendidikannya ke program-program pendidikan agama yang sederajat dengan tingkat Akademi atau program diploma.

Pada masing-masing program tersebut perlu diberi pengetahuan tentang wiraswasta, Undang-Undang Perburuhan dan Keselamatan Kerja, kecuali program di bidang pengetahuan Agama..

Berbeda dengan pendidikan keterampilan pada program inti, program B lebih diarahkan pada tujuan pembinaan keterampilan yang diperlukan sebagai bekal persiapan bagi para lulusan untuk bekerja/memasuki bidang-bidang kehidupan di masyarakat. Berbeda pula dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, program B memberikan bekal kemampuan dasar yang luas sedangkan kemampuan kejuruannya lebih terbatas/tidak selengkap Sekolah Menengah Kejuruan.

Masing-masing program pada Program A dan Program B pada dasarnya dapat diambil mulai semester manapun, tergantung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program yang bersangkutan. Peserta didik yang akan melanjutkan ke Universitas atau Institut dapat mengambil sebagian program dalam program B, demikian pula sebaliknya, asal tidak mengganggu kelancaran penyelesaian program pokok yang dipilihnya.

Evaluasi hasil perintisan kurikulum SMA Program B ini ternyata menunjukkan bahwa sangat sukar dilakukan mengingat sarana dan prasarana yang ada, sumber daya manusia, administrasi program persekolahan, dan sumber dana yang tersedia. Mengingat kesulitan itu

maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ad-Interim, Prof. DR. Sumarlin menunda program B ini dalam waktu yang tidak ditetapkan. Di Sekolah Menengah Kejuruan, mata pelajaran dikelompokkan menjadi Mata Pelajaran Dasar Umum (MPDU), Mata pelajaran Dasar Kejuruan (MPDK) dan Mata Pelajaran Kejuruan (MPK).

Di Sekolah Pendidikan Guru, Mata Pelajaran dikelompokkan menjadi Mata Pelajaran Dasar Umum (MPDU), Mata pelajaran Dasar Keguruan (MPDK), dan Mata Pelajaran Kejuruan (MPK)..

Tujuan institusional, tujuan kurikuler, struktur program kurikulum dimasukkan dalam Buku I Kurikulum yaitu buku yang berisikan Landasan, Program dan Pengembangan.

3) Garis-Garis Besar Program Pengajaran

Berdasarkan tujuan institusional dan tujuan kurikuler, yang berpusat pada peserta didik, dijabarkanlah materi kurikulum yang dinyatakan dengan pokok bahasan – pokok bahasan dan deskripsinya. Materi kurikulum dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat cepat sehingga tidak mungkin lagi meminta guru mengajarkan semua fakta dan konsep kepada peserta didik. Selain itu penemuan ilmu pengetahuan bersifat relatif. Suatu teori mungkin menjadi kadaluarsa dan ditolak setelah data baru mampu membuktikan kekeliruan atau kurang keterluasan teori yang dianut. Jika kita masih bersikeras meminta guru mengajarkan semua fakta dan konsep maka kita secara tidak sadar mendesak guru untuk bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar dan karena terdesak waktu guru akan memilih jalan yang termudah yaitu menyampaikan materi tersebut dengan metode ceramah. Jelaslah hal itu bertentangan dengan prinsip pendekatan CBSA dan Keterampilan Proses. Dengan demikian, jika kita hendak menanamkan sikap ilmiah dalam diri peserta didik maka cara menuangkan informasi

sebanyak-banyaknya ke dalam pikiran peserta didik tidaklah sesuai dengan azas pendidikan. Karena itu, timbul pemikiran bahwa materi adalah sekedar alat untuk melatih peserta didik berpikir kritis, menanamkan keterampilan mental dan fisik untuk memecahkan masalah. Dalam rangka pengembangan materi setiap mata pelajaran, Prof DR. Conny Semiawan mengarahkan para pengembang materi yaitu janganlah kita menjejalkan “ikan” kepada anak untuk dimakan sebanyak-banyaknya tetapi hendaknya kita dapat memberikan “kail” kepada anak untuk dapat memancing sendiri. Jadi yang terpenting adalah prosesnya bukan hasilnya.

Dengan demikian pengembangan materi kurikulum yang hanya mencantumkan pokok-bahasan pokok-bahasan saja dengan waktu belajar tidaklah cukup. Alternatif pendekatan/metode pembelajaran menjadi sangat penting. Dalam pengembangan materi mata pelajaran ini Pusat Kurikulum telah bekerja sama dengan para pakar yang ada di IKIP/Universitas dan direktorat terkait dalam lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Agama khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, dan Direktorat Jaranitra. Pusat Kurikulum perlu memberikan pendekatan pengajaran/cara belajar-mengajar yang berpusat pada siswa, sesuai dengan pokok bahasan/bahan pengajaran dan yang mampu menanamkan keterampilan dasar untuk belajar seumur hidup dan sesuai dengan waktu yang disediakan. Dengan perkataan lain pendekatan/cara belajar mengajar yang dikembangkan pada Kurikulum 1984 diarahkan untuk membentuk kemampuan peserta didik untuk mencari , menemukan dan mengelola hasil perolehannya atau pendekatan yang mengacu pada bagaimana peserta didik harus belajar yaitu belajar bagaimana cara belajar (Learning How to Learn – Novak and Gowin). Selain itu sumber/media belajar dan pendekatan evaluasi yang sesuai juga merupakan saran untuk

tditerapkan oleh guru. Tujuan instruksional umum, pokok bahasan dan deskripsinya, pendekatan pengajaran/cara belajar mengajar, sumber/media belajar dan pendekatan evaluasi dicantumkan dalam buku II Kurikulum 1984 yang dikenal dengan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mata pelajaran tertentu. Format GBPP yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum ternyata dapat diterima dan digunakan untuk Sekolah-Sekolah dalam lingkungan Departemen Agama, Sekolah-sekolah Kejuruan dan Sekolah-Sekolah Keguruan.

4) Pedoman

Pusat kurikulum menyadari bahwa masih banyak guru yang tidak berlatar belakang pendidikan guru dan kurang faham dengan pendidikan peserta didik. Karena itu Pusat Kurikulum menganggap perlu mengembangkan berbagai macam pedoman. Pedoman-pedoman pelaksanaan Kurikulum 1984 yang disusun meliputi:

1. Pedoman Proses Belajar Mengajar
2. Pedoman Penilaian
3. Pedoman Bimbingan
4. Pedoman Pembinaan Guru
5. Pedoman Sistem Kredit
6. Pedoman Pelaksanaan Penataran
7. Pedoman Pelaksanaan Program B untuk SMA
8. Pedoman Kerja Lapangan untuk Sekolah Kejuruan
9. Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan untuk Sekolah Keguruan.

Pedoman-pedoman ini bersifat umum dan dapat berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, kecuali pedoman no. 7, 8, dan 9.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksudkan dengan perangkat kurikulum 1984 adalah;

1. Landasan, Program, dan Pengembangan
2. Garis-Garis Besar Program Pengajaran

3. Pedoman-pedoman Pelaksanaan Kurikulum 1984

5) Pokok Pelaksanaan Kurikulum

Dalam pelaksanaan kurikulum 1984 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah berlaku beberapa kegiatan yaitu kegiatan kurikuler, administrasi kurikulum dan bimbingan karier/

a) Kegiatan kurikuler

Kegiatan kurikuler dibagi menjadi 3 bagian yaitu kegiatan intra kurikuler, kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler

Kegiatan Intra-Kurikuler dilakukan di sekolah yang jatah waktu/kreditnya telah ditentukan dalam struktur program.

Kegiatan Ko-Kurikuler adalah kegiatan di luar jatah waktu/kreditnya yang telah ditentukan dalam struktur program. Tujuan kegiatan ini adalah agar peserta didik dapat memperdalam, menghayati apa yang dipelajari dalam kegiatan Intra-Kurikuler. Kegiatan Ko-Kurikuler adalah kegiatan seperti mempelajari buku-buku tertentu, merancang dan melakukan penelitian sederhana, membuat karangan, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis. Hasil kegiatan peserta didik ini diperhitungkan dalam menentukan nilai peserta didik.

Kegiatan Ekstra-Kurikuler adalah kegiatan di luar jatah waktu/kredit yang telah ditentukan dalam struktur program, termasuk waktu libur sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperluas pengetahuan peserta didik, mengenal hubungan antar berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, dan melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan Ekstra-Kurikuler antara lain dapat berupa kunjungan ke obyek-obyek tertentu misalnya gunung, pantai, candi, museum, membuat drama, palang merah remaja, dokter kecil, pramuka, dan sebagainya.

b) Administrasi Kurikulum

Di tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diterapkan jam pelajaran/minggu sedangkan di jenjang pendidikan Menengah diterapkan sistem kredit semester. Diterapkannya sistem kredit semester dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pendidikan sekaligus dikaitkan dengan sistem penilaian peserta didik. Satu kredit diartikan dengan 1 (satu) jam pelajaran tatap muka ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) jam pelajaran pekerjaan rumah per minggu per semester.

c) Pendekatan Belajar dan Penilaian

Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan lebih banyak mengacu kepada bagaimana peserta didik belajar, selain kepada apa yang ia pelajari. Dengan demikian proses belajar mengajar perlu berpusat pada peserta didik (student centered) daripada berpusat pada guru (teacher centered). Pendekatan belajar-mengajar harus diarahkan pada Cara Belajar Siswa Aktif yang telah diperkenalkan oleh PPPG tahun 1963 oleh Prof. DR. Raka Joni, laporan Beeby dan Ibu Prof. Dr. Pakasi, Panitia 11, Modular Instruction PPSP, hasil penelitian Dr. Arya Djalil dan Christine Mangindaan tahun 1979, mutu proses belajar mengajar dari proyek Supervisi Pendidikan. Sedangkan pendekatan keterampilan proses dilaksanakan agar peserta didik mampu mengelola perolehan belajarnya Pendekatan Keterampilan Proses ini juga mendapat perhatian dari British Council dengan mengirim konsultannya ke Pusbangkurrandik yaitu Prof. Wynne Harlen, Ph.D dan Philip Adey, Ph.D

d) Bimbingan Karier

Pelaksanaan Bimbingan Karier penting artinya untuk menyesuaikan pendidikan dengan perbedaan individu peserta didik dan kebutuhan lingkungan. Bimbingan karier bukan hanya berarti bimbingan tugas tetapi perlu memiliki arti yang lebih luas yaitu bimbingan agar peserta didik mampu (1) memahami dirinya, (2) memahami lingkungan/dunia kerja dan tatahidup tertentu, dan (3) mengembangkan rencana dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang masa depannya.

Dalam pelaksanaannya nara sumber yang ada di masyarakat perlu diikuti sertakan agar program pendidikan dapat disesuaikan dengan berbagai bidang kehidupan.

5) Pengembangan dan Pentahapan Pelaksanaan Kurikulum 1984

Pengembangan Kurikulum 1984 perlu berpedoman pada azas-azas (1) berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan GBHN, (2) Keluwesan dengan mempertimbangkan baik tuntutan kebutuhan peserta didik pada umumnya maupun kebutuhan peserta didik secara individu sesuai dengan minat dan bakatnya, serta kebutuhan lingkungan, (3) Pendekatan Pengembangan yang berarti bahwa pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus menerus, yaitu dengan jalan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai untuk maksud perbaikan/pemantapan dan pengembangan lebih lanjut, dan (4) Peran serta daerah dimana daerah berwenang menjabarkan lebih lanjut materi program keterampilan dan khususnya program B untuk Sekolah Menengah Atas.

Kurikulum 1984 dilaksanakan secara bertahap mulai dari kelas I pada tahun ajaran 1984/1985, kelas I dan kelas II pada tahun ajaran 1985/1986, dan seterusnya.

E. Pendekatan pembelajaran CBSA dan Keterampilan Proses.

Pendekatan pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan pendekatan Keterampilan Proses merupakan pendekatan pembelajaran yang komplementer. Pendekatan pembelajaran Keterampilan Proses tanpa CBSA akan berhasil, dan CBSA tanpa Keterampilan Proses akan sia-sia karena tidak tahu arah dan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas.

a. Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)

Beberapa tokoh dalam pengembangan pendekatan CBSA adalah Prof. Dr. Conny Semiawan, A.F.Tangyong MA, MA., Drs. Djam'an Satori, MA, dan Wahyudi, dengan konsultan dari Inggris Hugh Hawes dan Roy Gardner.

Beberapa tokoh lain yang juga memiliki andil dalam CBSA antara lain adalah Prof. DR. Raka Joni yang telah memperkenalkan CBSA di PPG sebagai wacana, laporan evaluasi dari Beeby, Ibu Prof. Dr. Pakasi, Panita 11, Prof. DR. Soedijarto dan Prof. Murray Thomas, Ph.D dengan modular instructionnya, Prof. DR. James Block dengan Mastery Learningnya, DR. Arya Djalil dan DR. Christine Mangindaan dengan laporan penelitiannya.

Kegiatan pengembangan pendekatan pembelajaran CBSA sebenarnya berasal dari Pengembangan Model Supervisi Pendidikan/ Pelayanan Profesional kepada Para Guru Sekolah Dasar atau dikenal dengan nama Uji Coba Cianjur dimulai tahun 1979 sd 1984. Setelah hasil penilaian menunjukkan hasil yang positif, CBSA disebarkan ke kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur, Mataram, propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas permintaan bapak Gubernur NTB, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kabupaten Binjai Sumatera Utara, Lampung dan Tanah Laut Kalimantan Selatan.

Proses supervisi dilakukan dengan pendekatan teman sejawat. Karena itu proses supervisi dilakukan guru dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), supervisi kepala sekolah dilakukan melalui Kelompok Kerja

Kepala Sekolah (KKKS), dan supervisi para penilik dilakukan melalui Kelompok Kerja Penilik Sekolah (KKPS). Kunjungan demi kunjungan dilakukan secara bergelombang dan berkesinambungan oleh berbagai lembaga pendidikan terutama IKIP dan Fakultas Keguruan Universitas, serta para pembina pendidikan dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat. Proses pembinaan dan hasil uji coba juga menjadi perhatian dan bahan seminar internasional, antara lain The British Council di London dan seminar Unesco Bangkok di Manila, New Delhi dan Seoul. Karena itu, “Supervision Support System” ini mendapat perhatian dari British Council, USAID dan Bank Dunia. British Council memiliki andil yang besar dalam berhasilnya proyek ini, mereka tidak saja mengirimkan konsultannya bahkan meberikan beasiswa kepada staf Pusbangkurrandik untuk studi di United Kingdom. Kiranya layaklah bahwa gagasan-gagasan baru dalam pelaksanaan Supervisi Pendidikan/Pelayanan profesional Guru Sekolah Dasar yang mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar, dan meningkatkan kemampuan para penilik Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Dasar, Guru Sekolah Dasar dan para pembina lainnya dapat dipetik dan dinikmati demi kepentingan peserta didik, terutama di lingkungan Sekolah Dasar di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1985 Pusat Kurikulum telah berhasil menerbitkan buku-buku tentang:

- 1) Bagaimana Membina Guru Secara Profesional.
- 2) CBSA, Membina Guru Mengajar Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar.
- 3) CBSA, Membina Guru Mengajar Matematika di Sekolah Dasar.
- 4) CBSA, Membina Guru Mengajar Ilmu-Ilmu Sosial di Sekolah Dasar.
- 5) CBSA, Membina Guru Mengajar Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar.
- 6) CBSA, Mengajar Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar.
- 7) CBSA, Mengajar Matematika di Sekolah Dasar.
- 8) CBSA, Mengajar Ilmu-Ilmu Sosial di Sekolah Dasar.

9) CBSA, Mengajar Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar

Buku-buku tersebut ditulis dan diterbitkan berdasarkan pengalaman yang diperoleh oleh berbagai pihak selama melaksanakan uji coba dan ungkapan pengalaman yang dilontarkan dalam forum urun pendapat.

Gagasan baru dalam supervisi pendidikan bermuara pada cara belajar mengajar di sekolah, dimana peserta didik berpartisipasi aktif secara fisik dan mental dalam pembelajaran. Peran guru dengan cara baru yaitu dengan pendekatan CBSA berubah secara drastis yaitu dari:

Informator menjadi motivator

Diktator menjadi organisator

Pengawas peserta didik menjadi pembina peserta didik

Kemungkinan “penghambat” belajar menjadi akselerator (mempercepat) dan aktivator.

Dipandang dari guru maka dalam uji coba itu bukan supervisi pendidikan yang penting tetapi bagaimana guru mengajar sehingga peserta didik dapat belajar bagaimana belajar. Karena itu pendekatan supervisi pendidikan/pelayanan profesional kepada guru lebih dikenal dengan nama Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). CBSA menghendaki pengelolaan fisik kelas yang berbeda yaitu pengelolaan kelas secara dinamis dengan mengubah letak dan bangku dari deretan menjadi kelompok. Pengelolaan proses belajar-mengajar juga berubah dari pembelajaran secara klasikal menjadi pembelajaran berkelompok dan individual.

b. Pendekatan Keterampilan Proses.

Pendekatan Keterampilan Proses merupakan pendekatan belajar mengajar yang bertujuan untuk menanamkan keterampilan fisik dan mental peserta didik. Keterampilan Proses mulai dikembangkan oleh Pusat Kurikulum mulai tahun 1980 sd tahun 1983 khususnya dalam bidang studi Ilmu

Pengetahuan Alam di tingkat Sekolah Dasar. Beberapa pakar yang mengembangkan keterampilan proses ini adalah DR. Ratna Wilis Dahar, Dra. Nuryani Rustaman,, Gunadi Tanuputra, M.Phil, Drs. Benny Karyadi, MA, Drs. Andrean Rustaman, Drs. Supriadi, dan konsultan dari Inggris yaitu Prof. Wyne Harlen, Ph.D dan Prof. Philip Adey, Ph.D.

Alasan pengembangan pendekatan keterampilan proses ini adalah:

- 1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat tak memungkinkan guru mengajarkan fakta dan konsep biarpun dengan cara menjejalkan informasi kepada peserta didiknya. Dengan menjejalkan informasi kepada peserta didik maka peserta didik akan memperoleh informasi/pengetahuan yang banyak tetapi tidak dilatih untuk melakukan pengumpulan data, menemukan konsep dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- 2) Secara psikologis peserta didik akan memahami konsep-konsep yang memiliki karakteristik abstrak jika disertai dengan contoh-contoh kongkrit, contoh-contoh yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi, dan dengan cara mempraktikkan/melakukan sendiri dengan menggunakan benda-benda yang nyata. Motivasi belajar peserta didik pada umumnya didorong oleh rasa ingin tahu.
- 3) Penemuan teori tidaklah bersifat mutlak. Suatu teori akan menjadi kadaluarsa bila ada penemuan teori lain yang dapat memecahkan persoalan yang lebih luas. Konsep yang ditemukan melalui penyelidikan ilmiah masih terbuka untuk dipertanyakan, atau dipersoalkan, dan diperbaiki. Untuk menanamkan sikap ilmiah kepada peserta didik, maka peserta didik selalu harus dimotivasi untuk bertanya, berpikir kritis, dan menemukan kemungkinan-kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Yang penting dalam keterampilan proses bukanlah sekedar hasilnya tetapi prosesnya. Suatu proses belajar yang dapat menghasilkan keterampilan-keterampilan dasar untuk dapat belajar seumur hidup.

- 4) Sesungguhnya pengembangan konsep tidak dapat dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai peserta didik. Pengembangan konsep, pengembangan sikap ilmiah dan nilai harus disatupadukan. Pengembangan konsep tanpa pengembangan sikap ilmiah dan nilai mengakibatkan intelektualisme yang gersang tanpa humanisme dan tidak mampu membekali lulusan dengan sikap-sikap yang manusiawi. Ini secara tidak langsung sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan keempat alasan ini maka Pusat Kurikulum perlu mencari cara-cara belajar mengajar yang baru. Pengintegrasian keterampilan proses dalam cara belajar siswa aktif akan dapat menyebabkan keaktifan siswa dalam belajar bukanlah tanpa isi, tanpa pesan, tanpa arah atau tujuan. Cara belajar siswa aktif yang diterapkan di kelas adalah cara belajar mengembangkan keterampilan untuk memproseskan perolehannya. Masalahnya adalah keterampilan-keterampilan apa yang harus dimiliki oleh peserta didik agar mereka memproseskan perolehannya. Belajar dari kehidupan para ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, James Watt, Madame Curie, Albert Einstein, Max Weber, Ki Hadjar Dewantara, Bung Hatta, Soedjatmo, Sutan Takdir Alisyahbana, Prof. DR. Supartinah Pakasi dan masih banyak lagi, maka keterampilan-keterampilan yang dapat memproseskan perolehannya adalah keterampilan-keterampilan:

- 1) Mengamati atau observasi
- 2) Mengklasifikasikan data/informasi
- 3) Mencari hubungan ruang/waktu/kejadian - meramal
- 4) Membuat hipotesis
- 5) Merencanakan eksperimen/penelitian
- 6) Menginterpretasikan atau menafsirkan data
- 7) Menyusun kesimpulan sementara
- 8) Mengkomunikasikan

Keterampilan-keterampilan ini ada pada diri seorang ahli dalam melakukan proses dalam kerja ilmiahnya. Dengan ditanamkannya

keterampilan-keterampilan itu ke dalam diri peserta didik maka peserta didik akan mampu mencari dan menemukan serta merumuskan konsep sendiri, dan mengembangkan sikap dan nilai. Dengan lain perkataan, keterampilan-ketrampilan di atas yang juga disebut dengan istilah keterampilan proses dapat menjadi pendorong dan penggerak penemuan serta pengembangan sikap dan nilai. Hasil percobaan keterpaduan CBSA dan Keterampilan proses dalam mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar di Cianjur, di Padang dan Bandung menunjukkan peningkatan dalam penguasaan materi, peningkatan suasana kelas yang kondusif. Biarpun di uji cobakan di Sekolah Dasar, keterampilan-keterampilan di atas juga dapat digunakan sebagai tujuan pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Kejuruan dan Keguruan.

F. Muatan Lokal

Bhineka Tunggal Ika merupakan kenyataan kehidupan bangsa Indonesia. Suatu kenyataan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat, tatacara dan tata krama pergaulan, seni, bahasa lisan dan tulisan yang berbedabeda. Keaneka ragaman itu bukan saja pada kemasyarakatan dan kebudayaan, melainkan juga pada kondisi alam yang menjadi suatu kawasan lingkungan hidup dengan ciri-ciri yang khas pula. Keaneka ragaman baik yang terkait dengan kondisi sosial dan budaya maupun dengan lingkungan alam justru memperkaya kehidupan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, perlu diusahakan pelestariannya melalui upaya pendidikan dengan cara mengakrabkan siswa dengan lingkungannya, serta menghindarkan anak dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hasan menyatakan bahwa salah satu cara mengakrabkan anak dengan lingkungannya adalah memelihara jalinan antara kegiatan sekolah dengan lingkungannya dan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun bahan kurikulum yang disesuaikan tidak saja dengan lingkungan sekolah tetapi juga dengan kemungkinan pengembangan daerah setempat. Dengan demikian “muatan

lokal? Yang disajikan dapat memberikan wawasan yang mantap pada siswa mengenai apa yang khas dalam lingkungannya. Pada arahannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan bahwa muatan lokal selalin dimaksudkan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan sosialm budaya dan alam, juga perlu ditujukan pada usaha pembaharuan atau modernisasi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Muatan lokal juga dimaksudkan agar pengembangan sumber daya dan tenaga manusia yang terdapat di daerah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, sekaligus mencegah terjadinya depopulasi daerah itu dari tenaga produktif daerah. Prof. Dr. Harsya Bachtiar dalam pengarahannya menyatakan bahwa sekolah adalah bagian dari masyarakat. Karena itu program-program pendidikan yang ada di sekolah harus mencakup pengenalan dan pemahaman terhadap lingkungannya. Dengan perkataan lain program pendidikan sekolah perlu memberikan wawasan yang mantap pada siswa tentang apa yang khas ada dalam lingkungannya. Mengingat bahwa sekolah adalah bagian dari masyarakat dan berada pada lingkungan alam tertentu maka pengembangan kurikulum yang pada saat ini seluruhnya dipusatkan tidaklah mungkin dapat mencakup muatan lokal yang beraneka ragam itu. Karena itu dalam pengembangan kurikulum, peran serta sekolah dan daerah perlu ditingkatkan. Sekolah harus diberi kesempatan untuk menyusun muatan lokal yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan muatan lokal yang akan memelihara jalinan antara sekolah dengan lingkungannya.

Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya daerah dan wajib dipelajari oleh siswa di daerah itu.

Lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok lingkungan yaitu lingkungan alam pantai, dataran rendah termasuk di dalamnya daerah aliran sungai, dataran tinggi, dan pegunungan atau gunung.

Lingkungan sosial dan budaya yang terdapat dalam kehidupan dapat dibagi menjadi 8 kelompok yaitu pola kehidupan (1) perikanan darat dan perikanan laut, (2) peternakan, (3) persawahan atau pertanian, (4) perladangan atau

perkebunan, (5) perdagangan, termasuk di dalamnya jasa, (6) industri kecil, termasuk didalamnya industri rumah tangga dan industri kerajinan, (7) industri besar, dan (8) pariwisata.

Budaya daerah dalam suatu pola kehidupan adalah bahasa daerah, seni daerah, adat istiadat daerah, tata cara dan tata krama khas daerah, keterampilan dan kemahiran lokal yang menunjukkan ciri khas tradisional daerah.

Atas dasar arahan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Harsya Bachtiar maka pada tahun 1986 - 1987 Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan memberikan pelatihan cara mengembangkan kurikulum muatan lokal dan menerapkannya di Sekolah Dasar di beberapa daerah antara lain di daerah Rajapolah dengan kerajinan tangan dan pembuatan kompor, di daerah Singaparna dengan peternakan ikan dan pembudayaan pembibitan ikan yang dipadukan dengan pemeliharaan ayam yang dikenal dengan nama "Longyam" atau balong ayam, di daerah Sidoarjo dengan pengolahan udang, di daerah Lampung (Bandar Lampung dan Metro) dengan tata cara dan tata krama pergaulan, dan di Jakarta dengan pertamanan, lalu lintas dan kebakaran. Pembelajaran di Sekolah sedapat mungkin disajikan secara integratif antar mata pelajaran sehingga pada perencanaan bahan kurikulumnya diwujudkan dalam bentuk "web". Perwujudan bahan belajar secara integratif antar mata pelajaran ini penting untuk memberikan wawasan yang luas dan mendalam tentang tema tertentu dalam muatan local. Misalnya tema tentang Ikan, dipandang dari Ilmu Pengetahuan Alam dalam struktur ikan, gerak ikan, habitat ikan, makanan ikan, ilmu pengetahuan social tentang makna ikan dalam kehidupan sehari-hari, pemasaran, Matematika dalam menghitung jumlah ikan dalam luas kolam tertentu, mengukur dalamnya kolam, jual dan beli ikan, Muatan local juga dapat disajikan tidak secara integratif antar mata pelajaran berkaitan dengan mata pelajaran tertentu misalnya Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Dalam pelatihan dan pembelajaran kepada guru-guru Sekolah Dasar tersebut dilakukan kerja sama dengan Kanwil Depdikbud setempat dan dinas-dinas yang terkait antara lain dinas pariwisata, dinas perikanan, dinas kebudayaan, para pakar dalam industri, dinas pertamanan, dinas kebakaran, dinas lalulintas dan pemuka masyarakat. Tenaga-tenaga dari dinas-dinas terkait tersebut dimaksudkan untuk memberi materi sedangkan tentang pembelajaran di kelas diberikan oleh staf dari Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan bekerja sama dengan penilik sekolah dan guru-guru setempat.

Atas dasar pengalaman yang diperoleh tersebut pada tahun 1987 disusunlah buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Program Pengajaran Muatan Lokal untuk Guru Sekolah Dasar yang berisikan Keputusan Mentari Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0412/U/1987 tanggal 21 Juli 1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Dasar dan lampirannya berisikan Petunjuk Penerapan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Dasar. Dalam buku petunjuk ini dipaparkan (1) mengapa perlu dimasukkan muatan lokal dalam kurikulum di Sekolah Dasar, (2) Apa yang dimaksud dengan muatan lokal, dan (3) bagaimana cara merencanakan, memilih dan menerapkan muatan lokal itu dalam program pengajaran di Sekolah Dasar.

LATAR BELAKANG DAN LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 1994

A. Latar belakang Kurikulum 1994

Isu dan Masalah Pendidikan

Pada tahun 1989 Kurikulum 1984 telah diimplementasikan selama kurang lebih 5 tahun. Selama dalam kurun waktu tersebut telah terjadi perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan yang berfungsi menyiapkan generasi muda untuk dapat berperan dimasa datang setelah lulus atau tamat menjadi sorotan masyarakat. Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, antara lain: (1) mutu pendidikan yang belum sesuai dengan harapan; (2) kesempatan memperoleh pendidikan yang belum merata; (3) beban belajar yang memberatkan peserta didik; (4) kualifikasi dan kemampuan guru yang belum yang belum sesuai; (5) kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Dalam kurun waktu pengimplementasian Kurikulum 1984, telah diadakan pengkajian terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut. Salah satu komponen Kurikulum 1984, yaitu Program B yang dimaksudkan bagi peserta didik yang dikarenakan kemampuan dan/atau minatnya akan memasuki dunia kerja setelah lulus, pelaksanaannya ditunda akibat belum siapnya sarana pendukung serta ketersediaan dan kesiapan tenaga di lapangan.

Pada tahun 1989 telah ditetapkan dan diberlakukan Undang-undang Nomor:2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang dan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: Tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor: Tentang Pendidikan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor: Tentang Pendidikan Menengah menjadi dasar dalam penyempurnaan pendidikan, khususnya kurikulum.

Sementara Kurikulum 1984 berjalan, dalam kurun waktu tersebut terjadi perkembangan perubahan jaman yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tuntutan dan kebutuhan

masyarakat terkait dengan pendidikan mengemuka dalam beberapa Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain sebagai berikut:

- (a) Perlunya perintisan penyusunan kurikulum nasional yang menjamin tersedianya peluang untuk diisi dengan muatan lokal (Raker Nasional, 1986);
- (b) Perlunya dikembangkan pola pendidikan dasar 9 tahun (Raker Nasional, 1987);
- (c) Perlunya melaksanakan perintisan wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun (Raker Nasional 1988);
- (d) Perlunya pembenahan materi mata pelajaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB);
- (e) Perlunya peningkatan kemampuan baca, tulis dan hitung di SD (Raker Nasional, 1987 dan 1990); dan
- (f) Perlu adanya pembenahan materi mata pelajaran Bahasa, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Matematika (Raker Nasional, 1989).

Salah satu komponen Kurikulum 1984, yaitu Program B yang dimaksudkan bagi peserta didik yang dikarenakan kemampuan dan/atau minatnya akan memasuki dunia kerja setelah lulus, pelaksanaannya ditunda sebagai akibat belum siapnya sarana pendukung serta ketersediaan dan kesiapan tenaga di lapangan.

Arahan GBHN 1993

Dalam Garis Besar Haluan Negara memberikan arahan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Lebih lanjut dalam GBHN tersebut menyebutkan bahwa pendidikan nasional perlu terus ditata, dikembangkan, dan

dimantapkan dengan melengkapi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan pendidik kejuruan serta pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Berkenaan dengan kurikulum, GBHN memberikan arahan bahwa pembinaan dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan, yang merupakan wahana utama pendidikan, diusahakan agar mampu mewujudkan manusia yang berkualitas yang dituntut oleh pembangunan bangsa dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kurikulum perlu terus dikembangkan secara dinamis dengan memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah serta perkembangan Iptek. Kurikulum dan isi pendidikan yang memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan nasional. Ilmu dasar, ilmu pengetahuan alam (IPA) dan eksakta, ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan humaniora perlu dikembangkan secara serasi dan seimbang. Arahan GBHN 1993 tersebut memberikan penekanan pada beberapa hal terkait dengan kurikulum, yaitu:

1. Tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggungjawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani;
2. Menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa pahlawan serta berorientasi masa depan;
3. Iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri;
4. Perlu ditumbuhkan sikap dan perilaku kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju;
5. Pembinaan dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan sebagai wahana utama pendidikan agar terus dikembangkan secara dinamis memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah serta perkembangan Iptek.

Arahan GBHN ini menjadi salah satu acuan dan pertimbangan dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan kurikulum 1984 menjadi kurikulum 1994.

Konsekuensi dari UU No. 2 Tahun 1989

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 1989. Undang-undang tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6. Maka sejak saat itulah undang-undang tersebut diberlakukan. Oleh karena itu segala unsur atau elemen pendidikan yang terkait perlu segera disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan semua peraturan pelaksanaannya.

Dalam menimbang UUSPN menegaskan kembali bahwa: (1) pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (2) untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kedua pertimbangan tersebut memberikan indikasi kepada kita bahwa kualitas manusia Indonesia belum sesuai dengan yang kita inginkan sehingga kemajuan kehidupan dan juga keadilan dan kemakmuran juga belum sepenuhnya terwujud.

Oleh karena itu kedua pertimbangan tersebut menjadi kerangka berpikir dan acuan dalam penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam penyempurnaan kurikulum 1984.

Hal-hal Pokok dari UUSPN Yang Menjadi Pedoman Dalam Penyempurnaan Kurikulum.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan, pertama

pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sistem pendidikan nasional harus dapat memberi pendidikan dasar bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia, yang diperlukan oleh setiap warga Negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap warga negara diharapkan mengetahui hak dan kewajiban pokoknya sebagai warga Negara serta memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri, ikut serta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta upaya pembelaan Negara. Pengetahuan dan kemampuan ini harus dapat diperoleh dari sistem pendidikan nasional.

Upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dan pengembangan kebudayaan nasional, yang diharapkan menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia, diadakan terus-menerus, sehingga dengan sendirinya senantiasa menuntut penyesuaian pendidikan pada kenyataan yang selalu berubah. Pendidikan juga harus selalu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan landasan pemikiran tersebut, pendidikan nasional disusun sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya.

Materi atau pasal-pasal dari UUSPN berikut yang terkait dengan penyempurnaan atau penyesuaian kurikulum.

1. Pengertian kurikulum.

Pengertian kurikulum tidak terdapat didalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar (Pasal 1 butir 9 UUSPN).

2. Fungsi pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

3. Tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

4. Tujuan pendidikan dasar.

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

5. Tujuan pendidikan menengah.

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

6. Fungsi kurikulum.

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (pasal 37 UUSPN).

7. Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan (pasal 38 ayat (1) UUSPN).

8. Pengertian Isi kurikulum.

Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

9. Isi kurikulum wajib.

Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila; (b) pendidikan agama; dan (c) pendidikan kewarganegaraan.

10. Isi kurikulum pendidikan dasar.

Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang: (a) pendidikan Pancasila; (b) pendidikan agama; (c) pendidikan kewarganegaraan; (d) bahasa Indonesia; (e) membaca dan menulis; (f) matematika (termasuk berhitung); (g) pengantar sains dan teknologi; (h) ilmu bumi; (i) sejarah nasional dan sejarah umum; (j) kerajinan tangan dan kesenian; (k) pendidikan jasmani dan kesehatan; (l) menggambar; serta (m) bahasa Inggris.

11. Bahasa pengantar.

Bahasa pengantar dalam system pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

B. Pengembangan Kurikulum 1994

Pengembangan Kurikulum 1994 merupakan upaya penyempurnaan dan penyesuaian Kurikulum 1984 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah, Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar; dan Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah. Penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum tersebut dimaksudkan pula sebagai upaya untuk menyederhanakan dan merampingkan isi kurikulum. Dalam penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum dibentuk tim yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum.

Panitia Pengarah berfungsi memberikan arahan dan kebijakan pengembangan kurikulum. Kebijakan pengembangan kurikulum terkait dengan: tujuan pendidikan nasional dan kualitas manusia Indonesia yang ingin dihasilkan atas dasar undang-undang, memberikan arahan bahwa pengembangan kurikulum 1994 merupakan upaya penyempurnaan Kurikulum 1984 dan penyederhanaan materi Kurikulum 1984; mengurangi materi yang tumpang tindih atau overlaping yang tidak diperlukan; menyederhanakan materi termasuk matematika untuk pendidikan dasar, terutama matematika SD; dan memberikan arahan cara kerja pengembangan kurikulum; serta sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Panitia Pengarah terdiri atas para pejabat eselon I

dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Ketua Pengarah Pengembangan Kurikulum 1994 adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Prof. Dr. Harsya Wardhana Bachtiar. Anggota Tim Pengarah Pengembangan Kurikulum 1994 adalah: (1) Dirketur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Hasan Walinono; (2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Sukaji Ranuwihardjo; (3) Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, Prof. Dr. soedijarto, M.A.

Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum

Dalam pengembangan Kurikulum 1994, selain dibentuk Panitia Pengarah dibentuk pula Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum. Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum terdiri atas: Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar; dan Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum SMA; serta Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum SMK. Dalam setiap Kelompok Kerja dibentuk Tim Mata Pelajaran, sesuai dengan jumlah dan jenis mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum. Masing-masing Tim Mata Pelajaran adalah sebagai berikut:

Untuk Sekolah Dasar terdiri atas : (1). Tim Mata Pelajaran Pendidikan pancasial dan Kewarganegaraan; (2). Tim Mata Pelajaran Pendidikan Agama; (3). Tim Mata Pelajaran Bahasa Indonesia (termasuk membaca dan berhitung); (4). Tim Mata Pelajaran Matematika (termasuk berhitung); (5). Tim Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (pengantar sains dan teknologi); (6). Ilmu Pengetahuan Sosial (termasuk ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum); (7). Tim Mata Pelajaran Kerajinan Tangan dan Kesenian (termasuk menggambar); (8). Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; (9). Bahasa Inggris dan (10). Tim Muatan Lokal (sejumlah mata pelajaran). Setiap tim mata pelajaran terdiri atas ahli bidang studi atau mata pelajaran dari perguruan tinggi, guru kelas untuk SD dan guru bidang studi atau mata pelajaran untuk SMP, dan ahli psikologi dari perguruan tinggi. Ahli bidang studi atau mata pelajaran dari perguruan tinggi berperan dalam memberikan justifikasi kebenaran konsep atau materi, kelogisan urutan atau

sequence dan relevansinya dengan mata pelajaran lain terkait serta kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu yang bersangkutan. Guru kelas khususnya di SD dan juga guru bidang studi atau guru mata pelajaran di SMP berperan dalam memberikan kontribusinya tentang urutan atau *sequence* penyajian topic atau pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan pengalaman empirik selama berinteraksi dengan peserta didik serta metode pembelajaran yang relevan dengan kondisi peserta didik dan lingkungan. Sedangkan ahli psikologi memberikan kontribusinya dalam hal memberikan justifikasi tentang kesesuaian atau tingkat kesukaran yang perlu dipertimbangkan dengan kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan psikologis dan kognitif peserta didik.

Tim Mata Pelajaran SD dan Tim Mata Pelajaran SMP merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai konsekuensi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Penyatuan tim ini dimaksudkan agar Kurikulum Pendidikan Dasar 9 Tahun yang mencakup Kurikulum SD dan Kurikulum SMP menjadi satu kesatuan yang utuh, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan terbebas dari kesenjangan atau *gaps* antara kurikulum SD dan Kurikulum SM

1. Perumusan tujuan

Dalam mengembangkan Kurikulum 1994 yang merupakan upaya penyesesain Kurikulum yang berlaku saat itu (Kurikulum 1984) dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan penyempurnaan kurikulum tersebut, serta upaya perampingan materi kurikulum, maka perumusan tujuan dikaitkan dengan hal tersebut. Pada dasarnya penyusunan tujuan didasarkan dan diselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimuat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Dasar (SD) bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar "*Baca –Tulis- Hitung*", pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Pendidikan Dasar yang diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) bertujuan untuk memberikal bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di Sekolah Dasar (SD) yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga Negara sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah. Tujuan ini, tujuan pendidikan yang diselenggarakan di SD dan Tujuan Pendidikan yang diselenggarakan di SMP dalam konteks kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum 1975, disebut tujuan institusional.

Setiap mata pelajaran dalam Kurikulum 1994 dideskripsikan peran atau fungsinya masing-masing yang dimuat dalam Buku Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum 1994. Buku ini muatan dan fungsinya dapat dipadankan dengan Buku I (satu) Kurikulum 1975. Deskripsi mengenai fungsi setiap mata pelajaran sangat penting, dan merupakan kebutuhan terutama dalam proses pengembangan Kurikulum 1994 yang digunakan sebagai bahan rapat pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya deskripsi fungsi setiap mata pelajaran maka memungkinkan Rapat Pimpin Tingkat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dapat membahas dan memberikan masukan yang bermakna bagi

proses penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum. Fungsi setiap mata pelajaran tersebut digunakan sebagai acuan dalam menyusun atau merumuskan tujuan setiap mata pelajaran.

Isi kurikulum pendidikan dasar telah ditetapkan pada pasal 39 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor:28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun. Isi kurikulum pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika termasuk berhitung), pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar serta bahasa Inggris. Sebutan-sebutan tersebut di atas bukan nama mata pelajaran melainkan sebutan yang mengacu pada unsur-unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan dasar untuk mencapai tujuan pendidikan dasar 9 tahun. Mata pelajaran dapat merupakan penggabungan unsur-unsur atau bahan kajian tersebut. Atau sebaliknya satu unsur dapat dibagi kedalam lebih dari satu mata pelajaran. Dengan demikian maka merupakan salah satu atau sekumpulan bahan kajian dan bahan pelajaran yang memperkenalkan konsep, pokok bahasan, tema, dan nilai yang dihimpun dalam satu kesatuan disiplin pengetahuan atau ilmu pengetahuan.

C. Struktur Kurikulum 1994

Dengan mempertimbangkan berbagai tuntutan masyarakat dan mengacu pada GBHN, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pusat Kurikulum dan Sarana Pendidikan, yang dipimpin oleh kepala pusat, Dr. Anwar Jasin, M.Ed. menyiapkan draft Struktur Kurikulum 1994 bersama para pejabat dilingkungan Pusbangkurandik dan staf senior. Draft struktur kurikulum tersebut dibahas dan dikonsultasikan dalam rapat pimpinan Balitbang yang dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan guna mendapat saran dan masukan. Selain melalui rapat pimpinan

Balitbang, pembahasan draft struktur kurikulum juga dilakukan melalui rapat khusus dan konsultasi antara Kepala Pusbangkurandik dengan Kepala Balitbangdikbud. Setelah draft struktur kurikulum dianggap sudah cukup matang, maka draft tersebut dibahas dalam rapat antara jajaran pimpinan Balitbangdikbud dengan jajaran pimpinan dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Balitbangdikbud. Pimpinan Balitbangdikbud terdiri atas: Kepala balitbangdikbud, Prof. Dr. Harsja Wardhana Bachtiar; Kepala Pusbangkurandik, Dr. Anwar Jasin, M.Ed., Kepala Pusat Penelitian, Dr. Sri Wulan Rujjati; Kepala Pusat Pengujian, Jahya Umar, Ph.D; dan Kepala Pusat Pendataan dan Data Statistik Pendidikan, Dr. Boediono Soedjadi. Selain itu para pejabat eselon III dari Pusbangkurandik juga hadir dalam rapat pembahasan struktur kurikulum. Adapun pimpinan dari lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Hasan Walinono; Direktur Pendidikan Dasar, Drs. Zausak Ahmad; Direktur Pendidikan Menengah Umum, Drs. Ahmad Ali; Direktur Pendidikan Kejuruan, Drs. Pakpahan. Draft kurikulum yang dianggap telah menampung masukan dan memenuhi harapan berbagai pihak serta sesuai dengan acuan dan arahan pimpinan (Kepala Balitbang dan Mendikbud) diajukan kepada Mendikbud untuk dibahas dalam rapat pimpinan departemen.

Mata-mata pelajaran yang ditetapkan dalam struktur terdiri atas: (1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) Pendidikan Agama; (3) Bahasa Indonesia; (4) Matematika; (5) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); (6) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); (7) Kerajinan Tangan dan Kesenian; (8) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; (9) Bahasa Inggris; dan (10) Muatan Lokal (sejumlah mata pelajaran). Penekanan pentingnya kemampuan dasar bagi peserta didik pendidikan dasar 9 tahun nampak pada pemberian alokasi waktu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika sebagai mana ditunjukkan pada table Struktur Kurikulum 1994 berikut. Demikian pula pengurangan beban belajar untuk SD dapat dilihat alokasi waktu total per-minggu untuk kelas I, II, dan III yang lebih kecil daripada kurikulum sebelumnya.

Lamanya 1 jam pelajaran per-minggu adalah sebagai berikut:

1. Untuk kelas I dan II SD, 1 jam pelajaran = 30 menit
2. Kelas III, IV, V, dan VI SD, 1 jam pelajaran= 40 menit
3. Kelas I, II, dan III SMP, 1 jam pelajaran = 45 menit

Jumlah jam pelajaran per-minggu adalah sebagai berikut:

1. Untuk SD Kelas I dan II masing-masing 30 jam pelajaran
2. Untuk SD kelas III 38 jam pelajaran
3. Untuk SD Kelas IV 40 jam pelajaran
4. Untuk Kelas V dan VI masing-masing 40 jam pelajaran
5. Untuk Kelas I, II, dan III SLTP masing-masing 42 jam pelajaran

**SUSUNAN PROGRAM PENGAJARAN KURIKULUM
PENDIDIKAN DASAR
(SD DAN SLTP)**

Jenjang dan kelas Mata Pelajaran	SD						SMP		
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2. Pendidikan agama	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	10	10	10	8	8	8	6	6	6
4. Matematika	10	10	10	8	8	8	6	6	6
5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	.	.	3	6	6	6	6	6	6
6. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	.	.	3	5	5	5	6	6	6
7. Kerajinan Tangan dan Kesenian	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9. Bahasa Inggris	4	4	4
10. Muatan Lokal (sejumlah mata pelajaran)	2	2	4	5	7	7	6	6	6
JUMLAH	30	30	38	40	42	42	42	42	42

Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu sebagaimana Tabel.1. di atas merupakan jam pelajaran minimum.

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah Umum atau SMU)

Penyusun Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah, khususnya Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar. Karena pada hakekatnya SMU merupakan pendidikan lanjutan bagi peserta didik lulusan pendidikan dasar khususnya SMP.

Penyusunan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU) yang merupakan bagian penting dalam pengembangan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum, yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Kerja, dan Tim Teknis atau Tim Ahli mata pelajaran. Penanggung jawab pengembangan kurikulum adalah Kepala Pusat Kurikulum dan sarana Pendidikan, yaitu Dr. Anwar Jasin, M.Ed. Draft Struktur Kurikulum SMU dibahas dalam erangkaian rapat pimpinan di lingkungan Balitbang, dan juga dibahas dalam rapat koordinasi dengan para pimpinan, yaitu Dirketur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan para direktur terkait.

Draft Struktur Kurikulum SMU dipersiapkan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang sudah cukup mantap dibahas dalam rapat pimpinan tingkat Departemen yang diikuti oleh para pejabat eselon I dan eselon II Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Materi pembahasan adalah semua isi yang terdapat dalam draf Buku Landasan, Program, dan Pengembangan Kurikulum SMU. Substansi yang mendapat perhatian lebih dan dibahas dalam beberapa rapat pimpinan tingkat departemen adalah penjurusan di SMU. Penjurusan usulan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Sukaji Ranuwihardjo mendapat perhatian rapim. Usulan tersebut adalah agar penjurusan di SMU diadakan di kelas III SMU. Sedangkan di kelas I dan II SMU adalah

program umum yang diikuti oleh semua peserta didik. Penjurusan di kelas III diambil dengan beberapa pertimbangan berikut: (1) secara empirik perguruan tinggi memilih calon mahasiswa yang memiliki penguasaan materi mata pelajaran SMU sebagai *learning – tools* secara memadai yang dapat ditransfer untuk menempuh pendidikan di pendidikan tinggi; (2) yang termasuk *learning-tools* adalah mata-mata pelajaran sains, matematika, dan bahasa serta mata pelajaran lain yang menanamkan cara berfikir saintifik; (3) guna memperkuat bekal untuk memasuki perguruan tinggi, maka bilamana siswa SMU hanya diberi kesempatan 1 (satu) tahun untuk mengikuti mata-mata pelajaran sebagaimana butir 2, tidaklah mencukupi, sehingga sebagian besar kesempatan atau peluang memasuki perguruan tinggi akan direbut oleh para siswa dari jurusan IPA atau jurusan Matematika; dan (4) oleh karena itu perlu diberikan kesempatan yang memadai bagi semua siswa SMU untuk memperoleh bekal sebagaimana butir 2 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yaitu di kelas I dan kelas II SMU. Dengan demikian maka penjurusan SMU diadakan di kelas 3 (tiga).

Jurusan dalam Kurikulum 1994 disebut program. Jurusan atau program tersebut adalah jurusan atau Program Bahasa, jurusan atau Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan jurusan atau Program Ilmu-Ilmu social.

Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam penentuan program atau jurusan di SMU, antara lain adalah; (1) kebutuhan perguruan tinggi dalam menyeleksi calon mahasiswa terutama periode seleksi mahasiswa sampai dengan tahun 1990-an; (2) nampaknya seleksi masuk perguruan tinggi dalam masa tersebut butir 1 berfokus pada 3 (tiga) kelompok penguasaan materi, yaitu; (a) penguasaan materi terkait dengan bahasa dan sastra; (b) penguasaan terkait dengan sains dan matematika; dan (c) penguasaan materi terkait dengan ilmu-ilmu sosial. Dengan catatan, setiap siswa SMU sudah memperoleh bekal sains dan matematika secara memadai di kelas I dan kelas II SMU.

Struktur Program Sekolah Menengah Umum Kelas I dan II

a. Program Umum

Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pel	
	Kelas	
	I	II
1. Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2
2. Pendidikan Agama	2	2
3. Bahasa dan Sastra	5	5
4. Sejarah Nasional dan Dunia	2	2
5. Bahasa Inggris	4	4
6. Olah raga dan Pendidikan Kesehatan	2	2
7. Matematika	6	8
8. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5
a. Fisika	4	4
b. Biology	3	3
c. Kimia		
9. Ilmu-Ilmu Sosial	3	3
a. Ekonomi	-	2
b. Sosiologi	2	-
c. Geografi		
10. Pendidikan Seni	2	-
Total	42	42

Sebagaimana nampak dalam table di atas, untuk membekali peserta didik dengan learning tools yang dipersyaratkan untuk memasuki perguruan tinggi, mata pelajaran Bahasa Inggris diberikan 5 jam pelajaran per-minggu di kelas I dan 5 jam pelajaran di kelas II. Mata pelajaran Bahasa Inggris juga diberikan masing-masing 4 jam pelajaran per-minggu di kelas I dan kelas II. Mata pelajaran Matematika diberikan 6 jam pelajaran per-minggu di kelas I dan II. Demikian pula, mata pelajaran dalam kelompok IPA, yaitu Fisika diberikan 5 jam pelajaran per-minggu selama di kelas I dan II; mata pelajaran

Biologi diberikan 4 jam pelajaran per-minggu di kelas I dan II; dan mata pelajaran kimia diberikan 3 jam pelajaran per-minggu di kelas I dan II. Satu jam pelajaran = 45 menit.

Struktur Program Sekolah Menengah Umum (SMU) Kelas III

a. Program Bahasa

MATA PELAJARAN	Jumlah Jam Pel
	Kelas
	III
UMUM	
1. Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2. Pendidikan Agama	2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	3
4. Sejarah Nasional dan Dunia	2
5. Bahasa Inggris	5
6. Olah raga dan Pendidikan Kesehatan	2*)
KHUSUS	
1. Bahasa dan Sastra Indonesia	8
2. Bahasa Inggris	6
3. Bahasa Asing Lain	9**)
4. Sejarah Budaya	5
Total	42

*) Mata pelajaran Olah raga dan Pendidikan Kesehatan sebagai kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan kondisi sekolah.

***) Sekolah menentukan jenis bahasa asing lain yang diajarkan di sekolah yang bersangkutan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Siswa memilih mata pelajaran bahasa asing lain yang ditawarkan sekolah.

Program Bahasa mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan bahasa dan budaya, baik dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan professional.

Program ini juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat.

b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

MATA PELAJARAN	Jumlah Jam Pel
	Kelas
	III
Umum	
1. Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2. Pendidikan Agama	2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	3
4. Sejarah Nasional dan Dunia	2
5. Bahasa Inggris	5
6. Olah raga dan Pendidikan Kesehatan	2*)
KHUSUS	
1. Fisika	7
2. Biologi	7
3. Matematika	8
Total	42

*) Mata pelajaran Olah raga dan Pendidikan Kesehatan sebagai kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan matematika dan ilmu pengetahuan alam baik dalam bidang akademik maupun pendidikan professional. Program ini juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung maupun tidak langsung untuk bekerja di masyarakat.

c. Program Ilmu-Ilmu Sosial

MATA PELAJARAN	Jumlah Jam Pel
	Kelas
	III
Umum	
1. Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2. Pendidikan Agama	2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	3
4. Sejarah Nasional dan Dunia	2
5. Bahasa Inggris	5
6. Olah raga dan Pendidikan Kesehatan	2*)
KHUSUS	
1. Ekonomi	10
2. Sosiologi	6
3. Sistem Pemerintahan	6
4. Antropologi	6
TOTAL	42

*) Mata pelajaran Olah raga dan Pendidikan Kesehatan sebagai kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Program ini mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan social, baik dalam bidang pendidikan akademik maupun professional. Program ini juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat.

Penyusunan tujuan setiap mata pelajaran juga mendasarkan pada rumusan tujuan yang sudah ada dalam kurikulum sebelumnya.

Pada setiap mata pelajaran diberikan deskripsi mengenai pengertian, fungsi dan tujuan serta ruang lingkup isi mata pelajaran. Deskripsi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif yang ditujukan kepada terutama guru agar secara utuh mampu memahami hakekat dari setiap mata pelajaran yang

diampunnya. Dan dengan demikian menjadi jelas peran dan tanggungjawab guru untuk menjalankan tugas mengelola pembelajaran secara profesional. Deskripsi tersebut juga menjadi bahan yang informatif dalam reuvi atau pembahasan kurikulum, baik pada tingkat rapat pimpinan tingkat departemen, rapat pimpinan tingkat Balitbang dan rapat-rapat koordinasi dengan para pimpinan unit utama dan juga rapat teknis yang terdiri dari para ahli bidang studi/mata pelajaran dengan para guru dan pengawas sekolah.

Selain itu, dalam setiap mata pelajaran diberikan suatu catatan yang harus diperhatikan oleh guru. Catatan tersebut memuat hal-hal penting, seperti: bahwa materi yang tertuang dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) adalah minimal, guru dapat menambah atau memperkaya dengan mempertimbangkan kemajuan belajar siswa; dalam mengajar agar menggunakan dan memanfaatkan kondisi lingkungan yang sesuai (relevan) tujuan yang ingin dicapai; dan cara memilih dan menggunakan pelajaran (buku teks).

Dalam menyusun pengertian, fungsi dan tujuan, serta ruang lingkup setiap mata pelajaran mengacu pada Buku Landasan, Program, dan Pengembangan yang pada waktu itu buku tersebut masih dalam proses penyusunan juga, dan memperhatikan arahan pimpinan Pusbangkurandik.

Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP)

GBPP dalam Kurikulum 1994 Sekolah Dasar (SD) merupakan Lampiran II dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 061/U/1993 Tanggal 23 Februari 1993. GBPP adalah salah satu dokumen Kurikulum 1994 yang setiap hari menjadi pegangan, acuan, dan juga sumber utama bagi guru dalam membuat perencanaan kegiatan belajar-mengajar. Oleh karena itu, didalam GBPP diberikan informasi berupa deskripsi yang utuh dan komprehensif serta dengan bahasa yang lugas mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan serta ruang lingkup setiap mata pelajaran. Setelah deskripsi tersebut, diikuti dengan tujuan setiap kelas, dan setiap tujuan kelas diikuti tujuan pengajaran atau pembelajaran. Masing-masing tujuan pengajaran tersebut akan dapat dicapai melalui sejumlah pokok bahasan dan/atau sub pokok bahasan. Dalam setiap atau sejumlah pokok bahasan atau sub pokok

bahasan diberikan pula contoh-contoh penjabaran materi. Susunan materi GBPP yang demikian, yang tidak dituangkan dalam bentuk kolom-kolom (matriks) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi guru dalam memahami GBPP, sehingga akan memudahkan pula dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar serta dalam merancang dan melaksanakan penilaian. Banyaknya GBPP yang disusun adalah sejumlah mata pelajaran yang diberikan di SD, SMP, dan SMU, sebagaimana tertera dalam Buku Landasan, Program dan Pengembangan.

Beberapa Perampingan dan Penyempurnaan

Sejumlah pertimbangan yang melatar belakangi perampingan dan penyempurnaan kurikulum adalah terkait dengan: (a) beban belajar yang memberatkan peserta didik; dan (b) isi atau konten kurikulum untuk beberapa mata pelajaran yang kurang sesuai dengan kematangan atau kondisi psikis peserta didik. Isi atau konten kurikulum SD dan SMP harus benar-benar sesuai dengan kesiapan peserta didik dalam pengertian sesuai dengan perkembangan atau kondisi psikis peserta didik. Isi ataupun topik dalam mata-mata pelajaran tertentu, penyajiannya dalam kurikulum perlu ditunda dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi sejalan dengan kesiapan dan kematangan peserta didik. Sebelum perampingan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan terlebih dulu dilakukan kajian-kajian dan perbandingan antara kurikulum 1984 dengan rancangan kurikulum 1994. Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara kurikulum 1984 dengan kurikulum 1994. Hasil perbandingan tersebut nampak bahwa:

- (1) isi mata pelajaran atau pokok bahasan mata-mata pelajaran dalam kurikulum 1984 dan kurikulum 1994 pada umumnya sama, tetapi untuk mata pelajaran fisika, kimia dan biologi ditambah dengan bahasan mengenai aspek teknologi atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari konsep-konsep tertentu;

- (2) ada pengurangan beberapa pokok atau sub pokok bahasan dan juga penambahan beberapa pokok atau sub pokok bahasan penting (esential) yang tidak terdapat dalam kurikulum sebelumnya;
- (3) mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tidak diajarkan di kelas I dan II SD. Mata-mata pelajaran tersebut mulai diajarkan mulai kelas III SD;
- (4) muatan lokal ditentukan oleh daerah dalam hal ini oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan provinsi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Muatan lokal dapat terdiri atas beberapa mata pelajaran, seperti: kesenian kerajinan, berkebun, bahasa daerah, bahasa Inggris dan sebagainya. Bahasa Inggris dapat diajarkan mulai kelas IV SD sebagai muatan lokal untuk daerah-daerah tertentu sesuai keadaan dan kebutuhan. Pelajaran bahasa Inggris diajarkan mulai kelas IV SD dengan pertimbangan bahwa siswa telah memperoleh pelajaran bahasa Indonesia selama tiga tahun, dan diharapkan telah lancar dalam berbahasa Indonesia.
- (5) Topik atau pokok bahasa tertentu dari mata-mata pelajaran tertentu disempurnakan urutannya. Urutan topik atau pokok bahasan adalah yang sangat teknis, dan mendapat perhatian serius guru.
- (6) Di lapangan, urutan pokok bahasan yang tidak sesuai dengan kebiasaan guru mengajar sering dipermasalahkan. Padahal urutan pokok bahasan adalah hal yang *arbitrer*, yakni setiap guru dapat menata urutan sendiri yang sesuai dengan memperhatikan, antara lain: bahan prasyarat harus mendahului pokok bahasan yang diajarkan, bahan pelajaran yang mudah harus mendahului bahan pelajaran yang sukar, bahan pelajaran sederhana harus mendahului bahan pelajaran yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pembenahan urutan pokok bahasan atau sub pokok bahasan dalam Kurikulum 1994 dilakukan secara selektif.
- (7) Penyempurnaan GBPP Matematika, khususnya Matematika Sekolah dasar. Keluhan-keluhan yang muncul adalah: (1) bahan atau materi ajar

matematika di SD banyak mengandung konsep atau topik yang abstrak yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan siswa; (2) penggunaan simbol yang mewakili abstraksi bertingkat, seperti: U (union) artinya penggabungan dua atau lebih entitas, yang juga mewakili simbol + (penambahan), keduanya sama-sama abstrak, abstrak diwakili yang lebih abstrak; (3) jenis operasi (pengerjaan) tertentu yang tidak cocok diberikan di SD, kata operasi itu sendiri menjadi masalah bagi siswa SD, juga guru SD. Dengan memperhatikan permasalahan tersebut maka kurikulum mata pelajaran SD disederhanakan. Bentuk penyederhanaan matematika SD, antara lain: (1) matematika SD memberi penekanan pada kemampuan berhitung (aritmetika) dan diberikan latihan dalam bentuk mencongak serta pemecahan masalah (*problem solving*); (2) konsep-konsep yang abstrak tertentu, seperti : garis dan sinar garis tidak dibedakan tidak diperkenalkan; (2) sifat komutatif, asosiatif dan distributif tidak lagi diperkenalkan di SD.

- (8) Penyederhanaan kurikulum juga dilakukan agar memudahkan bagi siswa dan guru terkait dengan mata-mata pelajaran yang memiliki irisan (intersection) yang sering sulit memberi batasan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Yang membedakan sebenarnya adalah (3). penekanan dan pemberian konteks. Namun hal ini tidak mudah bagi guru apalagi siswa. Mata Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) diintegrasikan kedalam mata-mata pelajaran yang sesuai, yaitu Mata Pelajaran Sejarah dan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (9) mata pelajaran Bahasa Indonesia diperkaya dengan sastra Indonesia dan nam mata pelajaran menjadi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam beberapa kurikulum sebelumnya nama mata pelajaran ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Didalamnya terkandung bahan atau kajian tentang sastra

(10) Indonesia. Namun demikian, dalam pembelajaran di kelas banyak dikuluhkan oleh masyarakat dan terutama pengamat dan tokoh-tokoh sastra yang menyatakan bahwa pembelajaran sastra tidak berjalan seperti yang seharusnya. Pembelajaran sastra amat penting dalam pendidikan guna memberikan semangat ketauladan, kebaikan, budi atau budi pekerti yang halus (mengasah budi dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, pengabdian, semangat, sopan santun, keteguhan hati, dan ketauladanan dan sebagainya) sangat diperlukan dalam pendidikan, sejalan tujuan pendidikan nasional. Dalam pembelajaran sastra hanya sering kurang mendapat perhatian dari guru maupun peserta didik. Guna mendorong minat terhadap pembelajaran sastra, dalam kurun waktu tahun 1990-an telah diadakan "penggalakan" pembelajaran sastra yang dilakukan oleh para sastra, dan yang paling menonjol adalah penggalakan pembelajaran sastra Indonesia oleh Taufiq Ismail. Aktivitas ini dilaporkan kepada Mendikbud untuk mendapat tanggapan dan perhatian. Penggalakan pembelajaran sastra juga didukung pendaannya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam kurun waktu tersebut juga dilakukan studi atau kajian untuk mendata jenis-jenis bacaan sastra Indonesia dan mengidentifikasinya untuk menentukan jenis-jenis karya sastra dan kesesuaian untuk pembelajaran SD, SMP, dan SMU yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud bekerja sama dengan para tokoh sastrawan, Pusat Bahasa, dan para guru tertentu. Hasil identifikasi karya sastra ini lah yang menjadi bahan rujukan dalam menentukan materi sastra dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Kurikulum 1994.

(11) Diperkenalkan mata pelajaran baru di SMU, yaitu: mata pelajaran Sejarah Budaya dan mata pelajaran Antropologi (sebelumnya antropologi dan sosiologi adalah dalam satu mata pelajaran).

(12) Dalam kurikulum 1994 diterapkan sistem catur wulan, yang membagi satu tahun pelajaran menjadi tiga penggal masa belajar. Hal ini dilakukan antara lain agar masa pembelajaran tidak terlalu panjang atau lama sehingga dalam evaluasi hasil belajar dalam satu tahun pelajaran lebih sering dilakukan daripada dengan sistem semester. Dengan menggunakan sistem catur wulan diharapkan siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti evaluasi akhir catur wulan karena rentang masa belajar dengan pelaksanaan evaluasi hasil belajar yang tidak terlalu jauh jarak waktunya.

LATAR BELAKANG DAN LANDASAN PENGEMBANGAN “KURIKULUM 2004”

Pemikiran yang melandasi mengenai pengembangan kurikulum 2004 tidak dapat dilepaskan dengan konteks reformasi pendidikan nasional yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomo: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menjadi acuan dan sumber mereformasi pendidikan nasional yang mencakup seluruh komponen dalam sistem pendidikan nasional, termasuk kurikulum. Reformasi pendidikan tersebut dinyatakan sebagai berikut. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara professional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat. Selanjutnya, pendidikan juga diarahkan untuk, antara lain: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat; dan (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral (Penjelasan UU No:20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi merupakan amanat dari Undang-undang Nomor; 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana dimuat dalam penjelasan UU tersebut yang menyatakan: Strategi pembangunan

pendidikan nasional ditempuh, antara lain melalui: (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; dan (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

Namun demikian, perlu diketahui bahwasanya kurikulum berbasis kompetensi sudah mulai dikembangkan oleh Pusat Kurikulum Balitbang sejak tahun 2000. Hasil pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini pernah diuji cobakan oleh Pusat Kurikulum Balitbang dan Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di sejumlah sekolah di beberapa provinsi.

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi juga merupakan upaya penyempurnaan kurikulum sebelumnya (Kurikulum 1994). Kurikulum 1994 perlu disesuaikan dengan perubahan dan tuntutan jaman. Penyesuaian kurikulum nampak, antara lain pada: penerapan sistem kredit semester, dan penerapan penjurusan di kelas II SMU.

A. Latar Belakang

Penyusunan “Kurikulum 2004” yang berdasarkan pada kompetensi dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan masyarakat berupa harapan agar pendidikan mampu mengembangkan potensi peserta didik menjadi kompeten dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan pribadinya serta kehidupan sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Dalam “Kurikulum 2004”, kompetensi dirumuskan dalam bentuk hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik melalui pengalaman belajar yang berkesinambungan, menyeluruh, dan berkelanjutan. Akumulasi kompetensi yang dikuasai peserta didik melalui pengalaman belajar dari seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dinamakan kompetensi lintas kurikulum. Kompetensi lintas kurikulum merefleksikan kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan di masyarakat dan kemampuan dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Kompetensi Lintas Kurikulum yang dimaksud mengacu pada pengembangan kehidupan pribadi , masyarakat dan bangsa yang beradab dan bermartabat meliputi kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1. Memiliki keyakinan dan kemampuan menjalankan kewajiban agamanya, kemampuan menghargai pemeluk dan agama lain serta memberikan rasa aman kepada setiap orang untuk melaksanakan kewajiban agamanya.
2. Kemampuan membaca dan memahami informasi dari setiap sumber bacaan, menggunakan bahasa dan medium lainnya untuk mengkomunikasikan gagasan, perasaan dan berinteraksi dengan orang lain serta memiliki kebiasaan/kesenangan membaca.
3. Menerapkan ilmu dan kemampuannya dalam memilih konsep, prinsip, prosedur, dan teori dari suatu ilmu serta memadukan konsep-konsep, prinsip, prosedur, dan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kemampuan memilih, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi dalam mencari dan mengkomunikasikan informasi
5. Kemampuan memahami, menghargai, memelihara dan mengembangkan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan alam dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai masyarakat.
6. Kemampuan berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya dan bersaing menghadapi tantangan global berdasarkan pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, geografis, dan historis masyarakat setempat dan bangsa .
7. Memiliki apresiasi terhadap karya seni , budaya, dan intelektual serta kreatifitas dalam menerapkan nilai-nilai luhur masyarakat dan bangsa.
8. Kemampuan berpikir logis, kreatif, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi diri dan lingkungan serta peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terduga dan tidak terduga.
9. Memiliki motivasi belajar, percaya diri, dan keinginan untuk selalu meningkatkan kemampuan.
10. Kemampuan bekerja mandiri dan kerja sama dengan orang lain.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Kurikulum 2004 adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa kurikulum perlu dikembangkan berdasarkan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Proses pengembangan Kurikulum 2004 yang telah dimulai sejak tahun 1999 mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah yang berlaku, dan tuntutan terhadap penyederhanaan dan perampingan materi pelajaran. Pengembangannya diprakarsai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Direktorat Jenderal Olah Raga, perguruan tinggi, serta melibatkan guru, kepala sekolah, pengawas, dan para pembina pendidikan pada dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Naskah “Kurikulum 2004” yang dihasilkan pada tahun 2000 telah diuji coba penerapannya di beberapa sekolah (SD, SMP, SMA) yang terpilih sebagai tempat pelaksanaan terbatas (piloting) “Kurikulum 2004” sejak tahun 2001/2002. Penentuan sekolah tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan di masing-masing kabupaten/kota bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan. Piloting juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Berbagai kritik dan saran perbaikan dalam masa piloting dijadikan masukan untuk menyempurnakan naskah “Kurikulum 2004”.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (PP, Bab III Standar nasional Pendidikan pasal 4)

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (PP 2005, Bab II pasal 5 ayat 1). Kerangka dasar disusun mengacu

pada pasal tersebut dan secara sistematis diatur dalam Kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Perbaikan alinea diatas menjadi sbb:

Perangkat-perangkat standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (PP 2005, Bab II pasal 5 ayat 1) pada pelaksanaan “Kurikulum 2004” untuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal, Pendidikan Khusus, Pendidikan Luar Sekolah (Paket A, Paket B, dan Paket C), dan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan dibuat secara tersendiri dan komprehensif sesuai dengan karakteristik masing-masing.

B. Kerangka Dasar Kurikulum

1. Landasan

Perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global termasuk dalam objek ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum yang mampu menghasilkan individu, masyarakat, dan bangsa yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut.

Atas dasar tuntutan mewujudkan masyarakat seperti itu diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, perilaku, pengetahuan, kesehatan, keterampilan dan seni. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Dengan demikian, peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang terus berkembang melalui pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan

penyempurnaan kurikulum sekolah dan madrasah yang berbasis pada kompetensi peserta didik.

Penyempurnaan kurikulum juga dilandasi oleh paradigma nasional yang dituangkandalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1).UUD 1945 dan perubahannya; 2) Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN; 3) Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4) Peraturan Pemerintah nomor: 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 5) PP nomor: 19 tahun 2005 Bab I Pasal 1 ayat 15 yang berbunyi: Kerangka dasar kurikulum adalah kisi-kisi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum efektif dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan; 6) Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 8) Peraturan dan perundangan lain yang berlaku.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan materi lokal kurikulum, diversifikasi kurikulum dan pengelolaan pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan daerah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan landasan hukum pengembangan “kurikulum 2004” adalah sebagai berikut:

Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

1. Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah pasal 5 ayat 1 PP berbunyi bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan

2. Pasal 36 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional dan tujuan pendidikan, serta memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan potensi peserta didik;
3. Pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan bahan pelajaran dan kajian;
4. Pasal 38 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
5. Pasal 38 Ayat (2) yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

2. Pengertian

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (PP nomor: 19 tahun 2005 tentang SNP Bab 1 pasal 1 ayat 14). Sesuai dengan pengertian tersebut, “Kurikulum 2004” berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan cara pencapaian kompetensi yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah, sekolah dan madrasah.

Standar Kompetensi lulusan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan

yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. (PP no. tahun.. Bab 1 pasal 1 ayat 5). Lebih lanjut dalam kurikulum ini kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir, bersikap dan bertindak. Secara lebih operasional lagi kompetensi diartikan sebagai kebiasaan berpikir, bersikap, dan bertindak yang merupakan wujud dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai hasil belajar peserta didik. Kompetensi dikenali melalui sejumlah indikator yang dapat diukur dan atau diamati. Kompetensi dicapai melalui pengalaman belajar peserta didik dalam mengkaji bahan pelajaran (substansi, proses, tindakan, nilai) yang dikembangkan secara kontekstual dan berwawasan nasional. Pada pendidikan umum, kompetensi ditetapkan berdasarkan identifikasi kemampuan yang diperlukan masyarakat dan tradisi keilmuan. Pada pendidikan kejuruan, kompetensi ditetapkan berdasarkan standar kompetensi yang berlaku di dunia kerja yang akan dimasuki para lulusan. Rumusan kompetensi dikembangkan secara berkesinambungan dan bertahap. Artinya, rumusan kompetensi yang dikembangkan untuk peserta didik Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal dilanjutkan dan ditingkatkan kompleksitasnya di Kelas I sampai dengan Kelas XII sehingga terjadi suatu rangkaian pengembangan kemampuan yang bertahap, berkelanjutan, dan konsisten seiring dengan perkembangan psikologis peserta didik.

3. Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum

1. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum

“Kurikulum 2004” dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kompetensi dan materi kurikulum dikembangkan berdasarkan keharmonisan antara kepentingan nasional untuk membangun kehidupan berbangsa yang kuat dan bermartabat dengan kepentingan daerah baik kepentingan sosial-budaya-ekonomi setempat maupun dalam kontribusinya terhadap pengembangan kehidupan nasional. Dengan prinsip ini kepentingan nasional tidak boleh diabaikan demi kepentingan

daerah dan sebaliknya kepentingan daerah tidak boleh diabaikan demi kepentingan nasional.

- b. Keseimbangan dalam pengembangan spiritual/religiusitas, intelektual, personal/emosional, sosial/moral, fisik, etika, logika, estetika, dan kinestetika.

Kurikulum dikembangkan untuk menghasilkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang memiliki sikap dan perilaku religius yang sesuai dengan ajaran agamanya, kemampuan intelektual tinggi, memiliki sopan santun dan adab yang luhur, peka terhadap lingkungan, kritis, kreatif, bertanggung jawab, mandiri, dan mampu bekerjasama, memiliki rasa keindahan dan seni yang bermanfaat serta kesehatan fisik yang prima.

- c. Responsif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kompetensi dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat dan oleh karena itu kurikulum selalu berada di baris terdepan dalam memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d. Berpusat pada kepentingan peserta didik dan lingkungan terdekat.

Kompetensi dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral dan kepentingan serta kemampuan peserta didik untuk mengembangkan dirinya dalam keterampilan diri (personal skills), keterampilan berpikir rasional (thinking skills), keterampilan sosial (social skills), keterampilan akademik (academic skills), keterampilan vokasional (vocational skills), menjadi kepedulian utama dalam proses pengembangan kurikulum.

- e. Belajar adalah proses individual dan sosial.

Kompetensi menjadi dasar dalam mengembangkan proses belajar dalam bentuk-bentuk kegiatan (1) belajar untuk memahami, (2) belajar untuk berbuat kreatif, (3) belajar untuk hidup dalam kebersamaan, dan (4) belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri. Pada dasarnya kompetensi dikembangkan oleh siswa sendiri dan akan berkembang lebih

jauh melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, pembelajaran seharusnya memungkinkan peserta didik berinteraksi baik dengan guru, peserta didik lainnya, maupun lingkungan sosial lainnya.

f. **Komprehensif dan Berkesinambungan**

Kompetensi mencakup keseluruhan dimensi kemampuan dan substansi yang disajikan secara berkesinambungan mulai dari usia Taman Kanak-kanak atau Raudhatul Athfal sampai dengan pendidikan menengah. Kemampuan mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, pola pikir dan perilaku. Substansi mencakup norma, nilai-nilai, dan konsep, serta fenomena dan kenyataan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

g. **Belajar Sepanjang Hayat**

Kompetensi dikembangkan dengan prinsip bahwa kurikulum harus mengembangkan proses pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat.

h. **Diversifikasi**

Kompetensi dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam implementasi kurikulum di setiap lembaga pendidikan, digunakan prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Sekolah adalah bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial budaya dimana sekolah itu berada. Dengan menerapkan prinsip ini dalam mengembangkan kurikulum efektif dan silabus, guru harus memperhatikan kekhasan lembaga pendidikannya dan nilai-nilai sosial-budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu fasilitas yang dimiliki sekolah dan yang tersedia di masyarakat harus dapat dimanfaatkan tetapi proses pendidikan yang dialami peserta didik dalam menguasai kompetensi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat. Melalui prinsip

ini guru diharapkan dapat melaksanakan proses pendidikan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada di masyarakat, dan mengubah nilai-nilai negatif melalui kompetensi yang dimiliki peserta didik.

- b. Perlakuan sama kepada setiap peserta didik dan tidak dibedakan berdasarkan status sosial, ekonomi, agama dan gender. Prinsip ini menghendaki guru memberikan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Diperlakukan sama tidak didasarkan pada kemampuan awal yang dimiliki setiap siswa sama tetapi diberi kesempatan yang sama dalam menguasai kompetensi. Oleh karena itu mereka yang memerlukan bimbingan guru lebih banyak harus mendapatkan apa yang diperlukannya.

- c. Berpusat Pada Peserta Didik

Belajar adalah proses yang terjadi pada peserta didik dan oleh karena itu peserta didik harus diberikan waktu yang banyak untuk mencari informasi dari buku dan sumber lain yang tersedia di sekolah dan masyarakat, mengolah informasi dalam berbagai bentuk, mengkomunikasikan pendapatnya mengenai informasi yang telah diolah secara lisan maupun tulisan, dan menerapkan apa yang telah diperoleh dari informasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Berpusat pada peserta didik dipahami juga sebagai pemberian pelayanan yang memadai pada peserta didik khususnya dalam mengakomodasi kecepatan belajar yang beragam pada setiap peserta didik.

- d. Pendekatan Menyeluruh dan Kemitraan

Semua pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal, kelas I sampai dengan XII. Pendekatan yang digunakan dalam mengorganisasikan pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai bidang studi melalui tema, pada jenjang yang memungkinkan. Keberhasilan penciptaan pengalaman belajar yang memadai menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta

didik, guru, sekolah dan madrasah, orangtua, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, dan masyarakat.

e. Kesatuan dalam Kebijakan dan Kontekstual dalam Pelaksanaan

Standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah dan madrasah. Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi berdasarkan pada satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, serta bertaraf internasional.

4. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Rumusan tujuan untuk masing-masing satuan pendidikan mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pemerintah yang menyertainya.

Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia; mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis; dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia; mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis; menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; memiliki etos dan budaya kerja; dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

E. Jalur dan Jenjang Pendidikan serta Jenis Sekolah dan Madrasah

Jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jalur yang terdiri atas subjalur formal standar dan sub jalur formal mandiri (PP Nomor: 19 tahun 2005 tentang SNP, Psl 1 ayat 1).

Subjalur formal standar adalah bagian dari jalur pendidikan formal yang menerapkan standar kompetensi yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Tema utama dari subjalur ini adalah pemerataan pendidikan dan keadilan akses untuk memperoleh pendidikan yang mutunya sesuai dengan

standar nasional pendidikan. Pendidikan pada subjalur ini dirancang terutama bagi mereka yang bersekolah dengan harapan untuk mempermudah mencari pekerjaan. (PPSNP, Psl I ayat 2).

Subjalur formal mandiri adalah bagian dari jalur pendidikan formal yang sudah mampu mandiri dan menerapkan standar kompetensi yang lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan standar nasional pendidikan. Tema utama dari subjalur ini adalah mutu dan keunggulan kompetitif pada tingkat nasional dan global. Pendidikan pada subjalur ini diselenggarakan secara mandiri tanpa menutup kemungkinan bantuan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Desain pendidikan dirancang terutama bagi mereka yang mampu bersaing untuk memperoleh pendidikan bermutu dan bersedia membayar biayanya. Subjalur ini membuka akses kepada peserta didik yang kurang mampu secara financial tetapi memiliki kemampuan akademik yang memadai, melalui bea siswa atau subsidi lainnya. Satuan pendidikan pada jalur ini bisa berbentuk sekolah umum/madrasah atau sekolah/madrasah kejuruan

(PP Nomor: 19 tahun 2005 tentang SNP, Pasal I ayat 3).

Jenjang pendidikan terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal dan nonformal. Dalam setiap jenjang dan jalur sub jalur pendidikan terdapat beberapa jenis sekolah dan madrasah sebagaimana diuraikan berikut ini.

Sebelum jenjang Pendidikan Dasar, peserta didik dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung sejak anak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal pada usia 4 - 6 tahun berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau Taman Kanak-kanak Khusus (TKKh) atau Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Dasar berlangsung selama 9 tahun, yaitu mulai dari Kelas I hingga Kelas IX. Di jalur sekolah dan madrasah, Pendidikan Dasar dimulai dari Kelas I sampai Kelas VI Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Dasar Khusus (SDKh) dan

Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan dilanjutkan mulai Kelas VII sampai Kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Pertama Khusus (SMPKh) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Di jalur nonformal, Paket A setara dengan SD dan Paket B setara dengan SMP.

Pendidikan Menengah berlangsung selama 3 tahun setelah siswa lulus pendidikan dasar, yaitu mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Di jalur sekolah dan madrasah, Pendidikan Menengah terdiri atas: (1) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) yang mengutamakan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan (2) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Atas Khusus (SMA Kh) yang mengutamakan siswa untuk memasuki dunia kerja. Di jalur nonformal, Paket C setara dengan SMA.

STANDAR ISI KURIKULUM

A. Kompetensi Tamatan

Setelah mengikuti program Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal, anak memiliki kompetensi sebagai berikut:

- Mulai mengenali dan membiasakan perilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini; Menunjukkan sikap positif tentang diri ; Kemampuan untuk menolong diri sendiri; Menunjukkan sikap dan perilaku rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. ; Mampu berinteraksi secara lisan dan perbuatan yang santun kepada orang lain ; Mampu berinteraksi, mencintai dan memelihara alam sekitar.; Menunjukkan kemampuan berpikir runtut dan kreatif; Menyenangi seni dan keindahan.; Membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat.

Kompetensi Tamatan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagai berikut:

- Mengenali dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini.; Menunjukkan pemahaman positif tentang diri dan percaya diri ; Mampu menolong dan menjaga diri sendiri; Menunjukkan sikap dan perilaku rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.; Mampu berinteraksi secara lisan dan perbuatan yang santun dengan orang lain ; Mampu berinteraksi, mencintai dan peduli terhadap lingkungan.; Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif; Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan sikap secara lisan dan tertulis; Mampu menghargai dan mengekspresikan diri melalui seni; Membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat.

Kompetensi Tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai berikut:

- Memahami dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan.;
- Menunjukkan kemampuan diri, percaya diri, serta kemampuan untuk belajar secara mandiri;

- Memahami dan menerapkan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan; Menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara santun; Memahami hak dan kewajiban dirinya dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat ; Menghargai pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya ; Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab; Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, memecahkan masalah, Berkemampuan berkomunikasi melalui berbagai cara secara efektif; Menyenangi dan menghargai keindahan melalui berbagai ekspresi; Menjalankan pola hidup bersih, bugar, dan sehat; Menunjukkan sikap dan perilaku rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.

Kompetensi Tamatan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut:

- Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan; Menunjukkan kemampuan dan rasa percaya diri, serta kemampuan untuk belajar secara mandiri, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, serta kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri; Memiliki nilai kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan rasa aman, serta mengokohkan persatuan dan kesatuan; Menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara santun; Memiliki kemampuan berkarya secara produktif, kompetitif, koperatif; Mencintai lingkungan dan mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggungjawab; Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, inovatif, dan kreatif dalam memecahkan masalah; Kemampuan berkomunikasi sesuai dengan konteksnya melalui berbagai media termasuk teknologi informasi; Menyenangi dan menghargai keindahan karya seni; Mampu berolah raga, menjaga kesehatan, membangun ketahanan dan kebugaran jasmani;
- Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan akademik, serta kecakapan hidup untuk belajar lebih lanjut/bermasyarakat.

Kompetensi Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan adalah sebagai berikut:

- Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan; Menunjukkan kemampuan diri, percaya diri, bertanggung jawab terhadap perbuatannya, serta kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri; Memiliki nilai kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan rasa aman, serta kemampuan mengokohkan persatuan dan kesatuan; Menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara santun, Memiliki kemampuan untuk berkarya secara produktif, kompetitif, dan koperatif; Mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggungjawab; Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, inovatif, dan kreatif dalam memecahkan masalah ; Mampu berkomunikasi sesuai dengan konteksnya melalui berbagai media termasuk teknologi informasi; Menyenangi dan menghargai keindahan kreasi dan ekspresi seni; Mampu berolah raga, menjaga kesehatan, membangun ketahanan dan kebugaran jasmani; Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis; Menguasai kecakapan hidup, kompetensi/keahlian yang terstandar sesuai dengan tuntutan masyarakat/dunia kerja.

B. Kompetensi Bahan Kajian

Bahan Kajian merupakan penjabaran dari standar isi yang mencakup kajian yang dibakukan dalam bentuk kompetensi. Kompetensi bahan kajian menjadi acuan dalam penyusunan kompetensi mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan.

Kompetensi bahan kajian dicapai melalui sepuluh bahan kajian yang berlaku mulai dari SD, SDKh, dan MI; SMP, SMPKh, dan MTs; serta SMA, SMAKh, MA, SMK, dan MAK. Kesepuluh bahan kajian tersebut yaitu: 1) Pendidikan Agama; 2) Pendidikan Kewarganegaraan; 3) Bahasa; 4) Matematika; 5) Ilmu Pengetahuan Alam; 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; 7) Seni dan Budaya; 8)

Pendidikan Jasmani dan Olah Raga; 9) Keterampilan/Kejuruan; dan 10) Muatan Lokal.

Kompetensi Bahan Kajian dirumuskan dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dokumen Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Isi Kurikulum, dan Pengelolaan Kurikulum.

C. Kompetensi Mata Pelajaran

Mata pelajaran memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik di kelas dan satuan pendidikan tertentu sesuai dengan tingkatan pencapaian hasil belajarnya. Tolok ukur kompetensi dikemukakan dalam indikator.

Bahan kajian dalam mata pelajaran dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- (1) Perkembangan psikologis dan fisik anak;
- (2) Kebermanfaatan atau kegunaan bagi anak;
- (3) Keterkaitannya dengan kompetensi;
- (4) Kelanggengan;
- (5) Disiplin keilmuan;
- (6) Dapat dipelajari

Pengorganisasian bahan kajian dalam mata pelajaran dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

- 1) keterkaitan suatu bahan kajian dengan bahan kajian lainnya;
- 2) ketersediaan waktu ;
- 3) beban belajar peserta didik;
- 4) tradisi berlaku

Pengorganisasian kesepuluh bahan kajian ke dalam mata pelajaran untuk SD dan MI adalah sebagai berikut:

Pendidikan Agama; Pendidikan Kewarganegaraan; Ilmu Pengetahuan Sosial; Bahasa Indonesia; Matematika; Ilmu Pengetahuan Alam; Kerajinan Tangan dan Kesenian; Pendidikan Jasmani

Pengorganisasian kesepuluh bahan kajian ke dalam mata pelajaran untuk SMP dan MTs adalah sebagai berikut: Pendidikan Agama; Pendidikan Kewarganegaraan; Ilmu Pengetahuan Sosial; Bahasa dan Sastra Indonesia ; Bahasa Inggris; Matematika; Ilmu Pengetahuan Alam; Kesenian; Pendidikan Jasmani ; Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengorganisasian kesepuluh bahan kajian ke dalam mata pelajaran untuk SMA dan MA adalah sebagai berikut: Pendidikan Agama; Pendidikan Kewarganegaraan; Bahasa dan Sastra Indonesia; Bahasa Inggris; Matematika; Kesenian; Pendidikan Jasmani; Sejarah; Geografi; Ekonomi; Sosiologi dan Antropologi ; Fisika; Kimia; Biologi; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Keterampilan; Bahasa Asing

Kompetensi Mata Pelajaran dirumuskan dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dokumen Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Isi Kurikulum, dan Pengelolaan Kurikulum.

D. Silabus Pembelajaran

Silabus Pembelajaran merupakan penjabaran kompetensi dan materi pokok bahasan ke dalam rincian kegiatan dan strategi pembelajaran, materi ajar, kegiatan dan strategi penilaian, dan alokasi waktu per mata pelajaran di suatu kelas pada suatu satuan pendidikan. Silabus pembelajaran dikembangkan untuk setiap mata pelajaran yang tercantum dalam Kerangka Dasar Kurikulum.

Silabus Pembelajaran disusun oleh guru yang bertanggungjawab mengajar mata pelajaran tersebut di suatu sekolah atau oleh tim, sebagai upaya pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah di bawah bimbingan kepala sekolah bersama dengan komite sekolah, dan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.

C. STRUKTUR KURIKULUM

Struktur Kurikulum SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari :

- a. kelompok pendidikan keimanan dan ketakwaan;
- b. kelompok pendidikan budi pekerti dan kepribadian

- c. kelompok pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. kelompok pendidikan estetika
- e. kelompok pendidikan jasmani dan kesehatan

(Pasal 7 ayat 1)

Struktur kurikulum diatas kemudian diatur lebih lanjut dan disistematikakan dalam cakupan : (1) mata pelajaran, (2) kegiatan khusus, dan (3) alokasi waktu. Mata pelajaran mengutamakan kegiatan instruksional yang terjadwal dan berstruktur. Kegiatan khusus mengutamakan kegiatan pembentukan dan pengendalian perilaku yang diwujudkan dalam kegiatan rutin, spontan, dan pengenalan unsur-unsur penting kehidupan masyarakat.

Kegiatan khusus dimaksudkan untuk membudayakan nilai-nilai positif dalam praktik kehidupan siswa sebagai perwujudan dari 4 pilar pendidikan, yakni

- (1) belajar untuk memahami;
- (2) belajar untuk berbuat kreatif;
- (3) belajar untuk hidup dalam kebersamaan; dan
- (4) belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkesinambungan mulai dari pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah. Pada pendidikan taman kanak-kanak dan raudhatul athfal serta pendidikan dasar kegiatan khusus ini diselenggarakan melalui kegiatan terprogram yang diberikan alokasi waktu secara khusus. Sedangkan pada sekolah menengah atas dan yang sederajat kegiatan ini diselenggarakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang tidak diberikan alokasi waktu secara khusus.

A. Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal

Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) merupakan bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. TK dan RA bukan persyaratan untuk memasuki SD dan MI. Periode belajar di TK dan RA adalah 1 tahun (TK-A dan RA-A atau TK-B dan RA-B) atau 2 tahun (TK-A dan RA-A serta TK-B dan RA-B). Struktur kurikulum di TK dan RA memuat dua bidang pengembangan, yaitu Pengembangan Pembiasaan dan

Pengembangan Kemampuan Dasar. Kedua bidang pengembangan tersebut serta alokasi waktunya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur Kurikulum Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal

Bidang Pengembangan		Alokasi Waktu
A. Pembiasaan	1. Moral dan Nilai-nilai Agama	Pendekatan T E M A T I K
	2. Sosial, Emosional, dan Kemandirian	
B. Kemampuan Dasar	1. Berbahasa	
	2. Kognitif	
	3. Fisik/Motorik	
	4. Seni	
Alokasi Waktu per Minggu		15 Jam

Penjelasan untuk TK dan RA:

- 1) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu. Jam belajar efektif per hari adalah 2,5 jam (150 menit); per minggu adalah 15 jam pelajaran (900 menit); dan per tahun adalah 510 jam (30.600 menit).
- 2) Pengelolaan kegiatan yang mendorong/mendukung Pembiasaan dan Pengembangan Kemampuan Dasar dengan menggunakan pendekatan tematik diorganisasikan sepenuhnya oleh penyelenggara TK dan RA.
- 3) Penjelasan teknis pendekatan tematik diatur dalam pedoman tersendiri.

Struktur Kurikulum untuk TK Khusus disesuaikan dengan jenis kelainan masing-masing.

B. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

Struktur Kurikulum untuk SD Khusus (SDKh) disesuaikan dengan jenis kelainan masing-masing.

Tabel 2 diatas diubah menjadi

Tabel 2. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	I dan II	III s.d. VI	
a. Mata Pelajaran			
BUDI PEKERTI & KEPERIBADIAN			
1. Pendidikan Agama		12,5% - 17,5%	
2. Pendidikan Kewarganegaraan		7,5% - 12,5%	
IPTEK			
3. Bahasa Indonesia + Mulok	PENDEKATAN TEMATIK	47,5% - 52,5%	
4. Matematika + Mulok			
5. Ilmu Pengetahuan Alam + Mulok			
6. Ilmu Pengetahuan Sosial + Mulok			
ESTETIKA			
7. Estetika (Kerajinan Tangan dan Kesenian) + Mulok			12,5% - 17,5%
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN			
8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan + Mulok			7,5% - 12,5%
Jumlah:	862 jam /thn*	1020 jam /thn**	

Penjelasan untuk kelas I dan II

1. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembiasaan dimaksudkan untuk mendorong/mendukung penerapan nilai-nilai dalam bentuk perilaku/perbuatan. Kegiatan ini sepenuhnya diorganisasikan oleh sekolah dan madrasah.
2. Penjelasan teknis pendekatan tematik diatur dalam pedoman tersendiri.
3. Alokasi waktu total yang disediakan adalah 862 jam pelajaran per tahun. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau

mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah.

4. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 35 menit. Jam tatap muka per minggu per minggu diatur oleh sekolah sesuai dengan proporsi rentang waktu (%) yang ada
5. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu. Jumlah jam tatap muka per tahun disesuaikan dengan kondisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing
6. Alokasi waktu diatur sesuai dengan proporsi (prosentase) yang dijelaskan di tabel.
7. Sekolah dan madrasah dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam setiap mata pelajaran sesuai dengan kemampuannya.
8. Struktur SD untuk sub jalur formal mandiri ditambah muatan kurikulum internasional.

Penjelasan untuk Kelas III, IV, V, dan VI:

1. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembiasaan dimaksudkan untuk mendorong/mendukung penerapan nilai-nilai dalam bentuk perilaku/perbuatan. Kegiatan ini sepenuhnya diorganisasikan oleh sekolah dan madrasah.
2. Alokasi waktu total yang disediakan adalah 1020 jam pelajaran per tahun. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah.
3. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 40 menit. Jam tatap muka per minggu per minggu diatur oleh sekolah sesuai dengan proporsi (%) yang ada
4. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu.

5. Muatan Lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah. Kegiatan atau bahan kajian dan pelajarannya diatur sepenuhnya oleh daerah atau sekolah.
6. Sekolah dan madrasah dapat memberikan mata pelajaran Bahasa Inggris mulai kelas IV sesuai dengan kemampuan.
7. Sekolah dan madrasah dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kemampuan.
8. Sekolah dan madrasah bertaraf internasional dapat menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa asing lain sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

C. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah

Struktur kurikulum untuk SMP dan MTs memuat jumlah dan jenis mata pelajaran yang ditempuh dalam satu periode belajar selama 3 tahun mulai dari Kelas VII, VIII, dan IX. Struktur kurikulum yang dimaksud adalah sebagaimana terinci dalam tabel 3.

Tabel 3. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
a. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	5	5	5
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
8. Kesenian	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani	3	3	3

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
b. Muatan Lokal	*)	*)	*)
c. Kegiatan Pembiasaan	*)	*)	*)
Jumlah	34 - 38	36 - 40	36 - 40

*) Diberikan dalam bentuk kegiatan di dalam dan/atau di luar kelas maksimal

2 jam pelajaran per minggu

Perbaikan

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
	VII	VIII	IX	Jumlah
Mata Pelajaran pada kelompok pendidikan				
A. Kelompok pendidikan keimanan dan ketaqwaan				12,5% – 17,5%* 13.5 – 21 sks
1. Pendidikan Agama (termasuk budi pekerti)				
B. Kelompok Pendidikan Budi Pekerti & Kepribadian				7.5% - 12,5%* 8.1 – 15 sks
2. Pendidikan Kewarganegaraan				
3. Bahasa Indonesia				
C. Kelompok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				47,5% – 52,5%* 51.3 – 63 sks
7. Bahasa Asing Lainnya + mulok yang relevan				
8. Matematika + mulok yang relevan				
9. Ilmu Pengetahuan Alam + mulok yang relevan				
10. Ilmu Pengetahuan Sosial + mulok yang relevan				
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi + mulok yang relevan				

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
	VII	VIII	IX	Jumlah
D. Kelompok Estetika				12,5% - 17,5%* 13.5 – 21 sks
12. Bahasa Daerah				
13. Seni & Budaya+ mulok yang relevan				
E. Jasmani dan Kesehatan				7,5% - 12,5%* 8,1 – 15 sks
14. Pendidikan Jasmani & Olahraga				
Jumlah (beban belajar)	408 jp per tahun	408 jp per tahun	408 jp per tahun	1224 jp @ 45mnt (psl 11 ayt 24,25) 108 - 120 sks** 90% - 100%

SKS ; Sistem Kredit Semester,* PP, pasal 11 ayat 13 ,**PP, Pasal 11 ayat 11

Penjelasan untuk Kelas VII - IX:

1. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembiasaan dimaksudkan untuk mendorong/mendukung penerapan nilai-nilai dalam
2. bentuk perilaku/perbuatan. Kegiatan ini sepenuhnya diorganisasikan oleh sekolah dan madrasah. Kegiatan pembiasaan ini bukan mata pelajaran.
3. Alokasi waktu total kelas VII yang disediakan adalah 34 s.d 38 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah.

4. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. Jam tatap muka per minggu adalah 34 s.d 38 jam pelajaran. Jumlah jam belajar per tahun 1.156 s.d 1.520 jam pelajaran (52.020 s.d. 68.400 menit).
5. Alokasi waktu total kelas VIII - IX yang disediakan adalah 36 - 40 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah.
6. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. Jam tatap muka per minggu adalah 36 s.d 40 jam pelajaran. Jumlah jam belajar per tahun 1.224 s.d 1.600 jam pelajaran (55.080 s.d. 72.000 menit).
7. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial dapat diajarkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara terintegrasi yang diatur sepenuhnya oleh sekolah.
8. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembiasaan dimaksudkan untuk mendorong/mendukung penerapan nilai-nilai dalam bentuk perilaku/perbuatan. Kegiatan ini sepenuhnya diorganisasikan oleh sekolah dan madrasah. Penjelasan teknis kegiatan tersebut diatur dalam pedoman tersendiri.
9. Muatan Lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah. Kegiatan atau bahan kajian dan pelajarannya diatur sepenuhnya oleh daerah atau sekolah.
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi dipilih oleh sekolah, madrasah dan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, sekolah, madrasah dan daerah.

Struktur Kurikulum untuk SMP Khusus (SMPKh) disesuaikan dengan jenis kelainan masing-masing.

D. Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah

Program studi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah terdiri atas Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Bahasa. Kelas X merupakan program bersama yang diikuti oleh semua peserta didik. Pada Kelas XI dan XII dikelompokkan ke dalam

tiga program studi, yaitu: Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Bahasa; selain itu Madrasah Aliyah dapat membuka program studi Keagamaan. Mata pelajaran keagamaan di Madrasah Aliyah ditentukan dan dikembangkan oleh Departemen Agama.

Program studi Ilmu Alam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki karakter, kompetensi, dan kecakapan hidup melalui pemahaman prinsip-prinsip alam. Program studi Ilmu Sosial mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki karakter, kompetensi, dan kecakapan hidup melalui pemahaman prinsip-prinsip kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Program studi Bahasa mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki karakter, kompetensi, dan kecakapan hidup melalui pemahaman prinsip-prinsip multikultural dan komunikasi bahasa. Struktur kurikulum program studi Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Bahasa memuat jumlah dan jenis mata pelajaran serta alokasi waktu disajikan pada Tabel 4 sampai Tabel 7.

Tabel 4. Struktur Kurikulum Kelas X

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu	
	Smt 1	Smt 2
1. Pendidikan Agama	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4
5. Matematika	4	4
6. Kesenian	2	2
7. Pendidikan Jasmani	2	2
8. Sejarah	1	2
9. Geografi	2	1
10. Ekonomi	2	2
11. Sosiologi	2	2
12. Fisika	3	3

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu	
	Smt 1	Smt 2
13. Kimia	3	3
14. Biologi	3	3
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
16. Keterampilan/Bahasa Asing	*	*
Jumlah	38	38

Penjelasan untuk Kelas X:

1. Alokasi waktu total yang disediakan untuk kelas X adalah 38 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah.
2. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. Jam tatap muka per minggu adalah 38 jam pelajaran 1.710 menit.
3. Minggu belajar untuk kelas X dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu. Jumlah jam tatap muka per tahun adalah 1.292 s.d 1.520 jam pelajaran (58.140 s.d 68.400 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah dapat menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan.
4. Keterampilan/Bahasa Asing merupakan mata pelajaran pilihan yang pengalokasian waktunya diatur sekolah dan madrasah serta pemilihannya berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan siswa dan sekolah/madrasah.
5. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas merupakan contoh pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Sekolah dan madrasah dapat mengatur alokasi waktu sesuai kebutuhan siswa, sekolah dan madrasah, dan daerah dengan tetap berpatokan pada alokasi waktu per minggu.

6. Muatan Lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah sebagai ekstrakurikuler.
7. Kegiatan yang mendorong/mendukung pembiasaan diatur dan dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah secara terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran.

Tabel 5. Struktur Kurikulum Program Studi Ilmu Alam

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	5	5	5	5
6. Kesenian	2	2	2	2
7. Pendidikan Jasmani	2	2	2	2
8. Geografi	1	2	-	-
9. Fisika	5	5	5	4
10. Kimia	5	4	5	5
11. Biologi	5	5	5	4
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan /Bahasa Asing	*	*	*	*
Jumlah	39	39	38	36

Penjelasan untuk Program Studi Ilmu Alam:

1. Alokasi waktu total yang disediakan untuk kelas XI adalah 39 jam pelajaran per minggu. Kelas XII semester 1 (satu) adalah 38 jam pelajaran. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah.
2. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. Jam tatap muka per minggu adalah 39 jam pelajaran (1.755 menit).

3. Minggu belajar untuk kelas XI dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu. Jumlah jam tatap muka per tahun adalah 1.326 s.d 1.560 jam pelajaran (59.670 s.d 70.200 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah dapat menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan.
4. Minggu belajar untuk kelas XII semester 1 adalah 18 minggu. Jam tatap muka per minggu adalah 810 menit. Jumlah jam tatap muka semester 1 adalah 684 jam pelajaran (30.780 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan.
5. Minggu belajar untuk kelas XII semester 2 adalah 14 minggu. Jam tatap muka per minggu adalah 630 menit. Jumlah jam tatap muka semester 2 adalah 504 jam pelajaran (22.680 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah dapat menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan.
6. Keterampilan/Bahasa Asing merupakan mata pelajaran pilihan yang pengalokasian waktunya diatur sekolah dan madrasah.
7. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas merupakan contoh pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Sekolah dan madrasah dapat mengatur alokasi waktu sesuai kebutuhan siswa, sekolah dan madrasah, dan daerah dengan tetap berpatokan pada alokasi waktu per minggu.
8. Muatan Lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah sebagai ekstrakurikuler.
9. Kegiatan yang mendorong/mendukung pembiasaan diatur dan dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah secara terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran.

Tabel 6. Struktur Kurikulum Program Studi Ilmu Sosial

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	3	3	3	2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	4	4	4	4
6. Kesenian	2	2	2	2
7. Pendidikan Jasmani	2	2	2	2
8. Sejarah	3	3	3	3
9. Geografi	3	3	3	2
10. Ekonomi	5	5	5	5
11. Sosiologi	5	5	4	4
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan/ Bahasa Asing	*	*	*	*
Jumlah	39	39	38	36

Penjelasan untuk Program Studi Ilmu Sosial:

1. Alokasi waktu total yang disediakan untuk kelas XI adalah 39 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah.
2. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. Jam tatap muka per minggu adalah 39 jam pelajaran (1.755 menit).
3. Minggu belajar untuk kelas XI dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu. Jumlah jam tatap muka per tahun adalah 1.326 s.d 1.560 jam pelajaran (59.670 s.d 70.200 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan.
4. Minggu belajar untuk kelas XII semester 1 adalah 18 minggu. Jam tatap muka per minggu adalah 810 menit. Jumlah jam tatap muka semester 1 adalah 684

jam pelajaran (30.780 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan.

5. Minggu belajar untuk kelas XII semester 2 adalah 14 minggu. Jam tatap muka per minggu adalah 630 menit. Jumlah jam tatap muka semester 2 adalah 504 jam pelajaran (22.680 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah dapat menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan.
6. Keterampilan/Bahasa Asing merupakan mata pelajaran pilihan yang pengalokasian waktunya diatur sekolah dan madrasah.
7. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas merupakan contoh pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Sekolah dan madrasah dapat mengatur alokasi waktu sesuai kebutuhan siswa, sekolah dan madrasah, dan daerah dengan tetap berpatokan pada alokasi waktu per minggu.
8. Muatan Lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah sebagai ekstrakurikuler.
9. Kegiatan yang mendorong/mendukung pembiasaan diatur dan dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah secara terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran.

Tabel 7. Struktur Kurikulum Program Studi Bahasa

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	5	5	5	4
4. Bahasa Inggris	6	6	6	5
5. Matematika	4	4	4	4
6. Kesenian	3	3	2	2
7. Pendidikan Jasmani	2	2	2	2
8. Sejarah	3	3	3	3

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
9. Antropologi	2	2	2	2
10. Sastra Indonesia	4	4	4	4
11. Bahasa Asing lainnya	4	4	4	4
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan	*	*	*	*
Jumlah	39	39	38	36

Penjelasan untuk Program Studi Bahasa:

1. Alokasi waktu total yang disediakan untuk kelas XI adalah 39 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah.
2. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. Jam tatap muka per minggu adalah 39 jam pelajaran (1.755 menit).
3. Minggu belajar untuk kelas XI dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu. Jumlah jam tatap muka per tahun adalah 1.326 s.d 1.560 jam pelajaran (59.670 s.d 70.200 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah dapat menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan.
4. Minggu belajar untuk kelas XII semester 1 adalah 18 minggu. Jam tatap muka per minggu adalah 810 menit. Jumlah jam tatap muka semester 1 adalah 684 jam pelajaran (30.780 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan.
5. Minggu belajar untuk kelas XII semester 2 adalah 14 minggu. Jam tatap muka per minggu adalah 630 menit. Jumlah jam tatap muka semester 2 adalah 504 jam pelajaran (22.680 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah dapat menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan.

6. Bahasa terdiri atas mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing Lain (Arab, Jerman, Perancis, Jepang, dan Mandarin).
7. Mata pelajaran Keterampilan pemilihannya disesuaikan dengan bakat, minat, dan kebutuhan siswa, dan pengalokasian waktunya diatur sekolah dan madrasah.
8. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas merupakan contoh pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Sekolah dan madrasah dapat mengatur alokasi waktu sesuai kebutuhan siswa, sekolah dan madrasah, dan daerah dengan tetap berpatokan pada alokasi waktu per minggu.
9. Muatan Lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah sebagai ekstrakurikuler.
10. Kegiatan yang mendorong/mendukung pembiasaan diatur dan dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah secara terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran.

E. Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan

Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dimaksudkan untuk memberikan kemampuan bekerja sesuai dengan keahlian tertentu. Struktur kurikulum SMK dan MAK dibagi menjadi komponen normatif, adaptif, dan produktif yang ditempuh dalam suatu periode belajar selama 3 tahun (Kelas X, XI, dan XII) atau 4 tahun (Kelas X, XI, XII, dan XIII).

Komponen normatif berisi kompetensi yang bertujuan agar peserta didik menjadi warga masyarakat dan warga negara yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komponen adaptif berisi kompetensi yang bertujuan agar peserta didik mampu beradaptasi dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, budaya dan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan perkembangan dunia kerja sesuai keahlian.

Komponen produktif berisi kompetensi yang bertujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas di dunia kerja sesuai dengan program keahlian. Kompetensi dalam komponen produktif merupakan standar kompetensi yang berlaku di bidang keahlian yang ditetapkan asosiasi profesi, hasil inventarisasi dan konsensus dunia kerja, serta pihak-pihak terkait.

SMK dan MAK menerapkan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), dimana pembelajaran dirancang dan dilaksanakan bersama di sekolah dan dunia kerja atau dunia usaha/industri. Mata pelajaran keagamaan di MAK ditentukan dan dikembangkan oleh Departemen Agama.

Pelaksanaan pembelajaran di dunia kerja berdasarkan pada kesiapan dan ketersediaan kegiatan yang sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum. Pengalokasian waktu pada setiap kompetensi atau mata pendidikan dan pelatihan (diklat) dicantumkan secara akumulatif (Tabel 8).

Tabel 8. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan

Program Keahlian: (Ditetapkan Oleh Sekolah)

Program/Pendidikan dan Latihan		Alokasi Waktu
I. Program Normatif	1. Pendidikan Agama	216
	2. Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah	144
	3. Bahasa Indonesia	216
	4. Olah Raga dan Kesehatan	144
II. Program Adaptif	1. Bahasa Inggris	Sesuai Program Keahlian
	2. Matematika	
	3. Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi *)	
	4. Kewirausahaan *)	
	5. **)	
III. Program Produktif	1. ***)	Sesuai Program Keahlian
	2. ***)	
	3. ***)	
Jumlah		--

Penjelasan:

1. *) Mata pendidikan dan latihan ini ada dalam seluruh Program Keahlian.
2. **) Program Keahlian tertentu menambahkan beberapa mata pendidikan dan latihan.
3. ***) Nama mata pendidikan dan latihan Program Produktif disesuaikan dengan karakteristik program keahlian.
4. Satu unit satuan waktu yang tercantum dalam alokasi waktu adalah 60 menit.
5. Minggu efektif belajar untuk Kelas X, XI, dan XII dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu.
6. Alokasi waktu untuk SMK dan MAK adalah untuk masa belajar 3 atau 4 tahun.
7. Muatan Lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah sebagai ekstrakurikuler.
8. Kegiatan yang mendorong/mendukung pembiasaan diatur dan dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah sebagai ekstrakurikuler.

D. PENGELOLAAN KURIKULUM

A. Diversifikasi Kurikulum

Kurikulum dikembangkan dengan menerapkan prinsip diversifikasi, yakni "*Kesatuan dalam Kebijakan dan Kontekstual dalam Pelaksanaan*". Perwujudan "*Kesatuan dalam Kebijakan*" tertuang dalam pengembangan Kerangka Dasar, Standar Kompetensi Bahan Kajian, dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran, beserta Pedoman Pelaksanaan Kurikulum yang dilakukan oleh pusat. Perwujudan "*Kontekstual dalam Pelaksanaan*" tertuang dalam pengembangan silabus dan skenario pembelajaran yang dikembangkan oleh masing-masing daerah/sekolah dan madrasah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

Diversifikasi kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan, memperluas, dan memperdalam kompetensi yang tercantum dalam kurikulum agar dapat melayani keberagaman penyelenggaraan satuan pendidikan, kebutuhan dan kemampuan daerah/ sekolah dan madrasah ditinjau dari segi geografis dan budaya, serta kemampuan dan minat peserta didik. Diversifikasi kurikulum yang dirancang oleh

daerah/sekolah dan madrasah. Perwujudan diversifikasi kurikulum pendidikan kejuruan mengacu pada pencapaian penguasaan kompetensi sesuai dengan dunia kerja setempat. Hal ini dimaksudkan agar sekolah dan madrasah dapat melayani seluruh peserta didik yang memiliki potensi dan minat yang beragam sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal.

Diversifikasi kurikulum dapat juga dilaksanakan untuk melayani peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Diversifikasi kurikulum juga dilaksanakan untuk peserta didik dari daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pelaksanaan diversifikasi kurikulum di daerah perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. perluasan kesempatan berimprovisasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan;
3. penegasan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah dan madrasah, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pendidikan;
4. peningkatan pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) kinerja penyelenggaraan pendidikan;
5. perwujudan keterbukaan dan kepercayaan dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan otoritas masing-masing yang dapat membangun kesatuan dan persatuan bangsa; dan
6. penyelesaian masalah pendidikan sesuai dengan karakteristik wilayah yang bersangkutan.

Pelaksanaan kurikulum pada TKKh, SDKh, SMPKh, dan SMAKh disesuaikan dengan jenis kelainan masing-masing.

B. Pengembangan Silabus Pembelajaran

Daerah, sekolah dan madrasah mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing dengan tetap berdasarkan pada standar kompetensi. Dinas Pendidikan propinsi dan kabupaten/kota dapat mengkoordinasikan kegiatan penyusunan silabus. Penyusunan silabus dilakukan oleh guru kelas untuk TK, TKKh, SD, SDKh dan MI, MIKh, oleh guru mata pelajaran untuk SMP, SMPKh, MTs, MTsKh, SMA, SMAKh, SMK,MA, MAKh atau oleh tim pengembang kurikulum di daerah dengan melibatkan nara sumber sesuai keahliannya.

Standar kompetensi dan silabus muatan lokal dapat disusun untuk melayani kebutuhan, potensi, kekhasan, dan keunggulan lokal. Silabus khusus perlu disusun untuk melayani peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Silabus khusus juga perlu disusun untuk melayani peserta didik dari daerah terpencil, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

C. Pelaksanaan

1. Bahasa Pengantar

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap-tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian dan/atau penyajian keterampilan tertentu. Bahasa asing Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

2. Pengaturan Waktu Belajar

Jumlah hari belajar satu tahun pelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah adalah 204 s.d 240 hari. Jumlah minggu efektif adalah 34 s.d 40 minggu. Pengaturannya dilaksanakan dengan sistem semester. Pengaturan hari efektif diwujudkan dalam kalender pendidikan yang berlaku secara nasional.

Rincian waktu belajar masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

Satuan Pendidikan	Kelas	Minggu Efektif	Waktu Belajar
TK dan RA	-	34	2,5 jam (150 menit) per hari; 15 jam (900 menit) per minggu; dan 510 jam (30.600 menit) per tahun.
SD dan MI	I dan II	34 - 40	918 s.d 1.080 jam pelajaran per tahun (32.130 s.d 38.080 menit)
	III s.d VI	34 – 40	918 s.d 1.080 jam pelajaran per tahun (32.130 s.d 37.800 menit)
SMP dan MTs	VII s.d IX	34 – 40	1.156 s.d 1.520 jam pelajaran per tahun (52.020 s.d 68.400 menit).
SMA dan MA	X	34 – 40	1.292 s.d 1.520 jam pelajaran per tahun (58.140 s.d 68.400 menit).
	XI	34 – 40	1.326 s.d 1.560 jam pelajaran per tahun (59.670 s.d 70.200 menit)
	XII semester 1	18	684 jam pelajaran per semester (30.780 menit)
	XII semester 2	14	504 jam pelajaran per semester (22.680 menit)

3. Kegiatan Kurikuler

Kegiatan kurikuler dikelompokkan menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sebagai berikut:

a. Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi dengan mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban peserta didik, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Khusus satuan pendidikan kejuruan, kegiatan intrakurikuler disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi dunia kerja dan industri. Kegiatan intra kurikuler efektif per minggu dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam 5 hari atau 6

hari kerja sesuai dengan kebutuhan sekolah dan madrasah setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

b. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran di luar kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan secara kontekstual dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan untuk memenuhi tuntutan penguasaan kompetensi mata pelajaran, pembentukan karakter bangsa, dan peningkatan kecakapan hidup yang alokasi waktunya diatur secara tersendiri berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah dan madrasah/daerah. Kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa kegiatan pengayaan dan kegiatan perbaikan atau kunjungan studi ke tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan esensi materi pelajaran tertentu atau kegiatan-kegiatan kepramukaan, perkoperasian, kewirausahaan, kesehatan sekolah dan madrasah, olah raga, dan palang merah.

4. Tenaga Kependidikan

Guru dipersyaratkan mempunyai kualifikasi dan atau kompetensi keguruan untuk melaksanakan proses pembelajaran bagi peserta didik dalam mencapai kompetensi pada suatu satuan pendidikan. Kualifikasi atau kompetensi keguruan iitu dinyatakan oleh sertifikat kompetensi atau akta mengajar yang diberikan oleh lembaga pendidikan tenaga pendidikan yang terakreditasi. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Kepala Sekolah dan madrasah bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan profesional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan.

Pengawas bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan serta memberikan pelayanan profesional kepada kepala sekolah dan madrasah dan guru termasuk menyebarkan gagasan baru atau pelaksanaan pembelajaran bermutu secara efisien.

5. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan sumber belajar, buku dan alat pelajaran termasuk teknologi dan multi media yang disediakan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sekolah dan madrasah menciptakan kondisi yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, spiritual, dan kejiwaan peserta didik.

6. Remedial, Pengayaan, dan Percepatan Belajar

Sekolah dan madrasah memberikan layanan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial. Peserta didik yang mencapai ketuntasan kompetensi lebih cepat dari waktu yang ditentukan memperoleh pengayaan dan dapat mengikuti program percepatan belajar.

7. Bimbingan dan Konseling

Sekolah dan madrasah memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dalam konteks pengembangan kepribadian, sosial, karier, dan belajar lanjutan. Bimbingan dan konseling diberikan secara berkesinambungan oleh guru yang memenuhi persyaratan. Guru mata pelajaran perlu memberikan dukungan profesional kepada guru bimbingan khusus dalam mengatasi siswa yang bermasalah.

8. Pengelolaan Kurikulum di Sekolah

Sekolah dan madrasah mengelola kurikulum dengan memberdayakan seluruh unsur penyelenggara, komite sekolah dan madrasah, dewan pendidikan, dunia usaha dan industri serta pengendali mutu sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi untuk mewujudkan pencapaian standar kompetensi nasional. Kabupaten/kota, dan propinsi berperan dan bertanggungjawab dalam mengkoordinasi dan mensupervisi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah dan madrasah.

9. Kenaikan Tingkat/Kelas

Sekolah dan madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan sistem kenaikan tingkat/kelas, yaitu mulai dari Tingkat/Kelas I sampai dengan Tingkat/Kelas XII yang harus ditempuh oleh siswa secara

bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan lama masa belajar pada setiap satuan pendidikan.

10. Sekolah dan Madrasah Bertaraf Internasional

Sekolah dan madrasah bertaraf internasional didirikan untuk menghasilkan tamatan yang mampu bersaing pada tingkat internasional. Sekolah dapat menggunakan kurikulum nasional dan atau penggabungan kurikulum nasional dan internasional yang disesuaikan dengan kekhasan serta potensi sekolah, madrasah, dan daerah. Bahasa Inggris dan bahasa asing lain dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran.

D. Pentahapan Pelaksanaan

Kurikulum 2004 ini dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2004/2005 secara bertahap bagi sekolah dan madrasah yang telah siap melaksanakannya dengan pentahapan sebagai berikut:

1. Pada tahun Pertama mulai TK dan RA, kelas I dan kelas IV SD dan MI, kelas VII SMP dan MTs, serta kelas X SMA/SMK dan MA/MAK.
2. Pada tahun Kedua dilaksanakan di kelas I, II, IV, V SD dan MI, Kelas VII, VIII SMP dan MTs, serta kelas X, XI SMA/SMK dan MA/MAK.
3. Pada tahun Ketiga dan seterusnya dilaksanakan pada seluruh kelas di SD dan MI, SMP dan MTs, SMA/SMK dan MA/MAK.

Sekolah dan madrasah yang belum siap melaksanakan Kurikulum 2004 pada tahun pelajaran 2004/2005 diharapkan dapat memulainya paling lambat tahun pelajaran 2006/2007 dengan pentahapan yang sama seperti di atas.

E. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran diselenggarakan untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Kegiatan perlu pembelajaran memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap individu mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar.

Kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan, dan mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran perlu: (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif, efektif, efisien, kontekstual, dinamis, dialogis, dan bermakna. Dalam hal ini kegiatan pembelajaran mampu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.

F. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dalam pencapaian kompetensi. Penilaian di sekolah dan madrasah (internal) dilakukan dalam bentuk ulangan harian dan penugasan untuk mengetahui kemajuan dan penguasaan kompetensi di kelas. Hasil penilaian di sekolah dan madrasah digunakan untuk penentuan perbaikan, pengayaan, kenaikan kelas, dan kelulusan.

Penilaian akhir dapat diselenggarakan oleh sekolah dan madrasah atau oleh pihak luar (eksternal). Penilaian eksternal dapat digunakan sebagai pengendali mutu pendidikan seperti Ujian Akhir Nasional dan Tes Kemampuan Dasar.

Penilaian Kelas sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru. Dalam pelaksanaan penilaian kelas, guru berwenang untuk menentukan kriteria keberhasilan, cara, dan jenis penilaian. Penilaian Kelas berorientasi pada:

- **Acuan/Patokan**

Semua kompetensi perlu dinilai menggunakan acuan kriteria berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah dan madrasah menetapkan kriteria sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

- **Ketuntasan Belajar**
Pencapaian hasil belajar ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut.
- **Multi Alat dan Cara Penilaian**
Penilaian menggunakan berbagai alat dan cara, yaitu tes dan non-tes untuk memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik.
- **Kriteria Penilaian**
Penilaian memberikan informasi yang akurat tentang pencapaian kompetensi dasar peserta didik, adil terhadap semua peserta didik, terbuka bagi semua pihak, dan dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan terus menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik.
Sekolah dan madrasah melaporkan hasil penilaian kepada siswa, orang tua, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan memuat psi kemajuan dan hasil belajar secara utuh dan menyeluruh. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran dan program.

E. EVALUASI KURIKULUM

A. Tujuan Evaluasi

Evaluasi kurikulum dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan harapan masyarakat dan standar nasional pendidikan, seberapa jauh kurikulum dipahami dan dilaksanakan guru, dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam pengembangan silabus dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan madrasah; menemukan kendala dan pendukung dalam pelaksanaan; kekurangan dan kelebihan kurikulum setelah diimplementasikan; serta dampak kurikulum terhadap masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, evaluasi kurikulum dilakukan secara komprehensif, berkala dan berkelanjutan baik oleh pusat, daerah, maupun sekolah/madrasah.

Evaluasi dilakukan sejak kurikulum 2004 masih dalam proses piloting. Hasil evaluasi terhadap piloting kurikulum dilakukan sebagai masukan untuk penyempurnaan, baik yang berkenaan dengan perangkat dokumen maupun yang berkenaan dengan pelaksanaan dan hasilnya. Evaluasi secara komprehensif, berkala, dan berkelanjutan terhadap implementasi Kurikulum 2004 dilakukan untuk menyerap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dan tuntutan masyarakat. Evaluasi ini dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kurikulum sebagai upaya untuk mengkaji ulang pelaksanaan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan.

Evaluasi implementasi kurikulum tingkat nasional dilakukan terhadap wilayah pendidikan tertentu pada waktu tertentu. Hasil dari evaluasi dijadikan masukan bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki pendidikan di wilayah tersebut. Wilayah pendidikan yang dipercaya sebagai wilayah yang terbelakang dalam pendidikan harus mendapat prioritas pertama dalam evaluasi implementasi. Wilayah yang dipercaya sebagai wilayah yang maju dalam pendidikan tidak bebas dari evaluasi.

Evaluasi implementasi tingkat nasional dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi implementasi terbatas pada wilayah pendidikan di propinsi tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi implementasi di wilayah yang menjadi binaannya. Untuk melakukan evaluasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan tenaga ahli di LPTK atau di lembaga konsultan pendidikan.

B. Sasaran Evaluasi Kurikulum

Pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum difokuskan pada tiga sasaran, yaitu terhadap isi atau program, pelaksanaan atau proses dalam implementasi, hasil belajar atau kompetensi yang dicapai oleh peserta didik, dan dampak dari hasil pendidikan bagi kehidupan peserta didik dan masyarakat.

1. Evaluasi isi atau program

Sasaran evaluasi isi atau program kurikulum adalah substansi kurikulumnya itu sendiri. Dalam evaluasi ini dilakukan pengumpulan informasi atau data

yang terkait dengan kesesuaian isi kurikulum, yakni kesesuaian rumusan dan level kompetensi dengan standar nasional pendidikan, dan kesesuaian rumusan dan level kompetensi dengan tuntutan maupun kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dalam dinamika kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam evaluasi isi atau program ini juga dihimpun informasi tentang berbagai aspek yang terkait dengan kesesuaian antara silabus yang dikembangkan oleh daerah maupun sekolah dengan kebutuhan daerah dan kurikulum nasional, kesesuaian antara program pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan silabus dan kurikulum nasional; serta kekurangan dan kelebihan kurikulum tersebut bila dikaitkan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan standar nasional.

2. Evaluasi proses.

Sasaran evaluasi proses adalah keterlaksanaan kurikulum di sekolah/madrasah, terutama efektivitas, efisiensi, dan kendala-kendala yang dihadapi. Atas dasar ini dalam evaluasi proses sasaran evaluasi bukan hanya pada pelaksanaan implementasi kurikulum dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah saja, tetapi juga terhadap berbagai aspek yang terkait dengan aspek-aspek yang mendukung terhadap keterlaksanaan kurikulum tersebut. Aspek-aspek itu meliputi manajemen dan administrasi, pembiayaan, guru dan tenaga pendidikan lain, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dalam membantu pendidikan di sekolah/madrasah.

3. Evaluasi hasil

Sasaran evaluasi hasil adalah pada hasil belajar yang berupa kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil belajar dan level pencapaian kompetensi yang diperoleh peserta didik itu. Dalam evaluasi hasil ini dikumpulkan informasi yang terkait dengan prestasi yang dicapai oleh peserta didik pada setiap tingkatan sekolah dikaitkan dengan level-level kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum, baik kompetensi lulusan, maupun kompetensi mata pelajaran.

4. Evaluasi dampak

Dalam evaluasi dampak, sasaran evaluasi adalah pada aspek-aspek yang terkait dengan pencapaian kompetensi lintas kurikulum yang berupa kompetensi kecakapan hidup dan belajar sepanjang hayat. Dalam evaluasi ini sasaran evaluasi adalah apakah tamatan berbagai jenjang pendidikan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalani kehidupan dalam masyarakat dan untuk belajar sepanjang hayat sebagai dampak dari hasil belajar yang dimilikinya.

C. Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum dilakukan oleh pusat, daerah, dan sekolah/madrasah. Hasil evaluasi dijadikan bahan masukan untuk perbaikan berkelanjutan terhadap program dan/atau kurikulum itu sendiri, dan untuk dasar dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sekolah/madrasah. Pelaksanaan evaluasi pada tingkat pusat selain mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan program, proses, hasil, dan dampak yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk di tingkat pusat, juga menggunakan masukan-masukan hasil evaluasi pada tingkat daerah dan sekolah/madrasah. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh jenjang dan satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2004. Evaluasi pada tingkat daerah dilakukan oleh tim di daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota. Evaluasi ini selain mengumpulkan informasi yang terkait dengan program (silabus), proses, hasil dan dampak yang dilakukan oleh Tim pada tingkat daerah juga menggunakan masukan-masukan hasil evaluasi pada tingkat sekolah/madrasah. Evaluasi pada tingkat daerah juga dilakukan terhadap seluruh jenjang dan satuan pendidikan di daerah yang bersangkutan yang melaksanakan Kurikulum 2004. Adapun evaluasi pada tingkat sekolah/madrasah dilakukan oleh Tim di tingkat sekolah/madrasah yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan program, proses, hasil dan dampak kurikulum di sekolah/madrasah yang bersangkutan. Pelaksanaan evaluasi kurikulum pada tingkat pusat dan daerah dilakukan secara periodik setelah kurikulum diimplementasikan dalam jangka

waktu tertentu, yakni sekurang-kurangnya setelah seluruh tingkatan kelas pada setiap satuan dan jenjang pendidikan mengimplementasikan kurikulum itu. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan evaluasi juga dilakukan monitoring yang berkelanjutan agar setiap saat dapat dikumpulkan informasi tentang keterlaksanaan kurikulum tersebut. Adapun evaluasi pada tingkat sekolah dilakukan secara terus menerus, mengingat keterlaksanaan kurikulum itu adalah pada sekolah yang bersangkutan, sehingga dapat dikumpulkan data atau informasinya sesuai dengan kebutuhan.

D. Tindak Lanjut Evaluasi Kurikulum

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi kurikulum dilakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik, maka perbaikan dan pengembangan kurikulum selain dilakukan oleh pusat juga dilakukan oleh daerah, dan sekolah/madrasah. Dalam menindaklanjuti hasil evaluasi, pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap penyempurnaan dan pengembangan:

- kerangka dasar dan struktur kurikulum, serta standar isi kurikulum;
- standar kompetensi bahan kajian;
- standar kompetensi mata pelajaran;

Adapun daerah dan sekolah/madrasah bertanggungjawab dalam penjabaran dan pelaksanaan kurikulum yang mencakup:

- pengembangan silabus pembelajaran;
- pengembangan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan kurikulum; dan
- pengelolaan penilaian hasil belajar.

P E N U T U P

Sejak berdirinya lembaga yang secara khusus bertugas merancang dan mengembangkan kurikulum pada tahun 1974, yaitu Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan yang selanjutnya dikenal sebagai Puskur, berbagai inovasi di bidang kurikulum telah diperkenalkan, diuji cobakan dan diterapkan.

Dalam era tahun 1974 – 1981 pendekatan berorientasi kepada tujuan yang merupakan ciri Kurikulum 1975 dengan Program Pengembangan Sistem Instruksional dan selanjutnya dikenal dengan nama PPSI diterapkan. Pada saat yang bersamaan dalam rangka pengembangan model melalui pendekatan penelitian dan pengembangan yang dikenal dengan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pendekatan berorientasi pada tujuan diperkuat dengan prinsip belajar maju berkelanjutan (*continuous progress*) dan mastery learning diterapkan dengan menggunakan sistem “Modul” yang hakekatnya mendorong peserta didik aktif belajar sendiri dengan mendudukan guru sebagai pengelola proses pembelajaran dan sekaligus sebagai pembimbing dalam bahasa Ki Hajar Dewantara berperan sebagai *ING NGARSO SUNG TULODO ING MADYO MANGUN KARSO, TUT WURI HANDAYANI*.

Pada tahun 1981-1988, walaupun pengembangan model PPSP yang dinilai efektif tidak sepenuhnya diterapkan karena hambatan biaya, Puskur melalui Kurikulum 1984 menerapkan model belajar siswa aktif, yang dikenal dengan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif).

Sampai dengan tahun 1988 kurikulum dirancang, dikembangkan dan diterapkan untuk mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR-RI, sejak tahun 1989 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum yang dirancang oleh Puskur di desain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam undang-undang Sisdiknas, yaitu Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989. Undang-undang ini secara tersurat menetapkan fungsi setiap jenjang pendidikan, yaitu pasal 13 tentang pendidikan dasar, pasal 14 tentang fungsi

pendidikan menengah dan pasal 15 tentang fungsi pendidikan tinggi. Berangkat dari ketentuan ini kurikulum 1994 yang dirancang untuk mendukung terlaksananya fungsi tersebut salah satu inovasi yang diterapkan dalam Kurikulum 1994 adalah diterapkannya Kurikulum SMU yang penjurusannya baru dimulai pada kelas III (atau pada semester ke-5). Alasan utama diterapkannya penjurusan ini adalah agar lulusan SMU (SMA) apapun jurusannya memiliki landasan yang kuat dalam MATEMATIKA dan IPA sebagai calon mahasiswa.

Pada tahun 2004 sebagai konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum 1994 diganti dengan Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini dikenal dengan kurikulum yang menerapkan pendekatan berbasis KOMPETENSI atau KBK. Kurikulum KBK ini pada tahun 2006, dalam rangka desentralisasi pengelolaan penyelenggaraan, dalam penerapannya menerapkan model yang dikenal dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).

Dari perjalanan perencanaan, pengembangan, dan penerapan kurikulum sejak adanya Puskur nampak betapa perubahan kurikulum yang dilaksanakan landasannya adalah adanya kebijakan pendidikan. Dan bahwa setiap perubahan sasarannya adalah bagi ketercapaian tujuan pendidikan nasional secara efisien dan efektif. Namun walaupun sejak tahun 1975, telah terjadi empat kali perubahan kurikulum, yaitu 1975, 1984, 1994 dan kurikulum 2004, mutu hasil pendidikan sebagaimana yang digariskan dalam tujuan pendidikan nasional belum juga terwujud. Pertanyaannya adalah mengapa setelah berkali-kali dilakukan pembaharuan/perubahan kurikulum tetapi mutu pendidikan nasional belum juga meningkat ? Menjawab pertanyaan ini penulis teringat pada peristiwa tahun 1957. Pada saat itu Amerika Serikat dikejutkan oleh keberhasilan Soviet Uni (USSR) , sekarang Rusia yang berhasil meluncurkan Sputnik. Kekagetan A.S. karena ketertinggalannya dari Soviet Uni dalam teknologi ruang angkasa, Senator J. F. Kennedy yang kemudian menjadi presiden A.S. mengajukan *pertanyaan "What is wrong with American classroom?"*

Sesungguhnya kenyataan bahwa setelah berbagai inovasi telah diajukan oleh Puskur, baik kurikulum 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006, tetapi nampaknya belum bermakna bagi meningkatnya mutu pendidikan nasional, dalam pandangan penulis tidak lain karena apa yang dirancang dan dikembangkan oleh Puskur, kecuali Kurikulum PPSP, pada umumnya tidak berpengaruh pada bagaimana peserta didik belajar.

Dalam perjalanan Puskur sebagai salah satu lembaga eselon dua di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan telah mengalami dinamika sesuai dengan Kebijakan Menteri, karena adanya perubahan dan tuntutan jaman serta kebutuhan. Pada tahun 1986, dilakukan restrukturisasi di lingkungan Balitbang, dimana fungsi-fungsi yang disandang Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan mengalami perubahan, yaitu ditiadakannya fungsi pengembangan sarana pendidikan, sehingga nama Pusbangkurandik disesuaikan dengan perubahan tersebut menjadi Pusat Kurikulum (Puskur). Sebagai konsekuensi dari itu, Bidang Pengembangan Sarana Pendidikan yang merupakan salah bidang di Puskur dilikuidasi. Fasilitas milik Puskur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang tersebut telah diserahkan kepada lembaga terkait, yaitu: UPI (IKIP Bandung, dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Sedangkan peniadaan kata pengembangan dalam pengembangan kurikulum merupakan penyempurnaan dari aspek kebahasaan, dimana kata pengembangan merupakan suatu proses ataupun tahap dihasilkannya kurikulum, sehingga dianggap sudah cukup memadai nama pusat menjadi Pusat Kurikulum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor:20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pasal 35, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagian fungsi dari Pusat Kurikulum terutama terkait dengan penyusunan kurikulum nasional yang telah melekat di Puskur sejak keberadaan lembaga tersebut sampai dengan penyusunan kurikulum 2004 (kurikulum transisi yang diuji cobakan) digeser atau berpindah kepada lembaga baru, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan.

Reformasi pendidikan yang diawali dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 35 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan telah membawa konsekuensi pada pergeseran fungsi pusat-pusat dilingkungan Balitbang, terutama Pusat Kurikulum dan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Fungsi penyusunan atau pengembangan kurikulum nasional yang telah lama dijalankan Puskur, Balitbang dialihkan menjadi salah satu fungsi yang dijalankan lembaga baru yang independen yaitu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan nasional yang kita kenal dengan nama BSNP. Badan Standar Nasional Pendidikan adalah badan yang mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional (Peraturan Pemerintah Nomor:19 Tahun 2005, pasal 1 butir 22). Tiga diantara delapan standar yang menjadi garapan BSNP adalah standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ketiga standar tersebut disiapkan oleh BSNP dan diberlakukan secara nasional dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Kandungan ketiga standar tersebut pada dasarnya adalah merupakan kurikulum nasional untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah yang mencakup semua isi kurikulum dan semua mata pelajaran yang diajarkan di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Seperti diketahui, selama ini, sebelum adanya BSNP, penyusunan dan/atau pengembangan kurikulum nasional merupakan fungsi yang dijalankan oleh Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.

Sejak dibentuk BSNP, maka tidak dijumpai lagi istilah kurikulum nasional. Kurikulum nasional digantikan dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ketiga standar tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi daerah dan satuan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi dan misi satuan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan menjadi kurikulum milik satuan pendidikan yang bersangkutan dengan sebutan “generic” disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan fungsi BSNP yang demikian, maka Puskur tidak lagi menjalankan fungsi pengembangan kurikulum nasional.

Pergeseran fungsi Pusat Kurikulum Balitbang yang sebelumnya menjadi pengembang kurikulum nasional, sekarang Puskur menjalankan fungsi barunya yaitu membantu daerah atau satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Pusat Kurikulum juga mengembangkan berbagai model kurikulum dan pembelajaran yang beragam. Model tersebut ditawarkan kepada daerah atau satuan pendidikan untuk diadopsi ataupun diadaptasi yang sifatnya tidak wajib.

Dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hakekat pendidikan (pasal 1 ayat (1), tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional (pasal 3), tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai proses pembudayaan (pasal 4 ayat(3), dan tentang hakl peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minatnya, Puskur dalam merancang kurikulum perlu sampai pada tingkatan rancangan model pembelajaran yang perlu diterapkan. Untuk itu Puskur perlu mengelola bersama dengan LPTK sekolah-sekolah percobaan yang sepenuhnya menerapkan konsep kurikulum yang utuh dari STRUKTUR PROGRAM, MATERI, MODEL PEMBELAJARAN, SISTEM EVALUASI dan INFRASTRUKTUR yang dibutuhkan bagi dapat dilaksanakannya kurikulum sesuai dengan prinsip-prinsip dan konsep yang dianut.

Demikian catatan akhir terhadap perjalanan sejarah Pusat Kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1971. Cluster II, Identifikasi Tujuan-Tujuan Pendidikan, Bagian I: Proses dan Hasil Identifikasi Tujuan-tujuan Kurikulum.
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981. Sistem dan Pengelolaan PPSPP Dalam Rangka Pembaharuan Pendidikan Nasional.
 3. Department of Education And Culture Republic of Indonesia, 1984. A Brief Report of The In-Service Training of the B Program of The 1984 Senior High School Curriculum (SMA).
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. Rangkuman Meta Analisis Hasil Evaluasi dan Penelitian SPP-CBSA.
 5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975. Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) 1975, Buku: I 1; Bidang Studi: Ketentuan-Ketentuan Pokok, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1975, Buku: I 1; Bidang Studi: Ketentuan-Ketentuan Pokok, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976. Buku I, Ketentuan-ketentuan Pokok, Kurikulum Sekolah dasar 1975, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
 8. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987. Petunjuk Peneapan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Dasar.
 9. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 10. -----, 1997. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pendidikan Prasekolah.
-

11. -----, 1997. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
12. -----, 1997. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. Pokok-Pokok Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pada Acara Peresmian Penyempurnaan Kurikulum 1994.
14. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. Kurikulum Pendidikan Dasar, Landasan Program dan Pengembangan.
15. -----, 1993. Kurikulum Sekolah Menengah Umum, Landasan, Program dan Pengembangan.
16. _____, 1993. Penjelasan Tentang Kurikulum Baru.
17. Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
18. _____, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
19. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999, beserta Pidato Presiden Republik Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid, Pidato Wakil Presiden Republik Indonesia, Megawati soekarnoputri, Jakarta: PT. Pabelan Jayakarta.
20. Indah Surabaya, 1988. GBHN Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988 – 1993 Dan Susunan Kabinet Pembangunan V Beserta Foto.
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 079/O/1975, tanggal 17 April 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

22. _____ Nomor: 008b/U/1975, tanggal 17 Januari 1975, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan.
23. _____ Nomor: 008c/U/1975, tanggal 17 Januari 1975, tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Dasar.
24. _____ Nomor: 008d/U/1975, tanggal 17 Januari 1975, tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
25. _____ Nomor: 008e/U/1975, tanggal 17 Januari 1975, tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.
26. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0461/U/1983, Tanggal 22 Oktober 1983, tentang Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
27. _____ Nomor: 0462/U/1983, tanggal 22 Oktober 1983 tentang Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan bangsa sebagai Bidang/Program Pendidikan yang berdiri sendiri.
28. _____ Nomor: 0222f/O/1980, tanggal 11 September 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
29. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993, Buku Lampiran II, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar, Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
30. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Kelembagaan Islam Departemen Agama Islam Departemen Agama Nomor: 415/C/Kep/Kp/1998,

Nomor : 147/G/Kep/P/1998, dan Nomor: E/322A/1998 tentang Pembentukan Tim Penyempurna Kurikulum 1994 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 24 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses.
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 22 Tahun 2006 dan Nomor: 23 Tahun 2006.
36. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Balitbang Dikbud, 1996. Perbedaan Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994, Untuk Mata Pelajaran: Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Ekonomi dan Akuntansi, Sosiologi dan Antropologi, Geografi, dan Bahasa Inggris.
37. _____, 1993. Garis-Garis Besar Program Pengajaran Mata Pelajaran Matematika Sekolah Dasar (SD).
38. _____, 1993. Garis-Garis Besar Program Pengajaran Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Sekolah Dasar (SD).
39. _____, 1993. Garis-Garis Besar
 - a. _____ Program Pengajaran Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah Dasar (SD).
40. Soedijarto, 1977. A Guide to The Implementation of The Modular Instructional System at The PPSP in The Development Stage, Office of

Educational and Cultural Research and Development (BP3K), Ministry of Education and Culture, The Republic of Indonesia.

41. -----, 1973. Identifikasi Tujuan-Tujuan Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
42. Tangyong Agus F. et.al. 1989. Quality Through Support For Teachers, A Case Study From Indonesia, Jakarta: The Office of Educational and Cultural Research and Development, Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia and The Department of International and Comparative Education, Institute of Education, University of London.
43. TAP MPR No. II/MPR/1083 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Susunan Kabinet Pembangunan IV, CV. Aneka, Semarang
44. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989), Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1989,
45. Office of Educational and Cultural Research and Development (1985), Main Report Sector Review September 1 – October 28, 1985, Jakarta
46. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Studi Perkembangan Kognitif Anak Sekolah Dasar di Indonesia, Buku I Laporan Umum, Jakarta, Desember 1984.
47. Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbangdikbud (1987), Laporan Penelitian Kemampuan Guru tentang IPA dan Sarana Pelajaran IPA di Sekolah Dasar tahun 1985/1986 (p22 – 37)
48. S. Nasution, Prof. Dr., MA (1986), Asas-Asas Kurikulum, Penerbit Jemmars, Bandung (p110 – 115, p135 – 143)
49. Squires, D.A, Huitt, W.G., Segars, J.K. (1984), Effective Schools and Classrooms: A Research Based Perspective, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Virginia 22314 (p.11 – 15)
50. Bloom, B.S. et al. (1972), Taxonomy of Educational Objective The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain, David McKay Company, Inc., New York (p.22 – 43)
51. Wiles,J., Bondi J., (1989), Curriculum Development, A Guide to Practice, Third Edition, Merrill Publishing Company, A Belt & Howell Information Company, Columbus, Toronto, London, Melbourne (p.88 – 122)

52. Alberts B.. et al (1996), National Science Education Standards, Change Learn, National Academic Press, Washington, DC.(p11 – 21)
53. Block J.H., (1971), Mastery Learning, Theory and Practice, Theory and Practice, Holt, Reinhart and Winston, Inc. New York, Chicago, San Francisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, London, Sydney (p13-23)
54. Tanner D, Tanner L.N. (1980), Curriculum Development, Theory and Practice, second edition, Macmillan Publishing Co., Inc. New York, Collier Macmillen Publishers, London (p275 – 279)
55. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984), Landasan, Program dan Pengembangan, Kutikulum 1984 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Jakarta.
56. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Balitbangdikbud (1987), Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Program Pengajaran Muatan Lokal untuk Guru Sekolah Dasar, Jakarta
57. Pusat Kurikulum Balitbang Depdikbud (1985). Kurikulum 1984: Pedoman Proses Belajar-Mengajar, Jakarta.